

**PRAKTIK POLITIK PATRONASE DAN PENGARUHNYA  
TERHADAP MASYARAKAT MISKIN PADA PEMILIHAN  
LEGISLATIF 2024 KOTA TANGERANG KECAMATAN  
KARANG TENGAH**

**Studi Kasus Kelurahan Karang Mulya**

**SKRIPSI**

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh :

**YUNITA AMELIA  
NIM. 2006016101**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2024**

## NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 5 (Lima) Ekslembar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang  
Di Tempat

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka

kami yang menyatakan skripsi dari mahasiswa:

Nama : Yunita Amelia

NIM : 2006016101

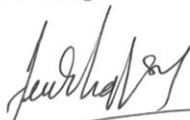
Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Praktik Politik Patronase dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Miskin Pada Pemilihan Legislatif 2024 Kota Tangerang Kecamatan Karang Tengah (Studi Kasus Kelurahan Karang Mulya)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 10 Oktober 2024  
Pebimbing

  
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Mahsun M.A.', is written over a horizontal line that extends across the page.

**Muhammad Mahsun M.A**  
**NIP: 198511182016011901**

PENGESAHAN SKRIPSI

PRAKTIK POLITIK PATRONASE DAN PENGARUHNYA TERHADAP  
MASYARAKAT MISKIN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2024 KOTA  
TANGERANG KECAMATAN KARANG TENGAH  
(Studi Kasus Kelurahan Karang Mulya)

Disusun Oleh :  
**Yunita Amelia**  
2006016101

Telah dipertahankan di depan dewan penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik UIN Walisongo Semarang pada tanggal 11 November 2024 dan  
Dinyatakan LULUS  
Susunan Dewan Penguji



Muhammad Mahsun M.A  
NIP. 198511182016011901

Sekretaris

Tika Ifrida Takayasa M.A  
NIP. 198811152019032018

Penguji

Pembimbing

Mashrohatun M.Si  
NIP. 198806212018012001

Muhammad Mahsun M.A  
NIP. 198511182016011901

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “Praktik Politik Patronase dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Miskin Pada Pemilihan Legislatif 2024 Kota Tangerang Kecamatan Karang Tengah (Studi Kasus Kelurahan Karang Mulya) “ merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang atau lembaga tinggi lainnya. Pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari hasil penerbit maupun belum/tidak di terbitkan, sumbernya di cantumkan sebagai sumber referensi yang diperoleh dari hasil penerbit maupun belum/tidak di terbitkan, sumbernya di cantumkan sebagai sumberreferensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang 10 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



Yunita Amelia

NIM: 2006016101

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Politik di Uin Walisongo Semarang, dengan skripsi yang berjudul *“Praktik Politik Patronase dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Miskin Pada Pemilihan Legislatif 2024 Kota Tangerang Kecamatan Karang Tengah (Studi Kasus Kelurahan Karang Mulya).*

Selesainya penulisan skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa penulis dapatkan. Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, Kesehatan, dan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

2. Rektor Uin Walisongo Semarang, Prof. Dr. Nizar, MAg yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Uin Walisongo Semarang;
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag yang telah memberikan semangat serta motivasi kepada mahasiswa Ilmu Politik;
4. Bapak Muhammad Mahsun, M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, ilmu pengetahuan, saran, kritik, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi;
5. Segenap jajaran Dosen FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta motivasi sehingga dapat mengimplementasikan ke dalam penyusunan skripsi;
6. Segenap jajaran dosen dan pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang;
7. Permata hati penulis Ibu Khodijah (Almh) dan Ibu Kedua Ibu Amanah (Almh) seseorang yang biasa saya sebut ibu terimakasih banyak penulis ucapkan atas pelajaran hidup, dukungan, motivasi dan doa yang selalu dipanjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagaimana perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi.

Terimakasih sudah mengantarkan pada tahap ini, meskipun perjalanan selanjutnya harus saya lewati tanpa engkau temani lagi;

8. Ayah penulis yang penulis sayangi dan banggakan, Bapak Asmujab orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang sudah diberikan. Meskipun tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan. Namun mampu mendidik dan gigih dalam memanjatkan doa yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana;
9. Kakak dan Adik Tercinta tercinta Muhammad Amin, Fitriah, dan Fasha Nur Hakim segala dukungan dan bantuannya sehingga penulis dapat terpenuhi segala kebutuhannya dan mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Tante dan Om yang saya sayangi Dwi Novie Listiyanti dan Robi Asbi Terima Kasih Untuk Segala bentuk dukungan dan bantuan dalam hidup penulis.
11. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan M. Rifqi Ashshddiqie, Puput Maulidatul Nabila, Nurul Azzahra, Artia Maulia, Fadhil Yassar, Jennifer Apriliana, Wardah Aliyah, Azka Safira, Denti Tria Istikhana, Ali Abdul Kareem Ali Fateh Allah, Ananda

Atha karena telah memberikan motivasi serta dukungan dalam pengerjaan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

12. Seluruh teman-teman Ilmu Politik C Angkatan 20 terimakasih karena telah menemani berproses dan menimba ilmu bersama di UIN Walisongo Semarang. *Seeyou on top guys*;
13. Kepada pihak-pihak yang berada dibalik layar yang berkontribusi dalam memberikan dukungan serta motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
14. Terakhir, untuk diri sendiri, terimakasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun poses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan semaksimal mungkin yang patut dibanggakan untuk diri sendiri;

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan dan peningkatan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Bidang Ilmu Politik. Penulis ucapkan terimakasih.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua insan yang selalu menjadi sumber inspirasi, kekuatan, dan cinta sejati dalam hidupku Bapak Asmujab dan Ibu Khodijah (Almh), dan Ibu kedua Amanah (Almh) yang telah mendampingi, mendidik, dan memberikan segala bentuk pengorbanan untuk penulis. Tidak ada kata-kata betapa besar rasa terimakasihku kepada kalian. Semoga persembahan sederhana ini menjadi ungkapan kecil dan rasa cinta penulis kepada kalian berdua.

## **MOTTO**

“ Dan aku menyerahkan urusanku kepada allah  
Sungguh, Allah Maha Melihat akan hamba- hamba- Nya”  
( Q.S Ghafir 40 : 44 )

“ Sabar sesaat saja disaat marah akan menyelamatkan kita  
dari ribuan penyesalan”  
( Ali bin Abi Thalib)

## ABSTRAK

Pemilihan legislatif adalah elemen penting demokrasi yang memungkinkan masyarakat memilih wakil mereka di parlemen. Namun, di kalangan masyarakat miskin, politik patronase dalam bentuk pemberian uang atau bantuan materi oleh kandidat untuk mendapatkan dukungan sering terjadi. Praktik ini tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga mempengaruhi pilihan politik masyarakat miskin, yang lebih fokus pada kebutuhan mendesak. Penelitian ini meneliti praktik politik patronase dalam Pemilihan Legislatif 2024 di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, dengan studi kasus di Kelurahan Karang Mulya. penulis memfokuskan studi ini untuk menjawab pertanyaan : 1) Bagaimana praktik politik uang terjadi di Kelurahan Karang Mulya pada Pemilihan Legislatif 2024? 2) Apakah uang yang diberikan kandidat mempengaruhi pilihan masyarakat pada pemilihan tersebut?

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pilihan rasional (rational choice) dan patronase politik. Teori pilihan rasional menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan berdasarkan perhitungan manfaat dan biaya, sedangkan teori patronase politik menggambarkan hubungan saling menguntungkan antara pemberi dan penerima, di mana para kandidat memberikan keuntungan material sebagai imbalan atas dukungan politik. Dengan menggabungkan kedua teori ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami motif dan logika di balik tindakan politik masyarakat serta dampak dari praktik patronase. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus guna melihat praktik politik patronase dan pengaruhnya terhadap masyarakat miskin pada pemilihan legislatif 2024 di kelurahan karang mulya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang dalam Pemilihan Legislatif 2024 di Kelurahan Karang Mulya masih sangat menonjol dan menjadi tantangan serius bagi demokrasi lokal. Berbagai bentuk patronase politik digunakan oleh para kandidat untuk memobilisasi suara, dengan vote buying atau pembelian suara

menjadi strategi yang paling dominan. Praktik ini dilakukan melalui pemberian uang tunai langsung kepada pemilih, terutama menjelang hari pemungutan suara, yang dikenal dengan "serangan fajar." Selain itu, praktik individual gifts dan club goods juga banyak digunakan, di mana para kandidat memberikan barang atau fasilitas kepada individu atau kelompok masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa uang yang diberikan oleh kandidat memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pemilih, terutama di kalangan masyarakat yang rentan secara ekonomi. Dalam konteks ini, keputusan pemilih lebih banyak didorong oleh pragmatisme mencari keuntungan jangka pendek daripada pertimbangan rasional seperti rekam jejak dan kapabilitas kandidat, sebagaimana dijelaskan dalam teori Rational Choice. Dengan demikian, politik uang telah memperlemah integritas pemilihan dan memperkuat ketergantungan masyarakat pada pemberian materi dari para kandidat.

**Kata Kunci : Masyarakat, Pemilihan Legislatif, Politik Uang**

## *Abstract*

Legislative elections are an important element of democracy that allows people to elect their representatives in parliament. However, among poor communities, patronage politics in the form of giving money or material assistance by candidates to gain support often occurs. This practice not only undermines democracy, but also influences the political choices of poor people, who are more focused on immediate needs. This research examines the practice of patronage politics in the 2024 Legislative Election in Karang Tengah District, Tangerang City, with a case study in Karang Mulya District. The author focuses this study on answering the questions: 1) How will the practice of money politics occur in Karang Mulya Subdistrict in the 2024 Legislative Election? 2) Does the money given by candidates influence people's choices in the election?

The theory used in this research is rational choice theory and political patronage. Rational choice theory explains how individuals make decisions based on calculations of benefits and costs, while political patronage theory describes a mutually beneficial relationship between givers and recipients, in which candidates provide material benefits in exchange for political support. By combining these two theories, this research aims to understand the motives and logic behind people's political actions as well as the impact of patronage practices. This research uses a qualitative method with a case study approach to look at the political practices of patronage and its influence on poor communities in the 2024 legislative elections in Karang Mulya sub-district.

The research results show that the practice of money politics in the 2024 Legislative Election in Karang Mulya Subdistrict is still very prominent and poses a serious challenge to local democracy. Various forms of political patronage are used by candidates to mobilize votes, with vote buying being the most dominant strategy. This practice is carried out through giving cash directly to voters, especially near voting day, known as "dawn strikes." Apart from that, the practice of individual gifts and club goods is also

widely used, where candidates provide goods or facilities to individuals or community groups. These findings suggest that money given by candidates has a significant influence on voter decisions, especially among economically vulnerable communities. In this context, voter decisions are driven more by pragmatism seeking short-term profits rather than rational considerations such as the candidate's track record and capabilities, as explained in Rational Choice theory. Thus, money politics has weakened the integrity of elections and strengthened people's dependence on material donations from candidates.

**Keywords: Society, Legislative Elections, Money Politics**

## DAFTAR ISI

|  |              |
|--|--------------|
| <b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....          | <b>iii</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> ..... | <b>iv</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....              | <b>v</b>     |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                 | <b>ix</b>    |
| <b>MOTTO</b> .....                       | <b>x</b>     |
| <b>ABSTRAK</b> .....                     | <b>xi</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                  | <b>xv</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....               | <b>xix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....           | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang .....                  | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....                 | 9            |
| C. Tujuan Penelitian .....               | 9            |
| D. Manfaat Penelitian .....              | 9            |
| E. Tinjauan Pustaka .....                | 10           |
| 1. Politik Uang .....                    | 10           |
| 2. Partisipasi Politik .....             | 14           |
| F. Teori Penelitian .....                | 17           |
| G. Kerangka Teori .....                  | 23           |
| H. Metode Penelitian .....               | 28           |
| I. Sistematika Penulisan Skripsi .....   | 35           |
| <b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....       | <b>24</b>    |
| A. Patronase Politik .....               | 24           |

|  |           |
|--|-----------|
| B. Teori <i>Rational Choice</i> .....  | 40        |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN KARANG</b>  |           |
| <b>MULYA</b> .....   | <b>39</b> |
| A. Gambaran umum Kelurahan Karang Mulya .....  | 39        |
| 1. Kondisi Geografis .....   | 39        |
| 2. Kondisi Demografis .....  | 40        |
| B. Jumlah kesejahteraan keluarga.....  | 46        |
| C. Jumlah sektor mata pencaharian.....   | 48        |
| D. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan .....  | 50        |
| E. Dinamika Politik Pada Pemilihan Legislatif 2024 di<br>Kelurahan Karang Mulya.....                           | 52        |
| <b>BAB VI PRAKTIK POLITIK PATRONASE PADA</b>   |           |
| <b>PEMILIHAN LEGISLATIF 2024 DI</b>  |           |
| <b>KELURAHAN KARANG MULYA,</b>   |           |
| <b>KECAMATAN KARANG TENGAH KOTA</b>  |           |
| <b>TANGERANG</b> .....   | <b>59</b> |
| A. Bagaimana Politik Patronase Dilakukan Di Kelurahan<br>Karang Mulya Pada Pemilihan Legislatif 2024 .....     | 59        |
| B. Jenis – Jenis Politik Patronase Yang Terjadi Pada<br>Pemilihan Legislatif 2024 di Kelurahan Karang Mulya .. | 66        |
| B1. Praktik Politik Patronase Dalam Bentuk Uang<br>(vote buying).....  | 66        |
| B.2 Individual Gift (Pemberian Pribadi).....   | 83        |
| B.3 Club Good (Pemberian Kelompok) .....   | 86        |
| B.4 Services and Activities.....   | 88        |

|   |            |
|---|------------|
| B.5 Pork Barrel .....   | 91         |
| C. Proses Patronase Politik Dalam Pemilihan Legislatif<br>2024 Di Kelurahan Karang Mulya .....  | 95         |
| <b>BAB V PENGARUH POLITIK PATRONASE<br/>TERHADAP PILIHAN MASYARAKAT PADA<br/>PEMILIHAN LEGISLATIF 2024 DI<br/>KELURAHAN KARANG MULYA KOTA<br/>TANGERANG .....</b> | <b>85</b>  |
| A. Dampak Politik Patronase Terhadap Masyarakat di<br>Kelurahan Karang Mulya .....  | 85         |
| <b>BAB VI PENUTUP .....</b>   | <b>96</b>  |
| A. Kesimpulan .....   | 96         |
| B. Saran .....  | 99         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>100</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>  | <b>105</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>   | <b>109</b> |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 2024).....   | 41 |
| Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur .....   | 42 |
| Tabel 3. 3 Jumlah Kesejahteraan Keluarga .....  | 46 |
| Tabel 3. 4 Jumlah Sektor Mata Pencarian .....   | 48 |
| Tabel 3. 5 Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan.....  | 50 |
| Tabel 4. 1 Jumlah Partai dan Caleg DPRD Kota Tangerang<br>yang bertarung pada Pileg 2024 Dapil 4 Kota<br>Tangerang di Wilayah Kelurahan Karang Mulya<br>Kecamatan Karang Tengah ..... | 53 |
| Tabel 4. 2 Jumlah Partai dan Caleg DPRD Provinsi Banten<br>yang bertarung pada Pileg 2024 Dapil Banten 8 di<br>Wilayah Kelurahan Karang Mulya Kecamatan<br>Karang Tengah .....        | 55 |
| Tabel 4. 3 Rekapitulasi perolehan suara legislatif dalam rentang<br>Tahun 2004-2009 di Dapil 4 di Wilayah Kelurahan<br>Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah .....                     | 58 |
| Tabel 4. 4 Rekapitulasi perolehan suara legislatif Kota<br>Tangerang di Dapil 4 di Wilayah Kelurahan<br>Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah .....                                    | 59 |
| Tabel 4. 5 Tabel Perolehan Kursi Anggota Legislatif pada<br>pemilu legislatif 2024 untuk daerah pemilihan Kota<br>Tangerang IV .....  | 61 |

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4. 1 Diagram Rekapitulasi Perolehan Suara Realcount  
Pileg di Dapil Kota Tangerang 4..... 60
- Gambar 4. 2 Diagram Rekapitulasi Perolehan Suara Realcount  
Pileg di Dapil Kota Tangerang 4..... 63
- Gambar 4. 3 Struktur Mesin Politik Caleg Desy Yusandi dalam  
Pileg DPRD Provinsi Banten Dari Dapil Banten 8 60
- Gambar 4. 4 Struktur Mesin Politik Caleg Desy Yusandi dalam  
Pileg DPRD Provinsi Banten Dari Dapil Banten 8.. 63
- Gambar 4. 5 Struktur Tim sukses mandiri dengan  
mengandalkan jaringan keluarga , teman dan  
mitra yang dilakukan Caleg..... 65
- Gambar 4. 6 Alur Koordinasi dan Alur Laporan Tim Sukses  
Caleg pada Pemilihan Legislatif , yang digunakan  
juga oleh Desy Yusandi..... 66

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Diselenggarakannya pemilihan umum (PEMILU) menjadi salah satu ciri dan karakteristik sebuah negara yang memiliki sistem politik demokrasi. Akan tetapi tidak semua pemilihan umum di setiap negara yang menganut demokrasi dilaksanakan dengan sistem yang sama. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi geografis, dan latar belakang sosial serta kultur dari masyarakatnya.

Perjalanan sistem pemilu di Indonesia khususnya yang terjadi pada pemilu legislatif tahun 2004 menjadi tonggak Sejarah baru bagi demokratisasi pasca perubahan amendemen UUD 1945. Perubahan ini menunjukkan adanya perubahan yang sangat signifikan dalam sistem pemilu khususnya pemilu legislatif yang dilaksanakan secara langsung dengan sistem Proporsional Terbuka. Adanya sistem proporsional terbuka ini telah diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari undang-undang pemilu sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Melalui sistem proporsional terbuka inilah, partai politik dapat menyusun strategi komunikasi langsung kepada masyarakat untuk memperkuat pengaruh dan juga mendongkrak elektabilitas setiap calon anggota legislatif yang akan dipilih secara langsung oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat

dalam menyalurkan aspirasinya secara langsung melalui pemilu akan berdampak pada siapa yang nantinya akan menjadi perwakilan mereka serta menjalankan fungsi pengawasan dan control terhadap kekuasaan eksekutif pemerintahan yang dijalankan oleh negara (Nuraeni, 2013)

Namun disisi lain, adanya kesempatan partai politik untuk memperkuat kedudukan dan pengaruhnya kepada masyarakat secara langsung. Hal ini memunculkan persaingan bagi masing-masing partai politik atau bahkan masing-masing calon anggota legislatif yang berasal dari satu partai, untuk meraih simpati masyarakat. Ditunjang dengan sumberdaya yang mereka miliki maka apa yang disebut fenomena hubungan patronase yang di implementasikan dalam bentuk politik uang masih banyak terjadi.

Politik uang terbagi menjadi beberapa bentuk yakni *vote buying* (pembelian suara), *individual gift* (pemberian pribadi), *club good* (pemberian kelompok) dan *pork barrel* (politik gentong babi). Dengan ditetapkannya sistem proporsional terbuka menjadikan para kandidat bersaing dengan kandidat lainnya di suatu partai demi meraih suara pribadi (personal vote), daripada bersaing dengan rival yang selain partai mereka (Aspinall & Sukjamati, 2015 : 13).

Data menunjukkan bahwa di tahun 2019 Indonesia menjadi negara yang menduduki peringkat ke tiga praktik politik uang tertinggi di dunia. Mengutip dari apa yang disampaikan

Burhanudin Muhtadi bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga dibawah Uganda dan Benin yang melakukan praktik politik uang. Muhtadi menyampaikan bahwa sekitra 33% atau 62 Juta dari 187 pemilih yang praktik jual beli suara. (dikutip dari terlibat <https://www.cnnindonesia.com/2023>). Muhtadi (2019) menambahkan bahwa praktik semacam ini sudah lazim dilakukan dalam pemilu terutama pasca bergulirnya reformasi dan penerapan pemilu secara langsung melalui proporsional terbuka.

Apa yang diberikan oleh calon anggota legislatif kepada masyarakat calon pemilih akan berpengaruh pada kepada siapa suara masyarakat diberikan dalam pemilihan umum. hasil pemilu bukan didasarkan pada pilihan masyarakat yang melihat Visi dan Misi Caleg yang akan membawa aspirasi mereka namun lebih kepada siapa sosok yang dapat memberikan lebih banyak kepada masyarakat itulah yang akan memperoleh suara dukungan paling banyak. Dengan demikian rasionalitas masyarakat memilih karena didasarkan pada siapa yang bisa memenuhi kebutuhan mereka maka akan dipilih.(Aspinall & Sukjamati, 2015 )

Ketidakseimbangan penguasaan sumberdaya antara masyarakat dengan elit partai politik menjadikan hubungan patron-klien terjadi melalui praktik-praktik politik uang dalam pemilu tersebut. Artinya, kemiskinan di kalangan masyarakat dianggap sebagai pilihan yang rasional untuk meraih

keuntungan, terutama ketika mereka menerima hadiah atau imbalan yang diberikan oleh calon politik. (Ismail, 2019: 1).

Kelurahan Karang Mulya merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang yang berdasarkan data dinas BPS provinsi Banten pada tahun 2024 jumlah penduduk di kelurahan ini mencapai 15.048 jiwa. Pada pemilihan umum tingkat Kabupaten/Kota, maupun provinsi Kelurahan Karang Mulya termasuk bagian dari daerah pemilihan (dapil) 4 Kota Tangerang. Sebagai salah satu wilayah penyangga ibu kota, Kelurahan Karang Mulya yang masuk dalam wilayah Kota Tangerang dinilai sebagai salah satu wilayah strategis untuk mendulang perolehan suara dalam pemilihan legislatif 2024. Hal ini dibuktikan dengan fakta Kelurahan Karang Mulya merupakan kelurahan yang memiliki daftar pemilih tetap terbanyak ke-4 di kecamatan Karang Tengah yang dinyatakan dalam rekapitulasi tempat pemungutan suara pada 2019 dengan sumber KPU Provinsi Banten. Urutan pertama ada pada kelurahan Karang Tengah dengan 17,984 pemilih.

Oleh karena hal tersebut, bukan tidak mungkin wilayah kelurahan Karang Mulya menjadi wilayah tempat hubungan patronase dan praktik politik uang terjadi khususnya dalam pileg 2024. Berdasarkan observasi pra penelitian penulis menemukan di pemilu legislatif 2019 terdapat sebuah praktik politik uang yang telah dilakukan oleh para calon legislatif. Dari calon

legislatif DPRD Kota Tangerang partai golongan karya (Golkar) Bapak H. Zamaluddin melalui timsesannya, Masyarakat menerima uang dengan jumlah uang berbeda-beda dari bernilai 50.000 rupiah hingga 300.000 rupiah, dikasihkan dengan berbentuk amplop beserta stiker calon legislatif tersebut, Kedua Calon Legislatif DPRD Provinsi Banten dari Partai Amanat Nasioan (PAN) Ibu Hj Ella Silvia memberikan masyarakat sembako yang berisikan beras, minyak dan teh dengan tote bag dengan design nama calon legislatif tersebut. Dari berbagai politik uang yang dibagikan untuk masyarakat, para calon mengharapkan pilihan suara masyarakat jatuh pada mereka dan juga tentunya mengharapkan kemenangan.

Selanjutnya, di 2024 ini persaingan lebih ketat dan penulis ingin mengkaji perkembangan terkini dari praktik politik uang yang ada di Karang Mulya. Kelurahan Karang Mulya masuk kedalam Dapil 8 dalam pemilihan DPRD Provinsi kota Tangerang dengan jumlah 7 kursi termasuk dalam Tangerang B terbagi menjadi 8 yaitu Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Pinang, Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Ciledug, lalu yang terakhir Kecamatan Larangan. Di Kelurahan Karang Mulya, terdapat dua rival yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN), kandidat 1 dari Partai Amanat Nasional, telah menjabat sebagai anggota legislatif selama dua periode, dan dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2024, ia akan bersaing

dengan kandidat no 4 dari Partai Persatuan Bangsa (PPP). Tidak memungkinkan untuk kedepannya pesaing-pesaing baru yang datang ini menggunakan politik uang untuk mendobrak pertahanan yang sudah ada.

Penelitian terdahulu mengenai patronase dan praktik politik uang telah banyak dilakukan oleh para akademisi dan penulis sebelumnya dan sebagian besar mencoba untuk mencari apa yang menjadi faktor penyebab dan alasan terjadinya politik uang dikalangan masyarakat. Menurut studi yang dilakukan oleh Fitriani, dkk (2019), Lampus, dkk (2022) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa adanya politik uang dalam masyarakat disebabkan oleh pengaruh terbatasnya ekonomi, kurangnya mutu pendidikan, serta kurangnya pengawasan. Dampak dari praktik politik uang ini dapat merusak kerangka kerja demokrasi dan menimbulkan masalah baru dalam masyarakat hingga di tingkat pemerintahan, menyebabkan konsekuensi negatif yang bersifat jangka panjang. Sedangkan studi yang dilakukan oleh Hendika (2022) menemukan bahwa Masyarakat menerima politik uang karena masih minimnya pengetahuan mereka tentang politik uang yang menyebabkan memilih atas dasar upaya dari pihak calon yang telah memengaruhi warga dengan politik uang.

Berdasarkan kajian-kajian para sarjana terdahulu, belum banyak yang melakukan kajian secara detail terkait politik uang dari sisi beberapa variasi yaitu pemberian-pemberian pribadi

(individual gifts), pelayanan dan aktivitas (services dan activities), pembelian suara (vote buying), dan barang-barang kelompok (club good). Studi ini ingin memperkaya kajian yang ada, dengan memfokuskan studi pada praktik dan pengaruh politik uang dalam pemilu legislatif 2024. Studi ini dilakukan di Kota Tangerang kecamatan Karang Tengah kelurahan Karang Mulya. Terdapat beberapa alasan pemilihan Kota Tangerang sebagai tempat penelitian. Pertama, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang tahun 2023, Kota Tangerang menempati peringkat kedua dalam jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten. Dimana setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, dimana garis kemiskinan di kota Tangerang dalam 3 tahun terakhir selalu mengalami jumlah yang tinggi pada tahun 2021 garis kemiskinan meraih jumlah 134,34 ribu, kemudian secara bertahap meningkat hingga 2023 kemarin menjadi 137,70 ribu.

Melalui studi kasus di kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang, Tengah Kota Tangerang studi ini fokus pada dua ranah kajian. Pertama, penulis mengkaji tentang masalah praktik politik uang yang Dalam konteks politik uang, penulis akan membatasinya melalui menerapkan teori patronase politik. Politik uang diartikan sebagai mencakup berbagai transaksi berupa uang, jasa, atau barang dari calon kandidat untuk pemilih, terutama yang terjadi sebelum ataupun menjelang pemilihan umum. Di Kelurahan Karang Mulya,

bentuk-bentuk dari politik uang melibatkan pemberian hadiah pribadi (individual gifts), pembelian suara (vote buying), pelayanan dan aktivitas (services and activities), barang-barang kelompok (club goods), serta proyek-proyek yang diarahkan pada kepentingan tertentu (pork barrel projects). Kedua, apakah bentuk variasi dari politik uang diatas tadi mempengaruhi pilihan Masyarakat, Untuk menganalisanya, penulis menggunakan teori pilihan rasional (rational choice).

Studi ini penting untuk menyumbangkan studi mengenai praktik politik uang dan pengaruhnya terhadap masyarakat, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi rentan seperti di Kelurahan Karang Mulya, sangat penting dilakukan karena menawarkan kontribusi signifikan baik secara teori maupun praktis. Secara teoretis, studi ini memperkaya pemahaman tentang dinamika pengambilan keputusan pemilih dalam konteks pemilihan demokratis, dengan menguji teori Rational Choice yang seharusnya mendorong pemilih untuk bertindak berdasarkan pertimbangan rasional, seperti evaluasi rekam jejak dan kapabilitas kandidat. Namun, temuan menunjukkan bahwa ketika politik uang hadir, keputusan pemilih lebih didorong oleh motivasi pragmatis—mencari manfaat jangka pendek daripada kualitas kepemimpinan jangka panjang. Secara praktis, penelitian ini mengungkap tantangan serius yang dihadapi demokrasi lokal dalam hal integritas pemilihan, di mana politik uang memperlemah pilihan rasional dan menciptakan

ketergantungan antara pemilih dan caleg melalui praktik patronase. Oleh karena itu, studi ini menekankan pentingnya penguatan regulasi dan pendidikan politik untuk meminimalkan praktik ini dan mendorong masyarakat agar memilih berdasarkan visi dan misi kandidat, bukan pemberian materi, guna mewujudkan demokrasi yang lebih sehat dan adil.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik politik patronase terjadi di Kelurahan Karang Mulya pada Pemilihan Legislatif 2024 di Kota Tangerang?
2. Bagaimana politik patronase mempengaruhi pilihan masyarakat pada Pemilihan Legislatif 2024 di Kota Tangerang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Politik Patronase Terjadi Di Kelurahan Karang Mulya Pada Pemilihan Legislatif Di Kota Tangerang 2024.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Politik Patronase Mempengaruhi Pilihan Masyarakat Pada Pemilihan Legislatif 2024 Di Kota Tangerang.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Diharapkan ikut berkontribusi dalam pengembangan dari keilmuan politik khususnya memberikan sebuah pengetahuan tentang praktik politik patronase yang ada dan terdapat di masyarakat.

2. Diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat yaitu makna uang yang diberikan para kandidat tidak bisa digeneralkan menjadi satu definisi mutlak.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Pada rangka menyelesaikan penelitian ini, peneliti merujuk pada beragam studi literatur yang akan menjadi panduan dalam menyusun tinjauan pustaka. Dalam konteks ini, tinjauan pustaka bertujuan menjadi perbandingan serta untuk memahami fungsi dari penelitian yang saat ini dilaksanakan. Beberapa literatur yang terpilih oleh peneliti kemudian digunakan sebagai instrumen pembanding dalam penyusunan penelitian ini. Tinjauan pustaka yang diakses oleh peneliti dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni literatur penelitian skripsi dan artikel atau jurnal ilmiah.

### **1. Politik Uang**

Kajian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fitriani, dkk (2020) yang meneliti tentang Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, yaitu memfokuskan pada tujuan utama untuk memahami fenomena politik uang yang terdapat di masyarakat. Penulis memberikan penjelasan bahwa Fenomena politik uang sulit dihentikan dan bahkan telah menjadi suatu kebiasaan atau tradisi yang diterapkan dari sejumlah calon ataupun peserta politik pada masyarakat

menjelang pemilihan umum untuk mendapatkan sebuah dukungan dan memenangkan suara terbanyak. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan politik uang meliputi terbatasnya ekonomi masyarakat, kurangnya kualitas pendidikan masyarakat, dan lemahnya pengawasan yang dilakukan. Proses politik uang ini terjadi baik secara langsung dari calon atau peserta politik tertentu maupun melalui dari perantara orang lain pada pendistribusian dana politik tersebut. Dampak adanya praktik politik uang meliputi kerusakan pada struktur demokrasi serta potensi munculnya masalah-masalah baru pada masyarakat hingga pemerintah.

Kajian kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah, (2020) yang membahas *fenomena politik uang dalam pilkada*, penelitian ini dengan fokus pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan menyoroti beberapa poin dan permasalahan penting terkait politik uang dalam konteks pemilu membahas peralihan dari pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke pemilihan langsung (Pilkada Langsung). Transisi ini bertujuan untuk mengurangi politik uang, karena para kandidat tidak lagi mampu membeli suara massa. Namun, meskipun terjadi masa transisi, politik uang masih tetap ada, dan sering kali memerlukan biaya yang besar karena keterlibatan aktif pemilih dalam suatu daerah pemilihan

tertentu. contoh politik uang yang terjadi di berbagai pemilu Pilkada. Hal ini, pada gilirannya, mempengaruhi integritas pemilu dan pemerintahan daerah secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala keuangan yang dihadapi para kandidat telah menyebabkan berbagai bentuk pendanaan politik, termasuk pengeluaran tidak resmi yang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya biaya pemilu dapat mendorong para aktor politik untuk mencari dukungan finansial dari tokoh-tokoh bisnis dan sumber eksternal, yang dapat berdampak pada lanskap politik.

Kajian ketiga penelitian yang dilakukan oleh Febrianto, dkk (2020) Penelitian ini menfokuskan pada analisis penanganan politik uang yang dilihat melalui perspektif undang-undang pemilihan kepala daerah (Pilkada), suatu isu yang telah menarik perhatian masyarakat. Politik uang, sebagai praktik untuk memperoleh dukungan massal dan memengaruhi hasil pemilihan, menjadi fokus kajian. Metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan ketentuan serta sanksi terkait politik uang dalam Pilkada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan mengenai dilarangnya politik uang dalam Pilkada ini telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Sanksi yang diterapkan kepada calon peserta Pilkada yang terlibat pada praktik politik uang melibatkan

hukuman penjara minimal yaitu 36 bulan hingga maksimal yaitu 72 bulan, disertai dengan denda minimal Rp. 200.000.000 hingga maksimal Rp. 1.000.000.000. Keberlanjutan permasalahan politik uang dalam Pilkada dan dampaknya terhadap proses demokrasi ditekankan dalam penelitian ini. Penting untuk dicatat bahwa hukum secara tegas melarang politik uang dalam Pilkada dan menetapkan sanksi yang signifikan bagi calon peserta yang melanggar ketentuan tersebut. Dengan peraturan dan sanksi yang jelas, artikel ini mendukung pelaksanaan aturan serta menjelaskan perlunya evaluasi terus-menerus terhadap regulasi terkait Pilkada untuk memastikan kejelasan dan mencegah interpretasi ganda terhadap aturan tersebut.

Kajian keempat penelitian yang dilakukan oleh Nail, (2019) yang membahas kualifikasi politik uang dan strategi hukum dan kultural atas pencegahan politik uang dalam pemilihan umum penelitian ini memfokuskan pada Peraturan mengenai penyelenggaraan pemilihan umum telah diatur melalui perundang-undangan. Namun, seringkali dalam pelaksanaan pemilihan umum, peserta pemilu terlibat dalam praktik politik uang untuk meraih kemenangan. Penting untuk merumuskan praktik politik uang dengan baik agar sesuai dengan hakikatnya. Selain mekanisme hukum yang sudah ada, terdapat berbagai metode lain yang dapat digunakan untuk mencegah praktik politik uang. Hasil dari

penelitian ini ialah bahwa tindakan politik uang (money politic) tidak hanya terbatas pada pemberian uang atau barang dari peserta pemilu kepada pemilih, melainkan harus memenuhi unsur-unsur politik uang. Dalam konteks kampanye umum terbuka, memberikan uang transportasi, uang lelah, dan uang makan kepada pemilih bukanlah termasuk dalam kategori politik uang (money politic). Tindakan tersebut sebenarnya merupakan konversi atau kegiatan pilihan yang dialihkan ke acara kampanye terbuka.

## **2. Partisipasi Politik**

Kajian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah, dkk (2021) membahas tentang Partisipasi Politik dan Pemilih Muda : Konteks Pilgub Jateng 2018 dan pIlkada 2019 di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini Berfokus pada pemahaman tentang partisipasi politik pemilih muda dalam konteks Pilgub Jateng 2018 dan Pilkada 2019 di Kabupaten Temanggung, bahwa pemilih muda tidak selalu pasif, sebagaimana diasumsikan dalam beberapa diskusi akademik. Pemilih muda, meskipun dianggap oleh sebagian publik sebagai apolitik dan hanya peduli pada hal-hal ekonomis, sebenarnya mengamati aktif politik praktis untuk membentuk pendapat dan sikap mereka. Terdapat faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik pemilih muda, seperti penilaian mereka terhadap politik, hoaks, pemilu dan politik uang. Hasil kajian menghasilkan bahwa pemilih muda

memiliki sikap skeptis dalam pemilu, politik, dan kandidat. Meskipun demikian, mereka tetap anti-hoaks dan sebagian besar terbuka terhadap berbagai program pendidikan politik. Artikel ini juga menyoroti adanya ketidakpuasan atau keraguan terhadap kualitas kinerja politisi, yang dapat menjadi faktor penghambat partisipasi politik aktif pemilih muda. Selain dari faktor-faktor internal, penulis juga menjelaskan tentang peran penting agen sosialisasi eksternal, seperti tokoh agama dan media sosial, dalam mempengaruhi sikap dan perilaku politik pemilih muda. Faktor-faktor yang memengaruhi sikap dan perilaku politik mereka, serta peran agen sosialisasi eksternal dalam membentuk pandangan politik pemilih muda. Penelitian ini dapat menjadi acuan penting bagi penyelenggara pemilu, partai politik, dan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam melibatkan pemilih muda dalam proses demokratisasi. Kajian kedua penelitian yang dilakukan oleh Nasution, dkk (2020) yaitu membahas Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kota Medan Terhadap Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020 penelitian ini menggunakan Metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui mengumpulkan data skunder, seperti dokumen, jurnal, dan surat kabar, serta data primer melalui wawancara mendalam dengan informan yang berasal dari lembaga penyelenggara Pemilu, organisasi politik, dan organisasi sosial. Analisis

data dilakukan menggunakan teknik Miles dan Huberman, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini memfokuskan tujuan pada menjelaskan bahwa demokrasi merupakan konsep penting yang telah mengubah struktur politik di dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Kota Medan didominasi oleh partisipasi dalam memberikan suara dan apati politik. Kondisi ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, peran partai politik dalam rekrutmen politik, dan pemutakhiran data pemilih. Penelitian ini membuktikan rendahnya partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah di Kota Medan, dan faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap pemerintah dan peran partai politik memengaruhi partisipasi tersebut. Hasil penelitian ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi politik di Kota Medan.

Kajian ketiga penelitian yang dilakukan oleh Nasuha & Cholik (2019) tentang “Pengaruh Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada (Studi Pada Pilkada Bupati di Kabupaten Kuningan”. Fokus Penelitian ini ialah agar dapat mengetahui seberapa besar dari pengaruh pendidikan politik masyarakat Kabupaten Kuningan yang mempengaruhi partisipasi politik dalam Pilkada bupati di Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan metode

kuantitatif dengan pendekatan metode survei eksplanatoris, bahwa dapat mengetahui hubungan dan pengaruh dari pendidikan politik dalam partisipasi politik masyarakat di pilkada. Penulis menyampaikan mengenai dampak pendidikan politik dalam partisipasi politik menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan yang diperoleh masyarakat Kabupaten Kuningan melalui pendidikan politik memberikan kontribusi yang minim terhadap keterlibatan dalam proses pemilihan kepala daerah. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dianggap sebagai tanda kesadaran akan hak dan tanggung jawab dalam pembangunan daerah mereka. Persentase hasil penelitian menghasilkan bahwa pendidikan politik memiliki dampak positif pada partisipasi politik masyarakat di pemilihan kepala daerah, meskipun demikian, temuan tersebut juga menyoroiti bahwa terdapat faktor-faktor lain yang ikut memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah.

#### **F. Teori Penelitian**

Didalam melakukan Analisa diperlukan kerangka teori yang digunakan penulis agar dapat memahami fokus penelitian. Kerangka teori dalam penelitian ini terbagi menjadi dua pembahasan yaitu : Definisi Konseptual dan Landasan Teori. Untuk memahami fokus kajian penelitian ini peneliti menggunakan 2 teori yaitu Patronase Politik dan Rational

Choice.

## 1. Definisi Konseptual

### a. Politik Uang

Istilah politik uang, menunjukkan pada praktik penggunaan uang ataupun barang dalam upaya mengintervensi keputusan tertentu. pada konteks ini, uang menjadi alat untuk memengaruhi, mengarahkan, dan intervensi seseorang yaitu pada pengambilan keputusan. Dengan kata lain, money politic mencakup usaha menyuap pemilih dengan menawarkan uang atau jasa sebagai iming-iming agar mereka memberikan dukungan suara kepada seseorang yang memberikan suap tersebut. Praktik politik uang ini dapat dijelaskan juga sebagai tindakan memberikan suara melalui imbalan materi, atau dapat dianggap sebagai transaksi jual beli suara dalam dinamika politik dan perebutan kekuasaan. Uang disalurkan baik secara pribadi maupun oleh partai politik untuk memengaruhi perilaku pemilih. Menurut Aspinal, politik uang seperti ini menciptakan fenomena klientelisme dan patronase. Klientelisme merujuk pada bentuk pertukaran antara individu yang ditandai dengan kewajiban yang tidak seimbang dan hubungan kekuasaan di antara mereka. Selain itu, terdapat ciri acara sponsor yang memberikan pelanggan akses ke fasilitas tertentu, membentuk pola hubungan pertukaran yang saling menguntungkan (Huda, dkk 2022).

b. Vote Buying

Menurut Aspinall (2015: 24) Pembelian suara, yang dikenal sebagai vote buying, merujuk pada praktik pembayaran uang tunai atau pemberian barang dari kandidat untuk pemilih secara terencana beberapa hari sebelum adanya pemilihan, dengan harapan tersirat bahwa para penerima ini akan memberikan dukungan suara mereka kepada si pemberi. Di Indonesia, praktik semacam ini sering disebut 'serangan fajar,' yang mengacu pada pembayaran yang kadang-kadang terjadi pada waktu subuh menjelang hari pemungutan suara, meskipun sebenarnya sering dilakukan beberapa hari sebelumnya. Seperti yang dibahas dari beberapa bagian buku ini, kandidat-kandidat melaksanakan praktik ini melalui cara yang terorganisir, melibatkan tim besar untuk mengidentifikasi pemilih dan mendistribusikan uang kepada mereka. Salah satu aspek menarik dan kontroversial adalah adanya suatu kecenderungan struktur broker untuk menyembunyikan dana dan usaha yang dilakukan oleh kandidat untuk mencegahnya. Upaya lain melibatkan penentuan target penerima, di mana kandidat memilih secara selektif target, baik mereka yang setia kepada partai atau pemilih yang belum berkomitmen.

c. Club Good

Menurut Aspinall (2015: 24) Club good adalah taktik patronase yang lebih diarahkan pada keuntungan bersama

dari kelompok sosial tersebut daripada keuntungan dari individual. Mayoritas club good di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni sumbangan kepada asosiasi komunitas serta sumbangan untuk komunitas yang berada di berbagai lingkungan, seperti pedesaan, perkotaan, atau lingkungan lainnya. Seperti sedang diuraikan dalam beberapa bab buku ini, Indonesia memiliki beragam institusi formal dan informal di tingkat dasar, termasuk kelompok keagamaan, asosiasi pemuda, klub olahraga, kelompok wanita, dan koperasi petani. Oleh sebab itu, kedatangan kandidat ke komunitas-komunitas semacam ini yang dibarengi dengan pemberian barang ataupun manfaat lainnya menjadi sesuatu yang umum. Barang-barang yang biasanya diberikan mencakup peralatan dapur, perlengkapan ibadah,, alat musik, peralatan olahraga, sound system, tenda, peralatan pertanian, dan lain sebagainya. Kandidat juga sering membagikan sumbangan untuk pembangunan atau untuk renovasi infrastruktur yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah tertentu, seperti rumah ibadah, jembatan, jalan, atau kanal drainase, serta penyediaan sumur air untuk desa, penerangan jalan, dan lain sebagainya.

Walaupun sedikit calon yang beranggapan praktik memberikan keuntungan kelompok sebagai bagian dari 'politik uang,' meyakini bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam usaha

menyediakan keuntungan kelompok dan memastikan bahwa para penerima merasakan manfaat ketika memberikan suara, mengenai cara dan alasan calon memilih strategi memberikan suara yang ditujukan kepada individu dan keuntungan kelompok. Para calon memandang memberikan keuntungan kelompok sebagai tindakan yang sah dan bermoral, meskipun mereka menyadari bahwa strategi ini kurang dapat diandalkan kecuali mendapatkan dukungan kuat dari tokoh masyarakat dalam proses distribusinya.

d. Pork Barrel

Pork barrel merujuk pada inisiatif pemerintah yang dikhususkan untuk suatu daerah geografis tertentu. Ciri khas dari pork barrel adalah bahwa proyek ini bersifat umum dan didanai melalui dana publik dengan harapan mendapatkan dukungan politik dari masyarakat untuk calon tertentu. Seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut, banyak calon politik yang menawarkan "program" dan "proyek" yang didanai oleh dana publik kepada konstituennya, seringkali berupa proyek infrastruktur kecil atau manfaat bagi kelompok komunitas tertentu, terutama yang dapat meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, calon petahana sering berusaha menunjukkan pencapaian mereka dalam menyediakan "program" tersebut selama periode kampanye.

Di berbagai daerah, setiap anggota DPRD kabupaten/kota maupun provinsi menerima alokasi dana

khusus sebagai tujuan ini, sering disebut sebagai dana aspirasi. Ide di baliknya adalah untuk mendukung legislator dalam menanggapi dan memenuhi "aspirasi" konstituen mereka melalui penyediaan proyek pemerintah. Jenis dana yang sama juga ada di banyak negara lain, dinamai sebagai dana pembangunan konstituen. Kami menyebut proyek-proyek ini sebagai bentuk patronase sebab terdapat unsur kontingensi di dalamnya. Caleg umumnya membagikan hasilnya ini melalui harapan dari mereka akan mendukung caleg dalam pemilihan kedepannya. Sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut, kandidat sering menggunakan proyek-proyek ini untuk membangun basis dukungan atau klien, bahkan seringkali melibatkan penerima manfaat pork barrel sebagai anggota tim kampanye mereka. (Aspinall & Sukjamati, 2015 : 28).

e. Partisipasi Politik

Partisipasi politik mengarah dalam tindakan dari individu ataupun kelompok orang yang secara aktif ikut serta dalam kehidupan politiknya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemilihan pemimpin negara serta juga pengaruh terhadap kebijakan pemerintah, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kegiatan ini terdiri hal-hal seperti membagikan suara dalam pemilihan umum, mendatangi pertemuan umum, menjalin hubungan ataupun melakukan negosiasi antar pejabat pemerintah maupun anggota dari

parlemen, sebagai anggota partai politik, atau terlibat dalam gerakan sosial melalui tindakan langsung, dan sebagainya. Herbert McClosky, seorang pakar dalam isu partisipasi, mengemukakan bahwa partisipasi politik mengikutsertakan aktivitas sukarelawan dari anggota masyarakat yang terlibat dalam pemilihan pemimpin ini, baik melalui langsung maupun tidak langsung, serta berkontribusi dalam pembentukan kebijakan umum. (Budiarjo, 2008 : 367).

## **G. Kerangka Teori**

### **1. Patronase Politik**

Patronase adalah sistem politik yang bergantung pada struktur hierarkis, di mana terdapat keterkaitan pribadi antara individu dengan perbedaan status, khususnya antara pemimpin (Patron) dan pengikutnya (klien). Dalam hubungan ini, dari pihak-pihak memberikan sesuatu yang memiliki nilai. Klien menyediakan dukungan politik dan rasa hormat pada patron, yang tercermin dalam bermacam cara simbolis seperti sikap patuh, bahasa sopan, pemberian imbalan, dan lainnya. Sementara itu, patron memberikan manfaat, pekerjaan, serta perlindungan kepada kliennya. Asal mula "patron" berasal dari bahasa Latin "pater," yang artinya "Bapak." Secara evolusioner, "pater" berkembang menjadi "patris" dan "patronis," merujuk kepada bangsawan ataupun "patricius," yang diakui sebagai pelindung sejumlah dari rakyat jelata yang telah berstatus

sebagai pengikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang patron memiliki kapasitas untuk memberikan bantuan kepada kliennya. Pada intinya, hubungan patronase merupakan ikatan emosional personal antara individu yang memberikan pelayanan dan individu yang menerima pelayanan, yang dikenal sebagai patron dan klien (Philipus & Aini, 2016 : 41).

Dalam situasi ini, pola hubungan antara patron dan klien memiliki sifat individual serta melibatkan pertukaran sumber daya antara keduanya. Patron mempunyai sumber daya seperti kekuasaan, posisi, kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan terkadang sumber daya materi. Di sisi lain, klien memberikan kontribusi berupa tenaga, dukungan, dan loyalitas. Penting untuk dicatat bahwa dalam dinamika hubungan ini, yang umumnya mendapatkan manfaat lebih besar adalah patron karena mereka mempunyai sumber daya yang lebih banyak dan lebih kuat daripada yaitu klien. Klientelisme politik terjadi ketika yaitu pemilih, aktivis kampanye, atau pihak lainnya memberikan dukungan yaitu elektoral kepada politisi dengan imbalan bantuan atau manfaat materi. Para politisi menggunakan pendekatan klientalistik untuk meraih sempurna nya pemilu dengan memberikan bantuan, barang, atau uang tunai kepada pemilih, baik secara individu maupun dalam kelompok, dengan harapan bahwa pemilih

akan memberikan dukungan dengan membagikan suara untuk politisi tersebut (Aspinall & Berenschot, 2019 : 2).

Menurut Edward Aspinall, dalam lebih dari sepuluh tahun terakhir, para analis dan pengambil keputusan sudah mulai mengakui kalau praktik klientelisme terlalu umum serta lebih dalam akarnya dibanding yang awalnya dianggap. Pertukaran keuntungan dan juga manfaat materi dalam setiap tahap siklus pemilihan umum telah menyebar secara meluas, hingga pada titik di mana masyarakat dapat menganggap demokrasi di Indonesia sebagai bentuk demokrasi yang komoditas. Praktik-praktik klientalistik yang persuasif telah menciptakan istilah "demokrasi wani piro," yang merupakan ungkapan sinis terhadap praktik demokrasi di Indonesia, di mana dalam bahasa Jawa, "wani piro?" mengartikan "berapa bayar berapa?" (Aspinall & Berenschot, 2019 : 3-10).

## **2. Teori Rational Choice**

Teori Rational Choice, yang dicetuskan oleh James S. Coleman, menggambarkan bahwa tindakan individu didasarkan pada pertimbangan rasional yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipilih. Coleman, seorang sosiolog terkemuka pada paruh kedua abad kedua puluh, menyoroti bagaimana setiap individu memiliki tujuan yang ingin dicapai dan memilih tindakan berdasarkan pertimbangan

nilai. Dalam konteks ini, teori ini menunjukkan bahwa perilaku manusia dapat dipahami melalui analisis rasional atas pilihan yang mereka buat, serta bagaimana faktor nilai memengaruhi proses pengambilan keputusan mereka (Sastrawati, 2019 : 188).

Teori Pilihan Rasional menurut James Coleman menyoroti kalau usaha individu mempunyai tujuan yang dipilih melalui nilai ataupun preferensi. Coleman berpendapat kalau konsep ini perlu pemahaman akurat tentang aktor rasional, yang bermula dari ilmu ekonomi, di mana aktor melalui tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau pun keinginan mereka. Pada teori ini, aktor dan sumber daya memiliki peran kunci. Sumber daya mencakup semua potensi yang ada atau dimiliki, baik itu berupa sumber daya alam atau sumber daya manusia. Aktor, sebagai individu yang melakukan tindakan, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya dengan efektif. Coleman juga membahas interaksi antara aktor dan sumber daya hingga tingkat sistem sosial, dengan dasar minimal untuk sistem sosial terletak pada tindakan dua aktor yang memiliki sumber daya yang menarik perhatian satu sama lain (Sastrawati, 2019 : 189).

Teori Pilihan Rasional yang diungkapkan oleh Coleman menekankan kalau individu terlibat dalam suatu tindakan yang mengambil keuntungan sumber daya yang

mereka miliki untuk meraih suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain, setiap tindakan individu memiliki tujuan atau niat khusus di dalamnya. Terdapat dua elemen utama pada teori Pilihan Rasional Coleman, yakni aktor dan sumber daya. Sumber daya yang dimaksud mencakup barang atau objek yang digunakan oleh aktor untuk mendukung tindakan mereka dalam mencapai tujuan. Pada beberapa kasus, sumber daya ini mungkin belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemiliknya. Kendati begitu, tindakan rasional seseorang terkadang dapat dianggap tidak rasional oleh orang lain. Penilaian mengenai rasionalitas suatu tindakan tidak dapat diukur dari sudut pandang orang lain, melainkan harus dievaluasi dari perspektif individu yang melakukan tindakan tersebut (Coleman, 2011:17-18).

Teori pilihan rasional menitikberatkan kepada peran aktor ataupun pelaku. Aktor dianggap yaitu individu yang memiliki tujuan ataupun maksud. Ini berarti bahwa aktor memiliki arah tertentu, dan perlakuannya diarahkan untuk meraih tujuan tersebut. Selain itu, aktor dianggap memiliki kemampuan untuk membuat pilihan. Teori pilihan rasional tidak memperhatikan substansi dari pilihan yang dibuat oleh aktor. Namun, saat ini adalah fokus pada kenyataan bahwasanya tindakan dilakukan guna meraih tujuan sesuai dengan keinginan atau pilihan yang dimiliki oleh aktor tersebut. Dalam kasus ini aktor atau pelaku ialah

para calon legislatif Dimana calon legislatif sebagai actor mempunyai tujuan dan maksud dengan Tindakan atau Upaya untuk mencapai tujuan itu melakukan politik uang untuk Masyarakat.

## **H. Metode Penelitian**

Peneliti menetapkan metode penelitian kualitatif menjadi suatu metode yang dipilih dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif mencakup jenis penelitian, pendekatan dan sumber data, lokasi penelitian, teknik pemilihan informan, teknik dan waktu pemilihan data beserta teknik analisis data.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Untuk menyelesaikan penelitian ini, menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini tergolong yaitu berupa penelitian lapangan yang mengadopsi metode penelitian kualitatif serta menerapkan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif adalah rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mencari dan memahami arti yang diinterpretasikan oleh individu atau kelompok terkait dengan isu sosial atau kemanusiaan tertentu. Tahapan dalam penelitian kualitatif melibatkan proses esensial, seperti merumuskan pertanyaan, mengimplementasikan prosedur, mengumpulkan suatu data spesifik melalui partisipan, menganalisis data secara induktif dari tema utama ke tema umum, serta mendefinisikan signifikansi data. Laporan akhir penelitian

inipun mempunyai suatu struktur ataupun kerangka cukup fleksibel. Semua yang berkaitan dalam penelitian ini diharapkan dapat diterapkan untuk pendekatan penelitian yang bersifat induktif, fokus pada makna individual, dan mampu mengartikan kompleksitas suatu permasalahan. (Creswell, 2008).

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti akan mengadopsi pendekatan studi kasus dalam penyelidikan ini. Menurut Stake (1995), yang dikutip dalam Creswell, (2017), studi kasus diartikan sebagai pengkajian menyeluruh yang dilakukan oleh peneliti terhadap program, proses, peristiwa, aktivitas atau sekelompok orang sebagai bagian dari strategi penelitian ini. Dalam penelitian ini yaitu difokuskan dengan mendapatkan data secara faktual yang terjadi dilapangan seperti apa masyarakat miskin kota tangerang kelurahan karang mulya menanggapi politik uang dalam pemilihan legislatif 2024, apakah uang dapat mempengaruhi pilihan mereka atau tidak (Creswell, 2008 : 22).

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang paling utama didalam penelitian kualitatif ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

- a. Data primer sendiri ialah data digunakan dari wawancara langsung oleh wawancara dengan

masyarakat di Kelurahan Karang Mulya untuk mendapatkan pandangan langsung dan pengalaman mereka terkait praktik politik patronase dan pengaruhnya pada Pemilihan Legislatif 2024 selanjutnya wawancara dengan pejabat dan aktor politik, dan yang terakhir ialah wawancara dengan pejabat pemerintah setempat, calon pemilihan, dan aktor politik terkait untuk memahami sudut pandang mereka tentang praktik politik uang.

- b. Data Sekunder didapatkan dari jurnal, buku, serta artikel ilmiah dan data terkait analisi dokumen terkait Pemilihan Legislatif 2024 di Kota Tangerang, seperti berita-berita, laporan media massa, riset terkait, dan dokumen-dokumen resmi terkait pemilihan tersebut. Data sekunder ini menjadi bentuk data tambahan dalam menjawab rumusan masalah diatas.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Teknik pengumpulan data wawancara digunakan menjadi metode pengumpulan data saat peneliti bermaksud untuk membuat penelitian pendahuluan guna menganalisis permasalahan yang perlu diselidiki, serta saat peneliti akan memperoleh pemahaman yang lebih detail dari responden dengan jumlah yang terbatas. Teknik pengumpulan data nya bersandar dalam laporan

diri atau disebut self-report, atau setidaknya dalam pengetahuan serta keyakinan dari pribadi responden (Sugiyono, 2013 : 137-138).

Dalam melakukan wawancara, penelitian ini menggunakan Penelitian inipun yaitu memakai metode wawancara semi-terstruktur, di mana yaitu peneliti ini menyusun instrumen berupa pertanyaan penelitian tertulis, namun tidak menyediakan opsi jawaban seperti pada wawancara terstruktur. Dalam wawancara semi-terstruktur, pendekatan ini menggabungkan unsur wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, dengan bertujuan untuk merumuskan permasalahan secara terbuka, meminta pendapat dari pihak yang diwawancarai (Sugiyono, 2013 : 140-141).

Teknik pemilihan narasumber dalam penelitian ini ialah snowball sampling yaitu metode penentuan sampel yang dimulai dengan jumlah kecil dan secara bertahap meningkat. Seperti halnya bola salju yang terus bergulir dan membesar seiring waktu. Dalam proses pemilihan sampel, awalnya dipilih satu atau dua orang, namun karena data yang diperoleh dari dua orang tersebut dirasa belum mencakup secara lengkap, peneliti kemudian mencari individu lain yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dan dapat melengkapi informasi yang telah diberikan oleh dua orang

sebelumnya. Proses ini terus berlanjut, sehingga jumlah sampel terus bertambah.

Sasaran informasi pada penelitian ini antara lain wawancara Masyarakat, dan wawancara dengan pejabat pemerintah setempat, calon pemilihan, dan aktor politik terkait untuk memahami sudut pandang dan pengalaman mereka dalam konteks praktik politik uang. Nantinnnya data yang didapatkan dalam bentuk informasi yang akan dijadikan data.

b. Observasi non partisipasi

Observasi non partisipan ini ialah Apabila pengamat mengamati kelompok secara pasif dari jarak jauh tanpa ikut serta dalam kegiatan kelompok, maka disebut observasi non partisipan. Di sini dia tidak berusaha mempengaruhi mereka atau ikut serta dalam kegiatan kelompok. Peneliti secara aktif berpartisipasi dalam beberapa aktivitas biasa dan mengamati secara pasif dari jarak jauh pada aktivitas lain. Observasi ini digunakan untuk peneliti mendapatkan data terkait kondisi lingkungan dan keadaan warga di kelurahan karang Mulya kota Tangerang. Teknik ini digunakan untuk menjawab faktor penyebab terpengaruh atau tidaknya politik uang pada pilkada 2020 (Coudhury, 2019).

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai jenis dokumen, termasuk dokumen tertulis, gambar, dan elektronik. Dokumen yang telah dikumpulkan kemudian dijelaskan secara analitis, dibandingkan, dan disintesis untuk membentuk satu hasil penelitian yang terorganisir, lengkap, dan holistik. Oleh karena itu, teknik dokumentasi tidak hanya melibatkan pengumpulan dan penulisan kutipan-kutipan dari dokumen-dokumen, melainkan melibatkan pelaporan hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut (arief, 2023).

Dokumentasi dalam penelitian ini data terkait dokumen seperti berita dan laporan media, memberikan konteks historis dan mendukung temuan-temuan dari wawancara serta survei yang dapat mendukung penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan keseluruhan dokumen-dokumen tersebut untuk membantu menjawab dari rumusan diatas terkait praktek dan pengaruh politik uang terhadap Masyarakat miskin kota Tangerang dikelurahan karang Mulya.

#### 4. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016). analisis data yaitu dengan pengumpulan data berlangsung Analisis yang dilakukan dengan Langkah-langkah berikut :

##### a. Reduksi Data

Semakin lama peneliti turun lapangan, maka perlu diperhatikan dengan teliti jumlah data yang dimiliki akan banyak, kompleks dan rumit. Hal tersebut sangat butuh untuk dilakukannya reduksi data untuk dapat menganalisis data. Yang dimaksud mereduksi data ialah merangkum, memilah. dan memilih yang di butuhkan, dengan mengacu pada hal-hal penting. lalu ditemukan gambaran tema dan pola nya. Selanjutnya akan menghasilkan gambar yang lebih jelas dari data yang sudah direduksi, sehingga membuat peneliti mengasih suatu gambaran mengenai pengaruh politik uang pada Pemilihan Legislatif 2024 dikelurahan karang mulya.

##### b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu penelitian kualitatif, ini dibuat dengan berupa bentuk penjelasan singkat, bagan, lalu hubungan antara kategori dan sebagainya. Pada penelitian ini, peneliti akan mencoba menguraikan secara singkat mengenai praktik dan pengaruh politik uang bagi Masyarakat miskin dikelurahan karang

Mulya.

c. Penarikan Kesimpulan

Analisis data merupakan kesimpulan yang diambil dan verifikasi kesimpulan pada penelitian kualitatif yaitu berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan berbentuk deskriptif suatu gambaran objek. Dalam hal ini benenn akan menarik kesimpulan terkait parktik dan pengaruh politik uang terhadap Masyarakat miskin dikeluarahan karang Mulya pada pemilu legislatif 2024.

**I. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam sistematika yaitu penulisan skripsi mempermudah dalam memahami isi skripsi serta memberikan gambaran secara garis besar yang tercakup kedalam 5 (lima) bab, yakni:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini yaitu terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

**BAB II KERANGKA TEORI**

Dalam bab ini berisikan teori yang digunakan sebagai landasan analisis data secara mendalam tentang bagaimana Teori Patronase Politik dan Teori Rational Choice untuk menjadi acuan dalam memahami data penelitian serta jawaban penelitian. Di dalam Menyusun kerangka teori berdasar pada suatu hal yang menjadi objek penelitian.

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini berisikan gambaran terkait dengan objek penelitian yang dilakukan yaitu profil Kampung Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang.

### **BAB IV PRAKTIK POLITIK PATRONASE DI KELURAHAN KARANG MULYA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2024 DI KOTA TANGERANG**

Dalam bab ini berisikan bagaimana Politik Patronase Terjadi Di Kelurahan Karang Mulya Pada Pemilu legislatif 2024.

### **BAB V PENGARUH POLITIK PATRONASE TERHADAP PILIHAN MASYARAKAT PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2024 DI KELURAHAN KARANG MULYA KOTA TANGERANG**

Dalam bab ini berisikan pengaruh politik Mempengaruhi Pilihan Masyarakat Pada Pemilu Legislatif 2024 Di Kelurahan Karang Mulya Kota Tangerang

### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan yang terdapat dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan memuat saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

Berisikan rujukan atau referensi yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Patronase Politik

Politik uang secara luas diartikan sebagai praktik yang telah dilakukan sejak awal demokratisasi di Indonesia pada penghujung tahun 1990-an. Pada awal reformasi, politik uang atau praktik suap sangat melekat di kalangan lembaga legislatif, terutama saat pemilihan kepala daerah. Praktik politik uang merujuk pada distribusi uang atau memberikan uang tunai ataupun barang dari kandidat kepada pemilih pada saat pemilihan berlangsung. Pemberian politik uang seringkali disebut dengan istilah *patronase*, Shefter mendefinisikan *patronase* menjadi sebuah pembagian keuntungan yang dibagi antara politisi dalam upaya mendistribusikan sesuatu secara personal kepada pemilih hingga penggiat kampanye dengan tujuan mendapatkan dukungan politik (Shefter 1994:183, n.3). Sumber dana yang dikeluarkan dalam praktik ini berasal dari dana pribadi hingga dana publik. Meski demikian praktik *patronase* tidak sepenuhnya buruk, sebab dalam *programmatic goods* yaitu materi yang diterima oleh seseorang biasanya berfokus pada masyarakat miskin.

*Patronase* berkaitan erat dengan *klientelisme*, praktik *patronase* cenderung merujuk pada pemberian materi atau keuntungan yang didistribusikan oleh politisi kepada pendukung. Sedangkan *klientelisme* merujuk pada relasi antara

politisi dan pemilih. Namun tidak selalu praktik *patronase* didistribusikan dalam relasi yang benar-benar klientelistik. *Patronase* cenderung bergantung pada struktur hierarkis, di mana terdapat keterkaitan pribadi antara individu dengan perbedaan status, khususnya antara pemimpin (Patron) dan pengikutnya (klien). Dalam hubungan ini, dari pihak-pihak memberikan sesuatu yang memiliki nilai. Klien menyediakan dukungan politik dan rasa hormat pada patron, yang tercermin dalam bermacam cara simbolis seperti sikap patuh, bahasa sopan, pemberian imbalan, dan lainnya.

Sementara itu, patron memberikan manfaat, pekerjaan, serta perlindungan kepada kliennya. Asal mula "patron" berasal dari bahasa Latin "pater," yang artinya "Bapak." Secara evolusioner, "pater" berkembang menjadi "patris" dan "patronis," merujuk kepada bangsawan ataupun "patricius," yang diakui sebagai pelindung sejumlah dari rakyat jelata yang telah berstatus sebagai pengikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang patron memiliki kapasitas untuk memberikan bantuan kepada kliennya. Pada intinya, hubungan *patronase* merupakan ikatan emosional personal antara individu yang memberikan pelayanan dan individu yang menerima pelayanan, yang dikenal sebagai patron dan klien (Philipus & Aini, 2016 : 41).

Dalam situasi ini, pola hubungan antara patron dan klien memiliki sifat individual serta melibatkan pertukaran sumber

daya antara keduanya. Patron mempunyai sumber daya seperti kekuasaan, posisi, kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan terkadang sumber daya materi. Di sisi lain, klien memberikan kontribusi berupa tenaga, dukungan, dan loyalitas. Penting untuk dicatat bahwa dalam dinamika hubungan ini, yang umumnya mendapatkan manfaat lebih besar adalah patron karena mereka mempunyai sumber daya yang lebih banyak dan lebih kuat daripada yaitu klien. Klientelisme politik terjadi ketika yaitu pemilih, aktivis kampanye, atau pihak lainnya memberikan dukungan yaitu elektoral kepada politisi dengan imbalan bantuan atau manfaat materi. Para politisi menggunakan pendekatan klientalistik untuk meraih sempurna nya pemilu dengan memberikan bantuan, barang, atau uang tunai kepada pemilih, baik secara individu maupun dalam kelompok, dengan harapan bahwa pemilih akan memberikan dukungan dengan membagikan suara untuk politisi tersebut (Aspinall & Berenschot, 2019 : 2).

Menurut Edward Aspinall, dalam lebih dari sepuluh tahun terakhir, para analis dan pengambil keputusan sudah mulai mengakui jika praktik klientelisme terlalu umum serta lebih dalam akarnya dibanding yang awalnya dianggap. Pertukaran keuntungan dan juga manfaat materi dalam setiap tahap siklus pemilihan umum telah menyebar secara meluas, hingga pada titik di mana masyarakat dapat menganggap demokrasi di Indonesia sebagai bentuk demokrasi yang komoditas. Praktik-

praktik klientalistik yang persuasif telah menciptakan istilah "demokrasi wani piro," yang merupakan ungkapan sinis terhadap praktik demokrasi di Indonesia, di mana dalam bahasa Jawa, "wani piro?" mengartikan "berapa bayar berapa?" (Aspinall & Berenchot, 2019 : 3-10).

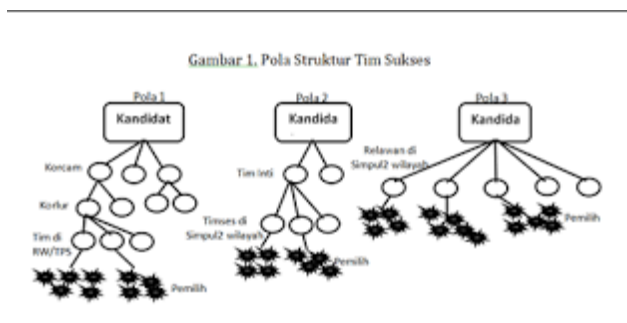
Dalam sebuah kompetisi politik, setiap entitas memerlukan strategi politik untuk memenangkan dukungan atau suara dalam pemilu dengan cara yang efisien dan efektif. Pada pemilu yang bebas rahasia, Schaffer dan Schedler (2008) mengatakan bahwa para kandidat dan calon biasanya tidak memiliki jaminan bahwa pemilih yang menerima bantuan pasti akan memberikan suaranya. Kondisi tersebut terjadi berdasarkan seberapa besar keuntungan yang mereka dapatkan, namun sebagian pemilih juga beranggapan bahwa memiliki rasa tanggung jawab memberikan suara pada pemberi. Dalam mengatasi hal tersebut, para kandidat akan melakukan praktik *patronase* dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai kultural. Praktik *patronase* ini biasanya dibalut dengan pemberian amal yang menggambarkan kemurahan hati sosial, dalam masa-masa ini para kandidat sedang berupaya membangun relasi klientalistik dengan para penerima keuntungan (Aspinall & Sukmajati, Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014, 2015).

Praktik *patronase* yang dilakukan oleh para kandidat juga tidak sepenuhnya mendapatkan respon baik, sehingga para kandidat

membutuhkan seseorang yang menjadi kepercayaan untuk menyampaikan *patronase* nya. Seseorang tersebut dikenal dengan sebutan *broker* yang akan menyampaikan, memonitor, dan mendesak para pemilih. Broker cenderung lebih memahami kondisi yang terjadi di lapangan. Broker akan bekerja dengan membentuk jaringan yang dapat mendukung kesuksesannya, antara lain:

### 1. Tim Sukses

Gambar Pola Struktur tim sukses



Sumber: (Mahsun, 2020)

Tim sukses memiliki struktur teritorial dan hierarki yang khas. Dalam tim sukses untuk kandidat DPR pusat, biasanya ada tim penasihat inti yang bekerja langsung di bawah kandidat. Di bawah tim penasihat ini, terdapat sejumlah koordinator kabupaten/kota, koordinator kecamatan (korcam), koordinator desa (kordes), dan akhirnya broker di akar rumput yang berfungsi sebagai koordinator lapangan (korlap) dan berinteraksi langsung dengan pemilih (Aspinal & Berenshot, 2020). Tim sukses yang terbentuk dari jaringan broker adalah

kelompok yang bekerja untuk memenangkan calon atau partai politik dalam pemilu. Jaringan broker terdiri dari individu atau kelompok yang memiliki koneksi kuat di masyarakat dan kemampuan untuk mempengaruhi pemilih. Mereka berperan sebagai perantara antara kandidat atau partai politik dan pemilih, sering kali menggunakan pendekatan personal dan langsung untuk meraih dukungan. Broker memiliki akses langsung dan hubungan dekat dengan pemilih. Tim sukses menggunakan berbagai strategi untuk memobilisasi pemilih. Ini bisa termasuk kampanye *door-to-door*, pertemuan komunitas, pemberian bantuan atau insentif, serta penggunaan media lokal.

Broker memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pemilih serta menyampaikan pesan kampanye yang sesuai. Efektivitas tim sukses yang berbasis jaringan broker sangat bergantung pada kepercayaan dan loyalitas. Broker harus memiliki reputasi baik dan dipercaya oleh komunitas mereka. Keberhasilan mereka dalam menggali dukungan juga sering kali diukur oleh kemampuan mereka untuk membangun dan mempertahankan hubungan personal dengan pemilih. Sebagian besar broker melangsungkan aksinya pada tingkat RT/RW untuk mencari daftar pemilih yang bersedia memberikan suaranya. Namun, di samping itu terdapat masalah timbal balik yang terjadi antara kandidat dan pemilih yang menjadi pengaruh dari relasi antara keduanya. Seringkali kandidat merasa broker melakukan penyelewengan dan

penggelapan modal kampanye, sehingga hal tersebut menjadikan kehadiran tim sukses tidak menjadi jaminan realisasi pemberian suara (Lihat dalam Aspinal 2014b; Stokes et al. 2013; Wang dan Kurzman 2008, 68-70).

Berkenaan dengan bentuk struktur atau jaringan tim sukses yang dibentuk oleh setiap kandidat, terdapat berbagai variasi yang tercipta. Namun, secara umum, struktur ini dapat dikategorikan dalam tiga pola utama (Mahsun, 2020):

- a. Struktur tim sukses yang bersifat hierarkis, menyerupai piramida, dengan koordinator di setiap tingkat wilayah, mulai dari koordinator kecamatan (korcam), koordinator kelurahan (korlur), hingga koordinator tingkat RW dan/atau TPS.

Sistem kerja dari struktur tim sukses dengan pola pertama ditandai oleh mekanisme koordinasi dan monitoring (monev) yang bersifat hirarkis. Dalam pola ini, setiap tingkat tim sukses diawasi oleh tim di tingkat yang lebih tinggi, mulai dari tim di tingkat RW/TPS yang melapor ke atas hingga ke korcam, yang pada akhirnya akan melaporkan hasil kerja tim-tim kepada kandidat. Pola ini jarang dipilih oleh kandidat karena struktur tim sukses yang panjang, seperti pola pertama, memerlukan biaya yang cukup besar dan cenderung dimanfaatkan oleh para broker. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang menjadi bagian dari tim sukses di tingkat RW atau TPS, terutama

jika anggota tim tidak direkrut berdasarkan hubungan kekerabatan atau pertemanan, melainkan dari orang-orang yang baru dikenal.

- b. Struktur tim sukses yang mengikuti pola hirarki dengan garis vertikal yang relatif singkat.

Struktur tim yang singkat memudahkan kandidat dan tim inti dalam mengontrol relawan atau tim sukses di tingkat dasar, sehingga risiko pengkhianatan oleh broker dapat lebih mudah diatasi. Selain itu, biaya operasional tim sukses juga cenderung lebih rendah. Pola struktur tim ini biasanya merekrut anggota dari orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, klientelisme, atau tokoh masyarakat seperti tokoh agama, lingkungan, organisasi, dan adat. Bagi kandidat petahana, sering kali mereka memilih tokoh-tokoh masyarakat yang telah lama menerima dukungan selama masa jabatannya sebelumnya, sehingga hubungan emosional dan loyalitas tokoh-tokoh tersebut sangat kuat. Tugas tim sukses di setiap simpul wilayah ini meliputi mempengaruhi saudara dan warga sekitar, menghubungkan kandidat dengan masyarakat untuk kegiatan kampanye, serta membantu mendistribusikan barang-barang patronase kepada pemilih.

- c. Struktur tim sukses yang terdiri dari simpul-simpul.

Banyak digunakan oleh kandidat yang memiliki anggaran kampanye terbatas, yang lebih memilih

melakukan kampanye dengan cara blusukan door to door ke rumah-rumah warga, daripada melakukan kampanye dialogis dengan kelompok kecil (20-50 orang) atau mengadakan acara khusus. Kandidat-kandidat ini umumnya mengaku tidak membentuk tim sukses formal, melainkan hanya tim keluarga atau relawan yang terdiri dari orang-orang dengan hubungan kekerabatan atau pertemanan.

Tim sukses juga turut membentuk mesin-mesin jaringan sosial dari broker merujuk pada konsep yang digunakan dalam analisis jaringan sosial (social network analysis) untuk memahami peran dan fungsi broker dalam jaringan tersebut. Broker dalam jaringan sosial adalah individu atau entitas yang bertindak sebagai perantara, penghubung, atau fasilitator antara dua atau lebih kelompok atau individu yang mungkin tidak memiliki hubungan langsung. Broker memainkan peran penting dalam menghubungkan kelompok atau komunitas yang berbeda dalam suatu jaringan sosial. Mereka memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya antara kelompok-kelompok yang mungkin tidak terhubung secara langsung.

Seringkali kandidat mencari dukungan dari para tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh pada suatu wilayah. Para tokoh masyarakat tersebut menjadi harapan bagi para kandidat untuk membantu memberikan jaringan

sosial yang dimilikinya untuk memberikan dukungan bagi kandidat. Tokoh masyarakat yang menjadi sasaran para kandidat yang memiliki jabatan formal maupun non-formal yang telah memiliki kepercayaan sosial (*social trust*) dari masyarakat sehingga mereka dapat memanfaatkan jaringan sosial tersebut. Sebagai bentuk imbalan, biasanya kandidat akan merekrut tokoh masyarakat ke dalam tim sukses meskipun tidak cocok dengan format yang ada. Kepercayaan yang diberikan kepada tokoh masyarakat berkaitan dengan distribusi pemberian *club goods*. Tokoh masyarakat menerima *club goods* dan mendorong jaringan sosialnya untuk memilih kandidat yang telah memberikan keuntungan secara kolektif, namun mereka belum mampu memastikan apakah jaringan sosial tersebut dapat memberikan suara dan dukungannya.

## 2. Partai politik

Peran broker adalah menjembatani komunikasi antara calon atau partai politik dengan pemilih, menggalang dukungan, dan memastikan pemilih mengikuti arahan mereka pada hari pemilu. Partai politik tidak memberikan kontribusi yang besar, namun partai politik dimanfaatkan sebagai jalan promosi dalam agenda kampanye jika kandidat berasal dari sebuah partai politik. Dengan demikian, struktur partai politik kemudian cenderung diasosiasikan dengan pengurus partai yang menjadi kandidat.

Dalam sistem pemilu yang sangat kompetitif, pengurus partai di tingkat akar rumput dibagi menjadi beberapa fraksi.

Melihat bagaimana bentuk pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 di Indonesia, praktik patronase menunjukkan beragam variasi yang digunakan untuk mencari dukungan. Praktik ini melibatkan pemberian bantuan atau keuntungan tertentu oleh kandidat kepada masyarakat sebagai imbalan atas dukungan politik. Kandidat seringkali memanfaatkan jaringan sosial yang sudah ada, termasuk tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh signifikan di komunitas mereka. Tokoh-tokoh ini, yang bisa jadi memiliki jabatan formal atau peran penting dalam asosiasi-asosiasi, agama, atau kelompok etnis, diarahkan untuk menggalang dukungan bagi kandidat.

Berikut merupakan bentuk-bentuk praktik patronase yang digunakan para kandidat untuk mengatasi masalah ketidakpastian dengan menjalankan patronase dengan cara-cara sesuai nilai-nilai kultural, antara lain:

a. Pembelian suara (*vote buying*)

Pembelian suara dimaknai sebagai distribusi pembayaran uang tunai maupun barang yang diberikan oleh kandidat untuk para pemilih secara sistematis. Pemberian ini dilaksanakan pada hari-hari mendekati pemilihan, dengan melakukan pembelian suara ini kandidat berharap para pemilih dapat memberikan dukungan dan suara mereka bagi kandidat. Di Indonesia sendiri, fenomena seperti ini sering

disebut sebagai *serangan fajar* yang direfleksikan sejak tahun revolusi dimana pembelian suara dilakukan ketika subuh di hari pemungutan suara. Pembelian suara ini dilakukan oleh para kandidat dengan cara yang sistematis, kandidat akan memobilisasi tim yang cukup besar untuk melakukan pendataan para pemilih yang akan memberikan suaranya. Praktik pembelian suara ini seringkali digagalkan oleh para broker sebab dana yang dikucurkan digunakan sebagai kepentingan pribadi. Menurut Aspinal, politik uang seperti ini menciptakan fenomena klientelisme dan patronase. Klientelisme merujuk pada bentuk pertukaran antara individu yang ditandai dengan kewajiban yang tidak seimbang dan hubungan kekuasaan di antara mereka. Selain itu, terdapat ciri acara sponsor yang memberikan pelanggan akses ke fasilitas tertentu, membentuk pola hubungan pertukaran yang saling menguntungkan (Huda, dkk 2022).

Oleh sebab itu, para kandidat akan melakukan berbagai upaya untuk mencegah hal tersebut terjadi (dalam Aspinal 2014b). Seperti yang dikatakan oleh Nichter (2008), para kandidat biasanya akan menyusun target penerima dana secara spesifik sehingga akan mengetahui penerima yang loyal. Menurut Aspinal (2015: 24) Pembelian suara, yang dikenal sebagai *vote buying*, merujuk pada praktik pembayaran uang tunai atau pemberian barang dari kandidat untuk pemilih secara terencana beberapa hari sebelum

adanya pemilihan, dengan harapan tersirat bahwa para penerima ini akan memberikan dukungan suara mereka kepada si pemberi. Di Indonesia, praktik semacam ini sering disebut 'serangan fajar,' yang mengacu pada pembayaran yang kadang-kadang terjadi pada waktu subuh menjelang hari pemungutan suara, meskipun sebenarnya sering dilakukan beberapa hari sebelumnya. Seperti yang dibahas dari beberapa bagian buku ini, kandidat-kandidat melaksanakan praktik ini melalui cara yang terorganisir, melibatkan tim besar untuk mengidentifikasi pemilih dan mendistribusikan uang kepada mereka. Salah satu aspek menarik dan kontroversial adalah adanya suatu kecenderungan struktur broker untuk menyembunyikan dana dan usaha yang dilakukan oleh kandidat untuk mencegahnya. Upaya lain melibatkan penentuan target penerima, di mana kandidat memilih secara selektif target, baik mereka yang setia kepada partai atau pemilih yang belum berkomitmen.

b. Pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*)

Sebagai upaya untuk mendukung praktik pembelian suara, para kandidat akan melakukan usaha lain yang dapat meyakinkan para pemilih dengan melakukan pertemuan dengan kunjungan ke rumah-rumah atau melakukan kampanye. Kondisi tersebut dikenal sebagai usaha untuk merekatkan hubungan sosial (*social lubricant*) dan memberikan barang sebagai wujud kenang-kenangan.

Praktik pemberian hadiah ini tidak mudah dibedakan dengan pembelian suara, sebab pemberian barang dikategorikan menjadi beberapa macam seperti pemberian benda-benda kecil seperti kalender atau kaos yang bertanda kandidat. Para kandidat juga memberikan sembako berupa kebutuhan rumah tangga serta peralatan rumah tangga yang bermakna religius, seperti sarung, sajadah dan sebagainya. Berbagai pertemuan juga dilakukan para kandidat sebagai wadah untuk kampanye dan memperkenalkan dirinya pada khalayak luas, yang mana dalam pertemuan tersebut para kandidat akan menyediakan rokok, minuman, dan makanan gratis bagi para pemilih. Para kandidat membedakan secara tegas antara pembelian suara dan pemberian hadiah, sebab mereka menganggap upaya tersebut bukanlah bentuk dari politik uang.

c. Pelayanan dan aktivitas (*services and activities*)

Kegiatan ini dilakukan oleh para kandidat untuk menyediakan atau membiayai aktivitas yang diadakan untuk merayakan suatu komunitas tertentu yang menjadi ajang untuk mempromosikan diri. Kegiatan seperti ini dilakukan oleh para komunitas yang memiliki hobi tertentu seperti pertandingan olahraga dan beragam turnamen lainnya. Tidak sedikit para kandidat yang membiayai kegiatan masyarakat seperti mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis hingga penyediaan ambulans. Para kandidat juga akan senantiasa

menyediakan kemudahan akses fan batuan konstituen bagi beberapa personal yang membutuhkan layanan pemerintah.

d. Barang-barang kelompok (*club goods*)

Menurut Aspinal (2015:24) *club goods* seringkali dianggap sebagai taktik patronase yang mengarah pada keuntungan bersama dari suatu kelompok sosial daripada individual. Dalam praktik patronase *club goods* digunakan untuk memberikan keuntungan individual. Di Indonesia *club goods* dikategorikan menjadi dua, *pertama* donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas, *kedua* donasi untuk komunitas yang tinggal di lingkungan pedesaan, perkotaan, dan lainnya. Melalui kedua asosiasi tersebut, para kandidat akan turut menyelam di akar rumput untuk mencari suara dan dukungan dengan memberikann fasilitas dan memenuhi kebutuhan para komunitas baik formal maupun non-formal. Para kandidat merasa bahwa *club goods* bukan lah bagian dari politik uang sebab mereka turut menyediakan kebutuhan masyarakat, namun para kandidat berharap dengan adanya praktik tersebut masyarakat dapat memberikan suara dan dukungan mereka.

Aspinal menguraikan bahwa sebagai negara, Indonesia memiliki beragam komunitas formal maupun non-formal yag tersebar di setiap lapisan lingkungan baik pedesaan, hingga perkotaan. Komunitas ini meliputi kelompok keagamaa, asosisasi pemuda, klub olahraga, kelompok wanita, dan

koperasi petani. Tujuan dari kedatangan kandidat ke komunitas yang dibarengi oleh pemberian barang berupa kebutuhan para komunitas maupun memberikan sumbangan atau donasi yang diberikan untuk keberlangsungan komunitas dianggap sebagai salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atau para kandidat tidak menganggapnya sebagai “politik uang”.

Tentunya, para kandidat sudah memastikan bahwa pemberiannya akan bermanfaat dan menguntungkan bagi diri mereka, utamanya untuk memastikan bahwa jika kelompok atau komunitas memberikan suara mereka maka mereka akan mengetahui manfaatnya. Para kandidat umumnya memandang memberikan keuntungan kelompok sebagai tindakan yang sah dan bermoral, meskipun mereka menyadari bahwa taktik ini tidak begitu dapat diandalkan.

e. Proyek-proyek gentong babi (*pork barrel projects*)

Merupakan proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu, kegiatan ini ditujukan untuk publik dan sumber dana berasal dari publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat. Banyak kandidat yang memberikan janji akan membentuk program yang menggunakan dana publik untuk konstituen mereka. Para kandidat akan memulainya dengan menggarap proyek infrastruktur berskala kecil untuk memberikan keuntungan pada komunitas tertentu. Sehingga

banyak kandidat petahana yang berupaya untuk membentuk rekam jejak (*track record*) untuk meyakinkan para pemilih.

*Pork barrel projects* yang digunakan oleh para anggota DPRD disebut sebagai *dana aspirasi* seperti halnya yang dikenal di negara lain sebagai *dana pembangunan konstituen* (van Zyl 2010). Calon kandidat petahana menggunakan praktik ini sebagai upaya pembentukan klien. *Pork barrel* merujuk pada inisiatif pemerintah yang dikhususkan untuk suatu daerah geografis tertentu. Ciri khas dari *pork barrel* adalah bahwa proyek ini bersifat umum dan didanai melalui dana publik dengan harapan mendapatkan dukungan politik dari masyarakat untuk calon tertentu. Seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut, banyak calon politik yang menawarkan "program" dan "proyek" yang didanai oleh dana publik kepada konstituennya, seringkali berupa proyek infrastruktur kecil atau manfaat bagi kelompok komunitas tertentu, terutama yang dapat meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, calon petahana sering berusaha menunjukkan pencapaian mereka dalam menyediakan "program" tersebut selama periode kampanye.

## **B. Teori *Rational Choice***

Rasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata "rasio," yang berarti pemikiran yang logis atau sesuai dengan nalar manusia secara umum. Rasional merujuk pada sesuatu yang sesuai dengan pikiran dan pertimbangan logis,

sehat, dan masuk akal. Dengan demikian, rasional berarti pemikiran seseorang yang didasarkan pada pertimbangan akal sehat dan logis. Ini juga dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan berdasarkan pemikiran dan pertimbangan logis, pikiran yang sehat, dan sesuai dengan akal. Pilihan rasional adalah pilihan yang didasarkan pada rasio akal yang sesuai dengan logika individu masing-masing. Rasionalitas muncul ketika seseorang dihadapkan pada berbagai pilihan yang memberikan kebebasan untuk menentukan.

Teori *Rational Choice*, yang dicetuskan oleh James S. Coleman, menggambarkan bahwa tindakan individu didasarkan pada pertimbangan rasional yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipilih. Coleman, seorang sosiolog terkemuka pada paruh kedua abad kedua puluh, menyoroiti bagaimana setiap individu memiliki tujuan yang ingin dicapai dan memilih tindakan berdasarkan pertimbangan nilai. Dalam konteks ini, teori ini menunjukkan bahwa perilaku manusia dapat dipahami melalui analisis rasional atas pilihan yang mereka buat, serta bagaimana faktor nilai mempengaruhi proses pengambilan keputusan mereka. (Sastrawati, 2019 : 188). Teori *Rational Choice* menurut James Coleman menyoroiti kalau usaha individu mempunyai tujuan yang dipilih melalui nilai ataupun preferensi. Coleman berpendapat kalau konsep ini perlu pemahaman akurat tentang aktor rasional, yang bermula dari ilmu ekonomi, di mana aktor melalui tindakan yang dapat memaksimalkan

kegunaan atau pun keinginan mereka. Pada teori ini, aktor dan sumber daya memiliki peran kunci.

Menurut Coleman (2013), sosiologi berfokus pada sistem sosial di mana fenomena makro harus dijelaskan oleh faktor-faktor internal, terutama oleh individu. Perhatian pada individu ini penting karena intervensi dapat menciptakan perubahan sosial. Jadi, inti perspektif Coleman adalah bahwa teori sosial bukan hanya latihan akademis tetapi juga harus mempengaruhi kehidupan sosial melalui intervensi tersebut. Fenomena pada tingkat mikro, selain yang bersifat individual, juga dapat menjadi objek analisis. Interaksi antarindividu dipandang sebagai hasil dari fenomena sistem yang muncul, yang tidak direncanakan atau diprediksi oleh individu.

Intervensi adalah campur tangan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan negara. Intervensi ini diharapkan mampu menciptakan perubahan sosial. Individu memegang peran penting dalam sistem sosial karena mereka menentukan berjalannya sistem tersebut. Bahkan sebelum sistem terbentuk, individu dikumpulkan dan disusun menjadi sebuah sistem. Teori pilihan rasional Coleman menunjukkan bahwa tindakan individu mengarah pada tujuan tertentu yang ditentukan oleh nilai atau preferensi mereka. Coleman berpendapat bahwa konsep aktor rasional dari ilmu ekonomi, di mana aktor memilih tindakan yang memaksimalkan utilitas, keinginan, atau kebutuhan mereka, sangat penting. Ada dua

elemen utama dalam teori Coleman, yaitu aktor dan sumber daya.

Sumber daya mencakup semua potensi yang ada atau dimiliki, baik itu berupa sumber daya alam atau sumber daya manusia. Aktor, sebagai individu yang melakukan tindakan, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya dengan efektif. Coleman juga membahas interaksi antara aktor dan sumber daya hingga tingkat sistem sosial, dengan dasar minimal untuk sistem sosial terletak pada tindakan dua aktor yang memiliki sumber daya yang menarik perhatian satu sama lain (Sastrawati, 2019 : 189). Teori Pilihan Rasional yang diungkapkan oleh Coleman menekankan kalau individu terlibat dalam suatu tindakan yang mengambil keuntungan sumber daya yang mereka miliki untuk meraih suatu tujuan tertentu (Sastrawati, 2019). Dengan kata lain, setiap tindakan individu memiliki tujuan atau niat khusus di dalamnya. Pada beberapa kasus, sumber daya ini mungkin belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemiliknya. Kendati begitu, tindakan rasional seseorang terkadang dapat dianggap tidak rasional oleh orang lain. Penilaian mengenai rasionalitas suatu tindakan tidak dapat diukur dari sudut pandang orang lain, melainkan harus dievaluasi dari perspektif individu yang melakukan tindakan tersebut (Coleman, 2011:17-18).

Teori Rational Choice menitik beratkan kepada peran aktor ataupun pelaku. Aktor dianggap yaitu individu yang memiliki

tujuan ataupun maksud. Ini berarti bahwa aktor memiliki arah tertentu, dan perlakuannya diarahkan untuk meraih tujuan tersebut. Selain itu, aktor dianggap memiliki kemampuan untuk membuat pilihan. Teori pilihan rasional tidak memperhatikan substansi dari pilihan yang dibuat oleh aktor. Namun, saat ini adalah fokus pada kenyataan bahwasanya tindakan dilakukan guna meraih tujuan sesuai dengan keinginan atau pilihan yang dimiliki oleh aktor tersebut. Dalam kasus ini aktor atau pelaku ialah para calon legislatif di mana calon legislatif sebagai actor mempunyai tujuan dan maksud dengan Tindakan atau Upaya untuk mencapai tujuan itu melakukan politik uang untuk masyarakat.

Menurut Coleman, dalam pergerakan aktor rasional, perilaku kolektif adalah perpindahan sederhana yang rasional dari kendali atas tindakan seseorang kepada aktor lain, dilakukan secara sepihak dan bukan bagian dari suatu pertukaran (Coleman, 1990). Dari perspektif rasional, orang-orang memindahkan kendali sepihak atas tindakan mereka kepada orang lain untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Namun, cara sepihak ini menciptakan ketidakseimbangan yang khas dalam perilaku kolektif. Teori Pilihan Rasional yang dikemukakan oleh Coleman mendapat berbagai kritik. Menurut Alexander (1992) dalam Ritzer (2012), teori Coleman mengenai Pilihan Rasional menghadapi berbagai kritik.

Teori *Rational choice* dari James Coleman dan Teori Patronase Politik dari Edward Aspinall akan digunakan sebagai acuan untuk menganalisis praktik politik uang di Kelurahan Karang Mulya pada pemilihan legislatif di Kota Tangerang tahun 2024. Teori Pilihan Rasional Coleman menekankan bahwa individu bertindak berdasarkan pertimbangan yang memaksimalkan keuntungan pribadi mereka. Dalam konteks politik uang, teori ini dapat membantu memahami mengapa para pemilih mungkin menerima uang atau hadiah dari kandidat politik: mereka melihatnya sebagai cara untuk memaksimalkan keuntungan langsung mereka dari proses pemilihan. Sementara itu, Teori Patronase Politik Aspinall menjelaskan bagaimana hubungan patron-klien bekerja dalam konteks politik. Patronase politik melibatkan pemberian material atau dukungan kepada pemilih oleh kandidat atau partai politik sebagai imbalan atas dukungan atau suara mereka. Teori ini membantu menjelaskan mekanisme dan motivasi di balik praktik politik uang, di mana politisi menggunakan sumber daya untuk membangun jaringan dukungan melalui distribusi keuntungan material. Dengan menggabungkan kedua teori ini, penulis dapat menganalisis praktik politik uang di Kelurahan Karang Mulya dari perspektif perilaku rasional pemilih serta dinamika patronase yang mempengaruhi interaksi antara kandidat dan pemilih. Ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang

mengapa politik uang terjadi dan bagaimana ia berfungsi dalam konteks pemilihan legislatif di Kota Tangerang.

## **BAB III**

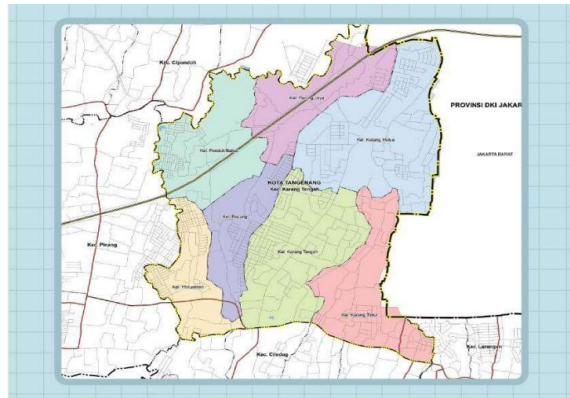
### **GAMBARAN UMUM KELURAHAN KARANG MULYA**

#### **A. Gambaran umum Kelurahan Karang Mulya**

##### **1. Kondisi Geografis**

Kelurahan Karang Mulya yaitu sebuah Kelurahan yang ada di Kota Tangerang Provinsi Banten. Lalu secara geografis, Kelurahan Karang Mulya memiliki pada posisi Koordinat Bujur 106.715124 dan Koordinat Lintang - 6.211358 secara administratif, kelurahan Karang Mulya terletak di wilayah kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang dengan posisi dibatasi oleh wilayah kelurahan-kelurahan tetangga. Disebelah utara berbatasan dengan Kembangan, disebelah timur berbatasan dengan meruya utara, di sebelah Selatan berbatasan dengan Karang Tengah dan disebelah barat berbatasan dengan Parung Jaya. Jarak tempuh kelurahan Karang Mulya keibu kota kecamatan adalah 600 meter, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 2 menit, sedangkan keibu kota Tangerang 11 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 23 menit.

## Peta wilayah Kelurahan Karang Mulya



(sumber :kelurahan karang mulya)

Kelurahan Karang Mulya mempunyai luas wilayah 217 hektar dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara: kelurahan kembangan
2. Sebelah timur: kelurahan meruya utara
3. Sebelah selatan: kelurahan karang tengah
4. Sebelah barat: kelurahan parung jaya

## 2. Kondisi Demografis

Adapun Rincian Kondisi Demografis kelurahan karang mulya sebagai berikut:

### a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin

Kelurahan Karang Mulya memiliki jumlah penduduk yang cukup signifikan berdasarkan pendataan terbaru pada tahun 2024. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah penduduk di kelurahan ini mencapai 15.048 jiwa, yang

terbagi atas dua kategori jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.

Dari total tersebut, jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 7.466 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sedikit lebih banyak, yakni 7.582 jiwa. Dengan demikian, terlihat bahwa komposisi penduduk perempuan di Kelurahan Karang Mulya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Data ini memberikan gambaran yang penting mengenai distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan Karang Mulya dan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan serta perencanaan pembangunan wilayah. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin ini dapat dirinci lebih lanjut dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1

(Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 2024)

| No     | Jenis Kelamin | Jumlah Jiwa |
|--------|---------------|-------------|
| 1      | Laki-Laki     | 7.466       |
| 2      | Perempuan     | 7.582       |
| Jumlah |               | 15.048      |

(Sumber : Kelurahan Karang Mulya)

b. Jumlah pengangguran

Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18- hingga 56 tahun) berjumlah 4501 orang, jumlah penduduk yang

masih sekolah dan tidak bekerja berjumlah 4662 orang, jumlah penduduk yang menjadi ibu rumah tangga berjumlah 3158 orang, jumlah penduduk yang bekerja penuh berjumlah 2256 orang, jumlah penduduk yang bekerja tidak tentu berjumlah 1639 orang, jumlah penduduk yang cacat dan tidak bekerja berjumlah 0 orang, jumlah penduduk yang cacat dan bekerja berjumlah 0 orang.

Tabel 3. 2

(Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur)

| No | Pengangguran   | Jumlah Jiwa |
|----|--|-------------|
| 1  | Jumlah angkatan kerja<br>(penduduk usia 18-56 tahun)                 | 4501        |
| 2  | jumlah penduduk yang masih<br>sekolah dan tidak bekerja<br>berjumlah | 4662        |
| 3  | penduduk yang menjadi ibu<br>rumah tangga                            | 3158        |
| 4  | penduduk yang bekerja penuh  | 2256        |
| 5  | penduduk yang bekerja tidak<br>tentu                                 | 1639        |
| 6  | penduduk yang cacat dan<br>tidak bekerja                             | 0           |
| 7  | penduduk yang cacat dan<br>bekerja                                   | 0           |

(Sumber : kelurahan karang mulya)

Pada Tabel diatas dapat disimpulkan Jumlah Angkatan Kerja terdapat 4.501 jiwa yang berada dalam usia angkatan kerja (18-56 tahun), Jumlah Penduduk yang Masih Sekolah sebanyak 4.662 jiwa masih bersekolah dan tidak bekerja, jumlah Ibu Rumah Tangga Sebanyak 3.158 jiwa berstatus sebagai ibu rumah tangga, Jumlah Penduduk yang Bekerja, Dari total angkatan kerja, 2.256 jiwa bekerja penuh, sementara 1.639 jiwa bekerja dengan kondisi tidak tentu dan jumlah Penduduk Cacat, Tidak ada penduduk yang cacat, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja.

Dari total penduduk, sebagian besar masih bersekolah atau terlibat dalam aktivitas rumah tangga, dengan jumlah yang melebihi jumlah angkatan kerja. Dari mereka yang berada dalam usia produktif, sekitar setengahnya terlibat dalam pekerjaan penuh atau tidak tetap. Ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kerja yang penuh belum maksimal, dan ada proporsi signifikan dari penduduk usia kerja yang tidak bekerja, baik karena masih bersekolah, menjadi ibu rumah tangga, atau terlibat dalam pekerjaan yang tidak stabil. Tidak ada data mengenai penduduk cacat, menunjukkan bahwa kelompok ini mungkin sangat kecil atau tidak terdata dalam wilayah ini.

Berdasarkan data demografis mengenai kondisi ketenagakerjaan di Kelurahan Karang Mulya, terdapat beberapa kategori yang menggambarkan status penduduk terkait aktivitas kerja mereka. Berikut adalah rincian kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut:

1. Jumlah Angkatan Kerja (Usia 18-56 Tahun): Tercatat sebanyak 4.501 jiwa merupakan bagian dari angkatan kerja di Kelurahan Karang Mulya, yakni penduduk yang berada dalam rentang usia produktif dan berpotensi untuk bekerja.
2. Jumlah Penduduk yang Masih Sekolah dan Tidak Bekerja: Sebanyak 4.662 jiwa dari total populasi masih berstatus sebagai pelajar dan tidak terlibat dalam aktivitas pekerjaan. Jumlah ini mencerminkan bagian dari populasi yang sedang menempuh pendidikan dan belum masuk ke dalam pasar tenaga kerja.
3. Penduduk yang Menjadi Ibu Rumah Tangga: Terdapat 3.158 jiwa yang berstatus sebagai ibu rumah tangga, menunjukkan bahwa sebagian dari penduduk perempuan di wilayah ini tidak terlibat dalam pekerjaan formal namun memiliki peran penting dalam lingkup rumah tangga.
4. Penduduk yang Bekerja Penuh: Sebanyak 2.256 jiwa dari total angkatan kerja di Kelurahan Karang Mulya

memiliki pekerjaan tetap atau penuh waktu. Ini mencerminkan bagian dari populasi yang aktif secara ekonomi dan berkontribusi pada produktivitas wilayah.

5. Penduduk yang Bekerja Tidak Tentu: Sebanyak 1.639 jiwa bekerja dalam kondisi yang tidak menentu atau tidak memiliki pekerjaan tetap. Mereka mungkin terlibat dalam pekerjaan serabutan, paruh waktu, atau jenis pekerjaan lain yang tidak memiliki jaminan ketenagakerjaan yang stabil.
6. Penduduk yang Cacat dan Tidak Bekerja: Tidak ada penduduk yang tercatat sebagai penyandang cacat dan tidak bekerja.
7. Penduduk yang Cacat dan Bekerja: Tidak ada penduduk yang tercatat sebagai penyandang cacat dan bekerja.

Dari data ini, terlihat bahwa Kelurahan Karang Mulya memiliki tantangan tersendiri dalam hal ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan keberadaan penduduk yang masih sekolah dan tidak bekerja serta mereka yang bekerja dalam kondisi tidak menentu. Informasi ini penting dalam memahami dinamika ekonomi di kelurahan ini dan dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan untuk meningkatkan

kesejahteraan penduduk melalui peningkatan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi.

## **B. Jumlah kesejahteraan keluarga**

Tabel 3. 3  
(Jumlah Kesejahteraan Keluarga)

| No | Kesejahteraan keluarga    | Jumlah Jiwa |
|----|---------------------------|-------------|
| 1  | keluarga prasejahtera     | 13          |
| 2  | keluarga sejahtera 1      | 596         |
| 3  | keluarga sejahtera 2      | 238         |
| 4  | keluarga sejahtera 3      | 207         |
| 5  | keluarga sejahtera 3 plus | 220         |

(Sumber: kelurahan karang mulya)

Berdasarkan data dari Kelurahan Karang Mulya, berikut adalah gambaran mengenai kondisi kesejahteraan keluarga di wilayah tersebut, yang telah dikategorikan dalam lima tingkat kesejahteraan:

1. Keluarga Prasejahtera: Terdapat 13 keluarga yang berada dalam kategori prasejahtera. Keluarga dalam kategori ini umumnya menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti pangan, sandang, papan, serta akses ke layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai.

2. Keluarga Sejahtera 1: Jumlah keluarga dalam kategori sejahtera 1 mencapai 596 keluarga. Kategori ini menunjukkan bahwa keluarga-keluarga tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan dasar, namun mungkin masih menghadapi beberapa kendala dalam meningkatkan taraf hidup dan mengakses layanan tambahan yang berkualitas.
3. Keluarga Sejahtera 2: Terdapat 238 keluarga yang masuk dalam kategori sejahtera 2. Keluarga-keluarga ini biasanya telah mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan tambahan, seperti pendidikan dan kesehatan, meskipun belum sepenuhnya stabil dari segi ekonomi.
4. Keluarga Sejahtera 3: Sebanyak 207 keluarga dikategorikan sebagai keluarga sejahtera 3. Kategori ini menandakan bahwa keluarga-keluarga tersebut telah mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik, dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang stabil dan kemampuan untuk mengakses berbagai layanan tambahan dengan cukup baik.
5. Keluarga Sejahtera 3 Plus: Terdapat 220 keluarga yang termasuk dalam kategori sejahtera 3 plus. Keluarga dalam kategori ini menunjukkan tingkat kesejahteraan yang tinggi, dengan kemampuan ekonomi yang cukup kuat, akses yang baik terhadap berbagai layanan publik, serta stabilitas dalam memenuhi kebutuhan hidup secara menyeluruh.

Data ini memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi kesejahteraan di Kelurahan Karang Mulya, di mana mayoritas keluarga berada pada tingkat kesejahteraan yang relatif baik (sejahtera 1 hingga sejahtera 3 plus). Namun, perhatian khusus tetap perlu diberikan kepada keluarga yang berada dalam kategori prasejahtera dan sejahtera 1, agar mereka dapat dibantu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Informasi ini penting dalam merumuskan kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh warga di wilayah ini.

### C. Jumlah sektor mata pencaharian

Tabel 3. 4

Jumlah Sektor Mata Pencaharian

| No | Mata pencaharian               | Jumlah Jiwa |
|----|--------------------------------|-------------|
| 1  | Montir                         | 10          |
| 2  | Tukang batu                    | 12          |
| 3  | Tukang kayu                    | 17          |
| 4  | Tukang sumur                   | 4           |
| 5  | Pemulung                       | 0           |
| 6  | Karyawan swasta                | 3580        |
| 7  | Karyawan Perusahaan pemerintah | 62          |
| 8  | Kontraktor                     | 2           |
| 9  | PNS                            | 234         |
| 10 | TNI                            | 9           |
| 11 | POLRI                          | 20          |
| 12 | Dokter swasta                  | 28          |
| 13 | Bidan swasta                   | 10          |

|    |               |     |
|----|---------------|-----|
| 14 | Guru swasta   | 123 |
| 15 | Seniman/artis | 4   |

(Sumber: kelurahan karang mulya)

Berdasarkan data sektor mata pencaharian di Kelurahan Karang Mulya, tercatat berbagai profesi yang dijalani oleh penduduk setempat. Data ini memberikan gambaran mengenai keragaman dan distribusi pekerjaan di wilayah tersebut, yang mencerminkan aktivitas ekonomi dan sosial di masyarakat.

Mayoritas penduduk bekerja sebagai karyawan swasta, dengan jumlah yang sangat dominan mencapai 3.580 jiwa. Ini menunjukkan bahwa sektor swasta menjadi sumber mata pencaharian utama bagi penduduk Kelurahan Karang Mulya.

Profesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) juga cukup signifikan, dengan 234 jiwa yang bekerja di sektor ini, diikuti oleh karyawan perusahaan pemerintah sebanyak 62 jiwa. Profesi di bidang pemerintahan dan perusahaan milik negara mencerminkan keterlibatan penduduk dalam pelayanan publik dan administrasi negara.

Beberapa profesi lainnya yang terdata dalam jumlah yang lebih kecil antara lain guru swasta (123 jiwa), dokter swasta (28 jiwa), bidan swasta (10 jiwa), dan seniman/artis (4 jiwa), yang menunjukkan kehadiran sektor pendidikan, kesehatan, dan seni dalam komunitas ini. Selain itu, terdapat sejumlah pekerja dengan keahlian khusus seperti tukang kayu

(17 jiwa), tukang batu (12 jiwa), montir (10 jiwa), dan tukang sumur (4 jiwa). Meskipun jumlahnya relatif kecil, profesi ini tetap penting karena mendukung berbagai kebutuhan teknis dan infrastruktur di lingkungan masyarakat. Profesi TNI dan POLRI masing-masing diwakili oleh 9 dan 20 jiwa, yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah ini.

Secara keseluruhan, data ini mengungkapkan bahwa Kelurahan Karang Mulya memiliki populasi dengan beragam profesi, di mana sektor swasta memainkan peran dominan dalam memberikan lapangan pekerjaan, diikuti oleh sektor pemerintahan dan profesi lainnya yang mendukung berbagai aspek kehidupan di wilayah tersebut.

#### **D. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan**

Penduduk yang tamat sd berjumlah 738, Penduduk yang tamat smp berjumlah 582, Penduduk yang tamat sma berjumlah 582, Penduduk yang tamat sma berjumlah 5150, Penduduk yang tamatakademi D1/D2 berjumlah 32, Penduduk yang tamat S1 berjumlah 2071, Penduduk yang tamat S3 berjumlah 35 orang. Dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 3. 5

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

| NO | Pendidikan    | Jumlah Jiwa |
|----|---------------|-------------|
| 1. | SD            | 738         |
| 2. | SMP           | 582         |
| 3. | SMA           | 5150        |
| 4. | Akademi D1/D2 | 32          |

|    |    |      |
|----|----|------|
| 5. | D3 | 394  |
| 6. | S1 | 2071 |
| 7. | S2 | 191  |
| 8. | S3 | 35   |

(Sumber: kelurahan Karang Mulya)

Data mengenai tingkat pendidikan di Kelurahan Karang Mulya memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi pendidikan di wilayah tersebut. Berikut adalah narasi yang menjelaskan data tersebut: Kelurahan Karang Mulya memiliki populasi dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Sebagian besar penduduk, yaitu sebanyak 5.150 jiwa, memiliki pendidikan hingga tingkat SMA, menjadikan jenjang ini sebagai yang paling umum di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk telah menyelesaikan pendidikan menengah atas, yang merupakan fondasi penting untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja.

Di tingkat pendidikan dasar, terdapat 738 jiwa yang berpendidikan SD dan 582 jiwa yang berpendidikan SMP. Jumlah ini mencerminkan bahwa sebagian penduduk telah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama, meskipun tidak melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Pada jenjang pendidikan tinggi, sebanyak 2.071 jiwa memiliki gelar sarjana (S1), menunjukkan komitmen yang signifikan terhadap pendidikan tinggi di kalangan penduduk. Selain itu, terdapat 394

jiwa yang telah menyelesaikan pendidikan diploma tiga (D3), dan 32 jiwa yang memiliki pendidikan pada tingkat akademi D1 atau D2, yang umumnya berfokus pada keahlian vokasional.

Lebih lanjut, 191 jiwa telah menyelesaikan pendidikan magister (S2), dan 35 jiwa telah mencapai gelar doktor (S3). Jumlah ini, meskipun lebih kecil dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, menunjukkan adanya kelompok yang sangat terdidik di Kelurahan Karang Mulya, yang kemungkinan besar berperan dalam bidang akademik, penelitian, atau profesional lainnya. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kelurahan Karang Mulya memiliki sumber daya manusia yang cukup terdidik, dengan mayoritas penduduk yang memiliki pendidikan menengah atas dan sebagian yang telah mencapai pendidikan tinggi. Ini merupakan modal penting bagi perkembangan sosial dan ekonomi wilayah, karena tingkat pendidikan yang baik sering kali berkorelasi dengan peluang yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan.

#### **E. Dinamika Politik Pada Pemilihan Legislatif 2024 di Kelurahan Karang Mulya**

Dinamika politik pada gelaran pesta demokrasi khususnya dalam pemilihan dewan legislatif menjadi salah satu ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam. Pada pembahasan ini terlebih dahulu akan dijabarkan mengenai dinamika politik khususnya pada Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang. Wilayah Kelurahan

Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang dalam pembagian wilayah daerah pemilihan tingkat Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Banten termasuk bagian dari daerah pemilihan (dapil) 4 Kota Tangerang meliputi Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karang Tengah dan Kecamatan larangan.

Dalam pemilihan legislatif tingkat Kota Tangerang, dapil 4 Kota Tangerang akan memperebutkan 11 kursi di DPRD Kota Tangerang. Dalam pemilihan legislatif tingkat Kota Tangerang terdapat 142 calon anggota legislatif yang berasal dari 17 partai politik yang akan saling berkontestasi untuk bisa mendapatkan kursi di parlemen. Adapun untuk penjabaran mengenai partai politik yang berkontestasi pada pemilihan legislatif tingkat Kota Tangerang khususnya di wilayah Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah yang termasuk dalam dapil 4 Kota Tangerang adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 1**

**Jumlah Partai dan Caleg DPRD Kota Tangerang yang bertarung pada Pileg 2024 Dapil 4 Kota Tangerang di Wilayah Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah**

| NO | Nama Partai                     | CALEG |
|----|---------------------------------|-------|
| 1  | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 11    |
| 2  | Partai Gerindra                 | 11    |
| 3  | PDIP                            | 11    |
| 4  | Partai Golkar                   | 11    |
| 5  | Partai Nasdem                   | 11    |

|    |                                    |     |
|----|------------------------------------|-----|
| 6  | Partai Buruh                       | 3   |
| 7  | Partai GELORA                      | 4   |
| 8  | Partai Keadilan Sejahtera (PKS)    | 11  |
| 9  | Partai Kebangkitan Nusantara       | 1   |
| 10 | Partai HANURA                      | 1   |
| 11 | Partai Amanat Nasional (PAN)       | 11  |
| 12 | Partai Bulan Bintang               | 6   |
| 13 | Partai Demokrat                    | 11  |
| 14 | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) | 11  |
| 15 | Partai PERINDO                     | 11  |
| 16 | Partai Persatuan Pembangunan       | 11  |
| 17 | Partai Ummat                       | 6   |
|    | <b>JUMLAH TOTAL CALEG</b>          | 142 |

*Sumber : KPUD BANTEN 2024*

Sementara itu dalam cakupan yang lebih luas yakni pada pembagian daerah pemilihan tingkat Provinsi Banten , Kelurahan Karang Mulya yang merupakan bagian dari Kecamatan Karang Tengah masuk pada daerah pemilihan Banten 8 (Dapil Banten 8).

Daerah pemilihan Banten 8 ini melingkupi wilayah Kota Tangerang B yang terdiri dari Kecamatan Cipondoh, Kecamatan Pinang, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Larangan. (KPUD Banten, 2024). Pada wilayah Dapil Banten 8 ini terdapat 3 kecamatan yang memiliki jumlah potensi suara yang besar yakni Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karang Tengah dan Kecamatan larangan dengan total jumlah penduduk 410.009 jiwa. Sebagai contoh jumlah

masyarakat yang terdaftar dalam DPT di Kecamatan Karang Tengah sendiri 84.256 jiwa yang tercatat di tahun 2024 ini. Oleh karena hal tersebut para calon anggota legislatif banyak yang saling berebut suara di daerah pemilihan Banten 8 memperebutkan kursi legislatif DPRD Provinsi sebanyak 7 Kursi. (KPUD Banten, 2024). Terdapat 16 parpol yang mengajukan nama-nama calon anggota legislatif memperebutkan 7 Kursi DPRD Provinsi dari Dapil Banten 8. Berikut Rinciannya:

**Tabel 4. 2**  
**Jumlah Partai dan Caleg DPRD Provinsi Banten yang bertarung pada Pileg 2024 Dapil Banten 8 di Wilayah Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah**

| NO | Nama Partai                        | CALEG |
|----|------------------------------------|-------|
| 1  | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)    | 7     |
| 2  | Partai GERINDRA                    | 7     |
| 3  | PDIP                               | 7     |
| 4  | Partai GOLKAR                      | 7     |
| 5  | Partai NASDEM                      | 7     |
| 6  | Partai Buruh                       | 2     |
| 7  | Partai GELORA                      | 1     |
| 8  | Partai Keadilan Sejahtera (PKS)    | 7     |
| 9  | Partai Kebangkitan Nusantara       | 2     |
| 10 | Partai HANURA                      | 1     |
| 11 | Partai Amanat Nasional (PAN)       | 7     |
| 12 | Partai Bulan Bintang (PBB)         | 2     |
| 13 | Partai Demokrat                    | 7     |
| 14 | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) | 7     |
| 15 | Partai PERINDO                     | 7     |

|                           |                              |           |
|---------------------------|------------------------------|-----------|
| 16                        | Partai Persatuan Pembangunan | 7         |
| 17                        | Partai Ummat                 | 6         |
| <b>JUMLAH TOTAL CALEG</b> |                              | <b>91</b> |

*Sumber : KPUD BANTEN 2024*

Berdasarkan dari uraian diatas kita dapat ketahui bahwa dalam pileg tahun 2024, Kelurahan Karang Mulya yang merupakan wilayah dari Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang , masuk pada Dapil 4 Kota Tangerang pada pileg DPRD tingkat Kota dan masuk pada Dapil Banten 8 pada Pileg DPRD Prov Banten.

Wilayah Kelurahan Karang Mulya yang berada dalam Wilayah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang dalam perjalanannya diwarnai dengan berbagai macam dinamika salah satunya adalah dinamika politik. Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah ini dihuni oleh masyarakat perkotaan yang modern. Hal ini penulis dapatkan berdasarkan hasil observasi lapangan yang penulis lakukan. Lebih lanjut , penulis dapati bahwa masyarakat di Kelurahan Karang Mulya merupakan masyarakat dengan kematangan pola pikir yang rasional selaras seperti apa yang diungkap oleh Juniartri, (2009). Sturktur masyarakat perkotaan yang modern dengan pola pikir rasional inilah yang pada akhirnya turut mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat Karang Mulya, salah satunya adalah dinamika politik.

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, Kelurahan Karang Mulya yang masuk dalam wilayah Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang merupakan salah satu wilayah kecamatan dengan basis suara yang cukup signifikan. Seperti halnya di tahun 2024 ini jumlah masyarakat yang terdaftar dalam DPT di Kecamatan Karang Tengah sendiri sebanyak 84.256 jiwa. Tentu potensi ini akan menjadi faktor kuat khususnya bagi para calon anggota legislatif (caleg) yang berkompetisi pada pemilu 2024 untuk berusaha memperoleh suara masyarakat

Perkembangan dinamika perpolitikan yang ada di wilayah Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah ini tidak terlepas dari dinamika politik Kota Tangerang secara keseluruhan. Contohnya dapat penulis jabarkan sederhana dari 3 periode pemilihan legislatif yakni tahun 2004, 2009, dan 2014. Pada pemilihan legislatif tahun 2004, Partai Demokrat yang memang pada saat itu tengah naik daun bersama dengan sosok Susilo Bambang Yudhoyono yang juga maju sebagai calon presiden. Hal ini terus berlangsung bahkan hingga pada rentang pemilu selanjutnya yakni 2009.

Hasil rekapitulasi presentasi ada Pileg 2004-2009, partai demokrat memperoleh 26% Suara di Kota Tangerang. Apa yang diperoleh oleh partai demokrat ini mengungguli partai kompetitornya yang lain seperti Partai Golkar yang memperoleh 12% suara dan PDIP yang bahkan memperoleh presentase suara

lebih kecil yakni 10% suara. Lebih lengkap uraian di atas , penulis sajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4. 3**  
**Rekapitulasi perolehan suara legislatif dalam rentang Tahun 2004-2009 di Dapil 4 di Wilayah Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah**

| No | Nama Partai     | Jumlah Kursi | Presentase |
|----|-----------------|--------------|------------|
| 1  | Partai Demokrat | 11           | 26%        |
| 2  | Partai Golkar   | 6            | 12%        |
| 3  | PKS             | 6            | 12%        |
| 4  | PPP             | 5            | 10%        |
| 5  | PDIP            | 5            | 10%        |
| 6  | Partai Gerindra | 5            | 10%        |
| 7  | PAN             | 4            | 8%         |
| 8  | PKB             | 3            | 6%         |
| 9  | Hanura          | 2            | 4%         |
| 10 | PKNU            | 1            | 2%         |

*Sumber : KPU Kota Tangerang*

Pada proses selanjutnya tepatnya di tahun 2014 dinamika politik di masyarakat Kota Tangerang juga mengalami dinamika kembali. Pada pemilihan legislatif tahun 2014 di Kota Tangerang , di ikuti oleh 15 partai politik. Hasil dari rekapitulasi suara dimenangkan oleh PDIP dengan memperoleh 166.688 Suara atau 21,07% kemudian di ikuti oleh Partai Golkar dengan memperoleh 118.025 suara atau 14,92%. Sementara itu Partai Demokrat yang sebelumnya sepuluh tahun berkuasa, pada pileg 2014 ini hanya memperoleh 57.489 dengan presentase 7,27%.

**Tabel 4. 4**  
**Rekapitulasi perolehan suara legislatif Kota Tangerang di**  
**Dapil 4 di Wilayah Kelurahan Karang Mulya Kecamatan**  
**Karang Tengah**

| NO | PARTAI          | Presentase Suara | Jumlah  |
|----|-----------------|------------------|---------|
| 1  | Partai Nasdem   | 5,57%            | 45.699  |
| 2  | PKB             | 6,90%            | 54.835  |
| 3  | PKS             | 6,99%            | 55.284  |
| 4  | PDIP            | 21,07%           | 166.688 |
| 5  | Partai Golkar   | 14,92%           | 118.025 |
| 6  | Partai Gerindra | 12,98%           | 118.805 |
| 7  | Partai Demokrat | 7,27%            | 57.489  |
| 8  | PAN             | 6,76%            | 53.479  |
| 9  | PPP             | 9,34%            | 73.896  |
| 10 | Partai Hanura   | 6,36%            | 50.318  |
| 11 | PBB             | 0,75%            | 5.943   |
| 12 | PKPI            | 0,88%            | 6.966   |

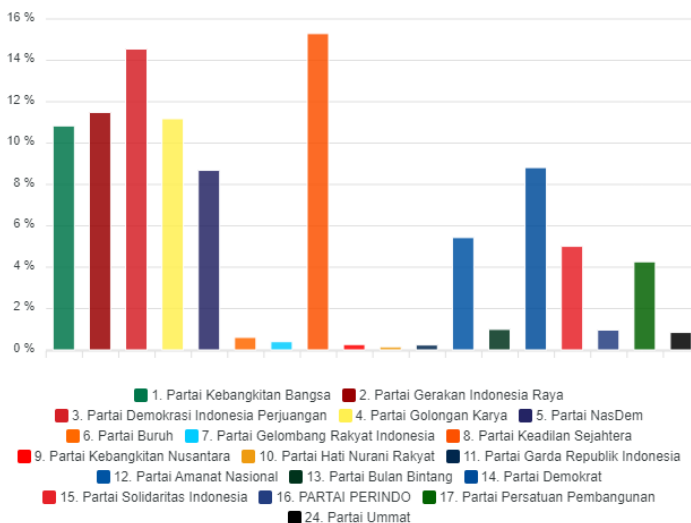
*Sumber : KPU Kota Tangerang*

Berdasarkan data diatas, pada pemilihan legislatif tahun 2014 di Kota Tangerang , PDIP berhasil menjadi pemenang pileg dengan perolehan suara yang cukup signifikan yakni 166.688 suara sehingga PDIP berhak untuk memperoleh 10 kursi dalam kontestasi pemilihan legislatif. Berdasarkan hal tersebut kita mengetahui bahwa dalam konteks 10 tahun kebelakang dinamika politik yang terjadi di wilayah Kelurahan Karang Mulya beragam. Masyarakat kelurahan Karang Mulya tidak hanya bergantung pada partai politik tertentu, namun

dinamika tersebut dinamis sesuai dengan dinamika politik yang terjadi pada tingkat Kota maupun Provinsi.

Memasuki pemilihan legislatif tahun 2024 dinamika politik kembali. Setelah sebelumnya hampir sebagian besar dikuasai oleh partai petahana (PDIP) maupun partai besar lainnya seperti Golkar, dan PKB, kali dimenangkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS ) baik untuk pemilu legislatif di tingkat kota tangerang maupun di tingkat Provinsi Banten. Fenomena ini dapat dilihat dalam diagram penghitungan secara realcount sebagai berikut :

**Gambar 4. 1 Diagram Rekapitulasi Perolehan Suara Realcount Pileg di Dapil Kota Tangerang 4**



*Sumber : Pemilu2024.KPU.go.id*

Dilihat dari diagram diatas, dapat terlihat bahwa pada tingkat Dapil Kota Tangerang 4 yang meliputi kecamatan Ciledug, Kecamatan Karang Tengah dan Kecamatan Larangan, Suara terbanyak diperoleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Keadilan Sejahtera di Dapil Kota Tangerang IV ini berhasil mendapatkan total suara sebesar, 35.036 suara atau 15,3%. Perolehan suara PKS terpaut cukup jauh yakni 1.710 suara dari pemenang kedua yakni PDIP yang hanya memperoleh total suara 33.326 Suara atau 14,55%. Kedua partai tersebut baik PKS maupun PDIP sama sama memperoleh masing-masing 2 kursi dari total 11 kursi anggota legislatif yang diperebutkan di dapil 4 Kota Tangerang ini.

**Tabel 4. 5**  
**Tabel Perolehan Kursi Anggota Legislatif pada pemilu legislatif 2024 untuk daerah pemilihan Kota Tangerang IV**

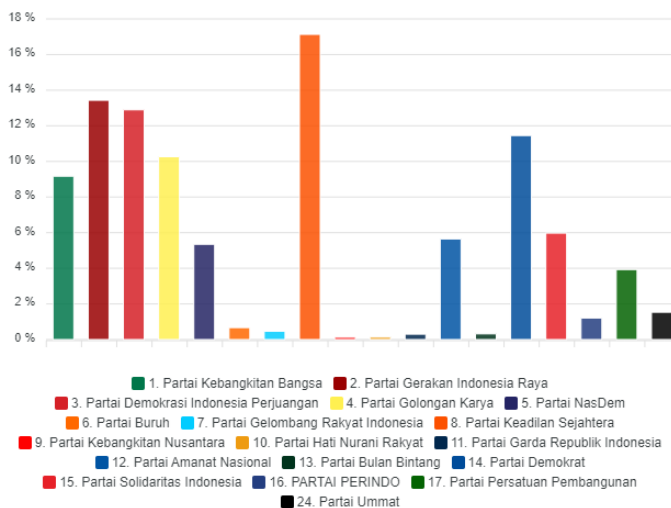
| NO                 | PARTAI          | Jumlah Kursi |
|--------------------|-----------------|--------------|
| 1                  | Partai Nasdem   | 1            |
| 2                  | PKB             | 1            |
| 3                  | PKS             | 2            |
| 4                  | PDIP            | 2            |
| 5                  | Partai Golkar   | 1            |
| 6                  | Partai Gerindra | 1            |
| 7                  | Partai Demokrat | 1            |
| 8                  | PAN             | 1            |
| 9                  | PPP             | 0            |
| 10                 | Partai Hanura   | 0            |
| 11                 | PBB             | 0            |
| 12                 | PSI             | 1            |
| <b>TOTAL KURSI</b> |                 | <b>11</b>    |

*Sumber : Pemilu2024.KPU.go.i*

Berdasarkan tabel diatas, PKS sebagai partai dengan perolehan terbanyak mendapatkan jatah 2 kursi yang di isi oleh Ridwan Akbar, yang mendapatkan 5.038 suara dan juga Edi Suhendi yang memperoleh suara sebesar 4.340 suara. Sementara itu PDIP yang memperoleh suara terbanyak kedua setelah PKS juga mendapatkan dua kursi parlemen yang dmenangkan dan disi oleh 2 orang kadernya yakni Gesuri Mesias Bintang Merah yang memperoleh 5.753 Suara dan Alrizoma Akrom yang memperoleh 4.338 suara.

Selaras dengan apa yang terjadi, dalam pemilihan legislatif di untuk DPRD Provinsi Banten 2024 khususnya daerah pemilihan Banten VIII, juga dimenangkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS berhasil mendapatkan 75,886 Suara atau jika di presentasikan sejumlah 17,13% suara. Hal yang menjadi pembeda adalah jika pada pileg tingkat kota tangerang pemenang kedua adalah PDIP , di Pileg DPRD Provinsi Banten, pemenang kedua adalah Partai Gerindra. Gerindra sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak kedua , memperoleh suara yakn 59.480 Suara atau jika dipresentasikan memperoleh 13,43% dari total keseluruhan suara Dapil Banten 8. Penjabaran lengkap dapat dilihat pada gambar diagram berikut :

**Gambar 4. 2 Diagram Rekapitulasi Perolehan Suara Realcount Pileg di Dapil Kota Tangerang 4**



*Sumber : Pemilu2024.KPU.go.i*

Dari gambar diagram diatas, terlihat PKS mendapatkan suara masyarakat paling banyak. Sementara itu Gerindra Menempel di posisi terbanyak kedua kemudian di ikuti oleh Gerindra di terbanyak ketiga. Dari total 7 kursi DPRD Provinsi Banten yang diperebutkan, parpol dengan perolehan suara diatas 3% mendapatkan masing-masing 1 Kursi untuk calon anggota legislatif yang berada di wilayah daerah pemilihan Banten 8. Mereka yang terpilih dari dapil Banten 8 dapat kita jabarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.5**  
**Tabel Caleg DPRD yang terpilih dari Dapil Banten 8**

| No | Nama Caleg            | Asal Partai | Perolehan Suara |
|----|-----------------------|-------------|-----------------|
| 1  | H. Syahroni ,S.Pd     | PKB         | 15.674          |
| 2  | Andra Soni, S.M       | GERINDRA    | 26.487          |
| 3  | DR. Yeremia Mendrofa  | PDIP        | 24.048          |
| 4  | Hj. Desy Yusandi, S.E | GOLKAR      | 24.924          |
| 5  | H. Hilmi Fuad, S.T    | PKS         | 28.524          |
| 6  | H. Abdul Syukur       | DEMOKRAT    | 20.559          |
| 7  | Michael Eka Sugiharto | PSI         | 5.798           |

*Sumber : Pemilu2024.KPU.go.i*

Hasil dari tabel tersebut menjadi menarik bagi penulis sebab , terdapat satu nama caleg yang kontroversial yakni Hj Desy Yusandi dari partai Golkar. Sosok caleg yang dimaksud merupakan sosok yang pernah terjerat kasus korupsi proyek pembangunan pusat kesehatan masyarakat pada kurun waktu 2011-2012 yang pada akhirnya membuat dirinya terbuai di salemba.

Kontestasi pemilihan legislatif ini bukan kali pertama di ikuti oleh Desy Yusandi karena sebelumnya pada tahun 2019 , Desy mengikuti kontestasi pemilihan legislatif dan berhasil menjadi anggota DPRD Provinsi Banten yang terpilih dari dapil 6 Banten untuk periode 2019-2024. Dan pada pemilihan legislatif tahun 2024, Desy kembali berhasil menjadi anggota DPRD Provinsi Banten dari daerah pemilihan Banten 8.

Seperti yang kita ketahui bahwa Dapil 8 ini merupakan dapil yang didalamnya termasuk kecamatan Karang Tengah sekaligus termasuk kelurahan Karang Mulya. Ini menjadi sebuah pemantik bagi penulis untuk mengetahui bagaimana sebenarnya dinamika dan proses politik yang ada di lapangan , sehingga sosok seperti Desy Yusandi ini terpilih menjadi Anggota Legislatif bahkan di periode sebelumnya juga berhasil memenangkan kontestasi tersebut. Apakah hal ini erat kaitanya dengan cara para caleg memenangkan suara masyarakat.

**BAB IV**

**PRAKTIK POLITIK PATRONASE PADA PEMILIHAN  
LEGISLATIF 2024 DI KELURAHAN KARANG MULYA,  
KECAMATAN KARANG TENGAH KOTA TANGERANG**

**A. Politik Patronase di Kelurahan Karang Mulya Pada  
Pemilihan Legislatif 2024**

**1. Pembentukan Struktur dan Koordinasi Mesin Politik**

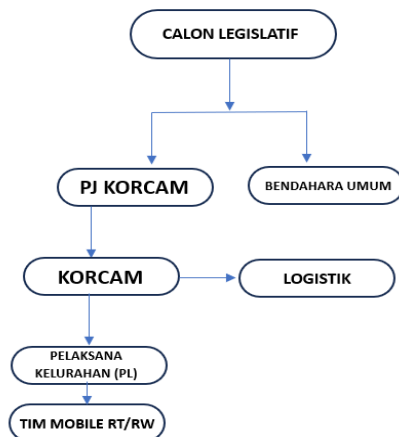
Sistem pemilu proporsional terbuka mulai dijalankan sejak pemilu tahun 2009 sehingga hal ini menjadi salah satu faktor mengapa para calon anggota legislatif pada pemilu selanjutnya yakni 2014-2024 mengandalkan jaringan mesin politik yang menysasar langsung kepada masyarakat. Tidak terkecuali seperti dinamika politik pemilihan legislatif 2024 di Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang dimana melalui sistem inilah masyarakat dapat memilih calon anggota perwakilanya secara langsung.

Para caleg seperti Desy Yusandi, dan Elli Silvia sebagai sosok yang penulis jadikan sebagai obyek dalam penelitian ini menuturkan bahwa dalam pencalonan mereka di pileg 2024 mereka melakukan upaya untuk membentuk mesin politik melalui jaringan sosial yang mereka punya. Desy Yusandi mengatakan bahwa timses yang dia bentuk terdiri dari 3 tingkatan yakni mulai dari tingkat RT/RW, Tingkat

Kelurahan hingga Tingkat Kecamatan. Struktur ini dimulai dari KORCAM (Penanggung Jawab Kecamatan) yang berkedudukan sebagai koordinator di lingkup wilayah Kecamatan Karang Tengah berkoordinasi langsung dengan caleg dan juga bendahara umum caleg, kemudian dibawah koordinator kecamatan, terdapat penanggung jawab kelurahan (PL) yang didampingi oleh tim logistik untuk mendeliver kebutuhan caleg untuk kampanye di tingkat bawah atau akar rumput serta tim *mobile* yang bergerak di akar rumput yang berada di wilayah RT dan RW.

Secara bagan , tim pemenangan yang dibentuk oleh Dsy Yusandi ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 4. 3 Struktur Mesin Politik Caleg Dsy Yusandi dalam Pileg DPRD Provinsi Banten Dari Dapil Banten 8**



*Sumber : Data Primer*

Desy Yusandi membentuk tim suksesnya secara mandiri. Artinya struktural mesin politik yang dibentuknya , berasal dari orang-orang yang berada disekitar caleg itu sendiri. Atau dalam kata lain , Caleg memilih dan merekrut langsung struktural tim suksesnya. Berdasarkan bagan struktur diatas, dapat diketahui bahwa , orang-orang yang masuk dalam struktur timses desy yusandi tersebar mulai dari tingkat kecamatan , kelurahan hingga tingkat RT/RW. Desy Yusandi juga menambahkan bahwa pembentukan tim sukses secara mandiri menurutnya lebih menghemat dari segi biaya. Namun , hal ini juga sebagai bentuk peluang positioning Desy Yusandi untuk memperoleh suara pada wilayah dengan basis masa yang besar seperti yang ada di Kecamatan Karang Tengah , Kelurahan Karang Mulya Kota Tangerang ini.

“Tim sukses saya bentuk sendiri, dari orang-orang saya sendiri, ini sih lebih efisien dari segi budget yang dikeluarkan, karena sainganya juga satu partai terus kita posisikan di wilayah-wilayah dengan basis masa yang besar , seperti salah satunya ya di Karang Tengah itu , kalo untuk koordinator tingkat kota itu kurang signifikan terlalu luas , jadi langsung tingkat kecamatan , jadi yang tingkat kota karena saya nyalon di provinsi , langsung ke saya seperti itu saja” (Wawancara Dessy Yusandi 12 Juni 2024)

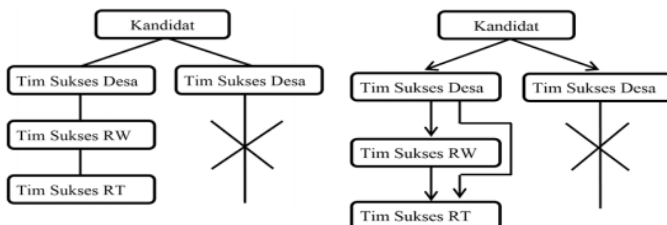
Tidak jarang , Desy Yusandi aktif melakukan koordinasi langsung dengan Penanggung Jawab Kelurahan (PL), sebab, seperti yang diungkapkan oleh Dsy Yusandi

sendiri bahwa , fokus untuk tim ses ini difokuskan ke wilayah-wilayah dengan potensi suara yang besar. Wilayah Kelurahan Karang Mulya merupakan salah satu wilayah Kelurahan yang memiliki potensi suara yang besar, sehingga dalam melakukan komunikasi dengan jaringan tim sukses, caleg memfokuskan ke wilayah-wilayah dibawah penanggung jawab Kelurahan yakni mereka yang berada di wilayah RT/RW. Hal ini menurut apa yang diungkapkan oleh Desy Bahwa, mesin politik di tingkat RT/RW inilah , yang disebar secara merata karena mereka yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Apa yang dijabarkan tersebut secara tidak dapat kita analisa bahwa struktur pelaksana inti dari tim sukses yang disusun oleh caleg adalah mereka yang direkrut secara mandiri oleh caleg di struktural Kelurahan, hingga RT/RW. ini seperti apa yang dijabarkan oleh Tawakkal , dkk (2020) bahwa perekrutan tim sukses yang dilakukan oleh caleg , dengan memilih oleh orang-orang di level kelurahan. kemudian orang-orang yang bertindak sebagai penanggung jawab kelurahan inilah yang meneruskan tugas caleg untuk merekrut orang-orang yang berada di wilayah RT/RW. Dengan Demikian struktur utama tim pelaksana kampanye ini disusun secara berjenjang. Dengan alur komunikasi yang dibentuk juga sama yakni, tim di tingkat RT/RW dapat berkomunikasi langsung dengan penanggung jawab

kelurahan atau (PL) Secara sederhana dapat digambarkan seperti bagan berikut :

**Gambar 4. 4 Struktur Mesin Politik Caleg Desy Yusandi dalam Pileg DPRD Provinsi Banten Dari Dapil Banten 8**



*Sumber : Tawakkal, dkk (2020)*

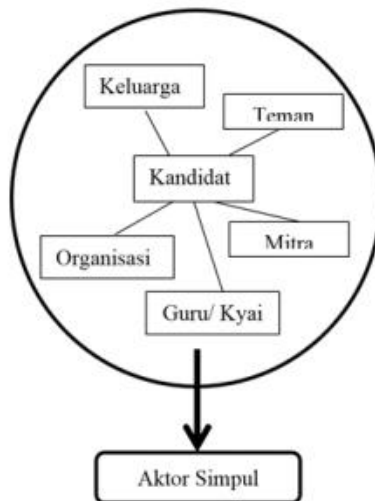
Para tim sukses di tingkat RT/RW ini dibentuk oleh caleg bertugas dengan menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, seperti kyai maupun ketua RT atau RW dengan mengambil peran sebagai para broker politik untuk menjalankan tugas mengkampanyekan Visi dan Misi Caleg di lapisan masyarakat di akar rumput (Adliima, 2021). Partai politik asal caleg sejatinya berperan sebagai wadah bagi caleg dalam pemilu legislatif. Akan tetapi dalam Pileg 2024 ,Di kelurahan Karang Mulya, Caleg yang akan memenangkan suara haruslah mereka yang populis di kalangan masyarakat sendiri.

Pelibatan tokoh-tokoh masyarakat , yang juga

merupakan jaringan pertemanan dari caleg sendiri ,secara tidak langsung turut memudahkan caleg untuk mendapatkan popularitas di masyarakat, sehingga apa yang menjadi misi mereka untuk meraup suara di wilayah tersebut juga lebih mudah mereka capai. Desy Yusandi sendiri menggunakan struktur tim pemenangan dengan pelibatan jaringan teman dan kerabat yang notabane mereka merupakan tokoh masyarakat. Sebagian dari mereka merupakan Ketua RT di wilayah Kelurahan Karang Mulya. Sebagian yang lain juga melibatkan tokoh agama dan jaringan sanak keluarga.

Mereka inilah yang menjadi aktor simpul dalam yang menjalankan kampanye caleg di wilayah Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang ini. pemanfaatan jaringan seperti jaringan keluarga, kekerabatan , tokoh masyarakat serta tokoh agama setempat , biasanya diperkuat di wilayah-wilayah yang juga menjadi tempat tinggal dari caleg yang bersangkutan. Meskipun Desy Yusandi bukan merupakan warga asli Karang Mulya , namun alasan lain yang lebih kuat mengapa membentuk mesin politik di Karang Mulya ini penting lebih kepada karena wilayah ini merupakan basis suara yang cukup banyak.

**Gambar 4. 5 Struktur Tim sukses mandiri dengan mengandalkan jaringan keluarga , teman dan mitra yang dilakukan Caleg**

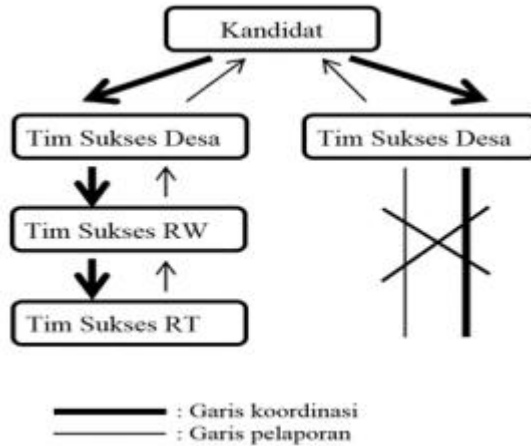


*Sumber : Tawakkal, dkk (2020)*

Secara koordinasi , dan pelaporan atas tugas kampanye yang jaringan ini lakukan , mereka melakukannya melalui sistem dua arah , sehingga garis komando pelaksanaan kampanye dan pendistribusian logistik untuk menunjang kampanye tersebut dilakukan oleh caleg sendiri kepada PJ Korcam , kemudian Korcam menurunkan ke masing-masing Penanggung Jawab Kelurahan (PL) , selanjutnya PL ini lah yang mendistribusikan kepada masing-masing tim mobile di tingkat RT/RW. Mereka inilah yang melaksanakan kampanye langsung kepada masyarakat secara *door to door*

untuk memenangkan suara caleg di wilayah tersebut.

**Gambar 4. 6 Alur Koordinasi dan Alur Laporan Tim Sukses Caleg pada Pemilihan Legislatif , yang digunakan juga oleh Desy Yusandi**



*Sumber : Tawakkal, dkk (2020)*

## B. Jenis – Jenis Politik Patronase Yang Terjadi Pada Pemilihan Legislatif 2024 di Kelurahan Karang Mulya

### B1. Praktik Politik Uang (Money Politic)

| Tahapan                   | Deskripsi   | Pihak Terlibat            | Tujuan dan Mekanisme  |
|---------------------------|---|---------------------------|---|
| <b>1. Pendataan Warga</b> | Pengumpulan data warga seperti NIK, Nomor KK, dan KTP sebagai indikasi dukungan | Broker, Warga, Tim Sukses | Broker mendatangi rumah warga untuk mengumpulkan data, membentuk daftar pemilih |

|                                    |  |                                       |  |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
|                                    | terhadap calon kandidat.   |                                       | yang akan memberikan suara kepada calon tertentu.  |
| <b>2. Pembuatan Daftar Pemilih</b> | Penyusunan daftar pemilih yang bersedia memilih berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. | Broker, Koordinator Lapangan (Korlap) | Warga yang memberikan data merasa ada hubungan timbal balik dengan calon. Koordinator lapangan membuat daftar untuk mencocokkan dengan calon penerima suara. |

|                          |  |                             |   |
|--------------------------|--|-----------------------------|---|
| <b>3. Pembagian Uang</b> | Pembagian uang (dikenal sebagai "serangan fajar") kepada pemilih yang telah didata untuk memastikan mereka memilih calon tertentu. | Tim Sukses, Broker, Pemilih | Uang diberikan melalui amplop pada H-1 pemilihan. Nominal uang bervariasi berdasarkan status dan posisi sosial warga. |
|--------------------------|--|-----------------------------|---|

Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan memberikan imbalan materi atau dapat juga diartikan sebagai jual-beli suara dalam proses politik dan kekuasaan, serta tindakan membagi-bagikan uang, baik dari sumber pribadi maupun partai, untuk mempengaruhi suara pemilih (Kumolo, 2015). Ini juga bisa diartikan sebagai semua tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang agar menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu, atau dengan sengaja menerima atau memberikan dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu. Dalam penelitian ini, jenis politik uang yang akan penulis kaji

adalah pembelian suara (vote buying). Pembelian suara (vote buying) adalah pemberian imbalan materi kepada seorang individu atau keluarga yang memiliki hak pilih pada hari pemungutan suara atau beberapa hari sebelumnya.

Praktik politik uang di Indonesia sudah dianggap lumrah, sehingga masyarakat tidak menyadari bahaya-bahaya yang muncul akibat praktik-praktik politik uang ini. Masyarakat membiarkan tindakan tersebut karena mereka tidak merasa bahwa secara normatif, politik uang harus dihindari. Akibatnya, semua itu berlangsung seperti hal yang wajar. Meskipun politik uang jelas terjadi dan diakui oleh kalangan masyarakat, tidak ada protes yang muncul. Selama proses wawancara, penulis menemukan data adanya praktik politik uang berupa pembelian suara (vote buying) pada pemilihan legislatif 2024 dikelurahan karang mulya. Dari beragam data mengenai adanya politik uang berupa pembelian suara (vote buying), penulis memetakannya menjadi tiga bentuk yaitu (1) pendataan warga oleh broker dengan mengumpulkan NIK dan Nomor KK yang dilakukan oleh broker, (2) Broker membuat list para pemilih yang bersedia menerima politik uang, (3) proses pemberian uang kepada warga kelurahan karang mulya :

### **1. Pendataan Warga Oleh Broker**

Berkaitan dengan politik uang, ada keragaman informasi tentang politik uang itu. Informan pertama

yang penulis temui bernama Bapak Usman seorang ojek online . Bapak Usman menyampaikan bahwa:

“Kalau masa pileg gini pasti ada uangnya neng, ibaratnya caleg berlomba lomba ngasih banyak-banyakan. Jadi Sudah hal yang wajar kalo pas pileg itu ada uang yang diberikan. Makanya masyarakat ga ngerasa kalo itu hal yang salah. Soalnya disini sudah biasa hal seperti itu, kalo ga ada uang malah jadi omongan warga.” (Wawancara Usman 21 April 2024).

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Amin bahwa: “Politik uang pasti selalu ada ketika masa pileg ini. Jika hal itu (politik uang) ingin dihilangkan sangat susah, karena pileg dengan politik uang biasanya saling berkaitan disini. Sedikit banyak uang yang diberikan masyarakat justru menantikan hal itu (diberi uang) dari para calon kandidat.” (Wawancara Amin 21 April 2024).

Informasi lain tentang politik uang yang disampaikan oleh Ibu Munah bahwa: “Uang masih berjalan di kelurahan karang mulya menjelang pemilu, meskipun penyebarannya tidak merata (karena setiap calon kandidat mempunyai daerah wilayah tujuannya masing-masing). Warga biasanya sudah hafal dengan tim sukses para calon dan mengode- ngodekan serangan

fajar ke si tim sukses tersebut (wawancara Munah 21 April 2024).

Dalam mekanisme pemberian uang, terdapat beberapa syarat yang harus dikumpulkan sebagai data untuk menjadi tanda bahwa warga akan memilih sesuai yang memberikan mereka uang. Data tersebut berupa NIK, Foto KTP, dan tanda tangan dikumpulkan kepada tim sukses.

Informasi lain bernama Ibu Ida mengatakan bahwa: “Politik uang masih ada, dan biasanya setiap rumah mendapatkan satu amplop dari salah satu calon kandidat, dengan syarat mengumpulkan KTP untuk didata sebagai pemilih yang akan mendukung calon kandidat yang telah memberi uang.” (wawancara Ida 21 April 2024).

Penulis juga menemui salah seorang yang berperan sebagai broker di kelurahan Karang Mulya bernama Bapak Asbi . Bapak Asbi merupakan broker dari salah satu kandidat pada pemilihan legislatif DPRD Provinsi Kota Tangerang 2024 yang memiliki cukup pengaruh di wilayahnnya pak asbi sendiri merupakan ketua PMII sekecamatan karang tengah, ketua badan musyawarah masyarakat (bamus) kota tangerang sekecamatan karang tengah, dan salah satu ketua RW di kelurahan karang mulya. Hasil wawancara dari Bapak Asbi yaitu sebagai

berikut: “Saya jadi tim suksesnya Pak Sarmilih (calon kandidat nomor 2 partai persatuan pembangunan (PPP) ), adik pak sarmilih merupakan teman saya oleh karena itu adik pak sarmilih menawarkan apakah bang asbi bersedia menjadi tim sukses kakak saya (pak sarmilih). Dengan arahan dari adik pak sarmilih, saya mulai menjalankan tugasnya sebagai broker, dimulai dari mengumpulkan nama korlap per TPS atau rt rw yang mau ikut serta membantu menjadi koordinator diwilayahnya, tapi saya hanya memegang kelurahan karang mulya saja yaa neng Untuk wilayah lain lagi saya tidak tau menau bagaimana sistemnya. Dimulai dari RW saya yaitu RW07 ada 4 RT dan kebetulan empat”nya mau dijadikan koordinator diwilayahnya, setelah itu saya menawarkan sanak saudara yang ada diwilayah rw dan rt lain Kebetulan kalau orang betawi memang saudara dimana-mana jadi saya enak bisa menawari saudara-saudara.

Setelah itu perorang dibudget neng, dikasih nominal segini- segini dan ditargetkan dapat berapa pemilih. Lalu saya infokan untuk diminta ktp dan tidak lupa membuaat list nama dan ttd untuk saya setorkan nanti kepihak bapak sarmilih. Untuk Nominal diwilayah saya sendiri saya membagikan 50 ribu perorang, tetapi beda lagi untuk para tokoh masyarakat saya bagikan per

orang itu 200ribu. (wawancara Robi Asbi 21 April 2024).

Luasnya jaringan yang dimiliki seorang broker dapat mempermudah mendapatkan dukungan pemilih. Hal ini dikarenakan dalam pencatatan data pemilih, broker lebih tahu kondisi masyarakat yang ada di wilayahnya. Pak Asbi mendapatkan tugas sebagai broker di wilayah kelurahan karang mulya. Dalam melakukan tugasnya, Pak Asbi melakukan pencatatan data tersebut dengan cara mendatangi rumah warga di wilayah RW yang beliau pimpin yaitu RW 07. Sementara itu, di RT lain ada koordinator lapangan (korlap) yang masing-masing RT mendapat satu orang yang dipercaya untuk mencatat data warga. Data itu kemudian dikumpulkan di rumah Pak Asbi. Dan untuk wilayah di rw lainnya pak asbi mengandalkan sanak saudaranya.

Hasil yang diperoleh dari data di lapangan mengenai adanya politik uang dalam pemilihan legislatif DPRD provinsi kota Tangerang 2024 menunjukkan bahwa politik uang masih ada dan berjalan. Dengan strategi pengumpulan data seperti paparan di atas menunjukkan bahwa suara pemilih bisa diukur melalui seberapa banyak data yang terkumpul. Dengan demikian, kandidat bisa memperkirakan model

strategi yang digunakan agar memperoleh suara pemilih sebanyak-banyaknya. Kandidat juga menggunakan jaringan perantara (broker) untuk mengorganisir kampanye dan menyampaikan informasi tentang profil mereka kepada pemilih.

Suburnya politik uang ketika musim pemilihan legislatif membuat warga merasa senang, karena pemilihan legislatif yang dijadikan ajang untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya dari kandidat membuat masyarakat lupa dari tujuan pemilihan yang sebenarnya. Sikap dari masyarakat tersebut menjadikan kandidat yang mempunyai sedikit dana sulit untuk mendapatkan suara pemilih, karena mereka menganggap bahwa visi misi tanpa uang tidak akan berhasil memberikan suara yang maksimal. Oleh karena itu, jarang sekali kandidat yang hanya mengandalkan kampanye tanpa pemberian uang. Pada awal pencalonan, kandidat yang idealis tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak menggunakan uang sewaktu pilkada. Namun demikian, menjelang hari pemilihan, di lapangan ditemukan bahwa kandidat lain menggunakan politik uang sebagai strategi untuk mendapatkan suara pemilih. Hal itulah yang membuat kandidat yang idealis tadi akhirnya menggunakan politik uang demi memperoleh suara pemilih.

Berdasarkan informasi dari kelima informan di atas, ada kesamaan sudut pandang dengan teori patronase yang membahas hubungan patron-klien juga terdapat hubungan resiprositas yang memiliki nilai dalam kehidupan sosial. Pada dasarnya, norma resiprositas dalam hubungan patron-klien memiliki prinsip bahwa orang harus membantu mereka yang pernah membantunya atau setidaknya jangan sampai merugikan (Scott, 1989:255). Norma resiprositas dalam hubungan ini di dalam masyarakat tradisional dijadikan sebagai landasan struktur persahabatan dan persekutuan.

Warga merasa yakin untuk memilih calon kandidat yang memberikan uang, karena hal tersebut dianggap sebagai bentuk timbal balik dari warga dengan menyerahkan data berupa KTP. Pemberian uang yang dilakukan secara terstruktur, seperti di kelurahan Karang mulya, dianggap sebagai metode yang cukup efektif oleh tim sukses, karena mereka mengikat warga secara sosial untuk menunjukkan rasa timbal balik atas uang yang diberikan. Data yang telah dikumpulkan (berupa KTP) diserahkan kepada korlap setempat untuk memperkirakan jumlah amplop yang disebar dan persentase suara yang akan didapatkan pada hari pemilihan. Dengan demikian, tim sukses dan calon

kandidat dapat memperkirakan jumlah suara yang akan diperoleh dari seberapa banyak data yang terkumpul, sehingga strategi yang digunakan bisa lebih dioptimalkan untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya.

Berdasarkan hasil wawancara, alur pendataan untuk memperoleh suara pemilih dimulai dengan mendatangi rumah warga, kemudian mengumpulkan NIK dan NKK serta nomor HP. Data-data yang telah terkumpul dicatat dan direkapitulasi menjadi daftar pemilih yang akan mencoblos calon kandidat yang telah menerima data mereka. Kegiatan mengumpulkan KTP yang dilakukan oleh broker kepada warga menciptakan hubungan personal. Warga yang didatangi rumahnya untuk dimintai data merasa tidak enak jika tidak memberikan data.

Hal ini membuat warga akan memilih kandidat yang telah meminta data mereka, karena mereka merasa sudah mendapat kepercayaan dari broker untuk memilih calon kandidat yang direkomendasikan oleh broker.

Hubungan personal antara seseorang dengan kandidat merupakan hubungan yang bersifat langsung dan intensif, yang menyebabkan hubungan tersebut tidak hanya bermotifkan keuntungan, tetapi juga mengandung unsur perasaan yang biasa terdapat dalam

hubungan pribadi. Hubungan yang mengandung unsur perasaan ini menimbulkan rasa saling percaya dan keakraban antara warga dan kandidat, sehingga ikatan emosional masing-masing pihak semakin kuat, dan hubungan patron-klien seperti ini sulit untuk diputuskan.

## **2. Pembagian Uang**

Berkaitan dengan pendistribusian uang menjelang pemilihan legislatif, beberapa tim sukses dari salah satu kandidat yang penulis temui memberikan banyak informasi terkait pendistribusian uang ketika menjelang pilkada. Salah satu tim sukses yang penulis temui bernama Bapak Uti. Bapak Uti merupakan salah satu ketua tim kampanye kandidat no 2 dari partai PAN . Bapak Uti mengatakan bahwa:

“Strategi utama kandidat nomor 2 (dua) Partai Amanat Nasional (PAN) dalam upaya untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya yaitu dengan lebih turun kemasyarakat, Kandidat no 2 yang saya pegang mulai turun kemasyarakat 2 bulan sebelum pemilihan dengan judul bersilaturahmi dan mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat seperti membuat ikatan hati atau emosional dengan masyarakat. Biasannya dalam sehari bisa 2-3 kelurahan yang kita datangi. Setelah itu masyarakat yang datang mengisi

nama dan ttd. Ditengah-tengah acara silaturahmi ini tidak lupa kandidat calon menyerempet dengan mempromosikan dirinya untuk mencoblos pada saat pemilihan. Kemudian sepulang dari acara menjalin silaturahmi ini masyarakat diberi amplop yang berisikan uang sebesar 50 ribu” (wawancara Sayuti 22 April 2024).

Wawancara lain yaitu dari bapak Zainuri sebagai salah satu tim sukses Kandidat no 1 partai golongan karya (golkar) tingkat kelurahan mengatakan bahwa “Dalam pemilihan anggota legislatif DPRD tingkat provinsi, pembentukan tim sukses kami sangat terstruktur, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga tingkat RT. Setiap tim sukses mendapat tugas masing-masing sesuai dengan wilayah yang dibagi. Penyebaran amplop pada H-1 sebelum hari pemilihan sudah diatur strateginya melalui pertemuan (briefing). Jumlah uang yang dibagikan dari kandidat sama, kemudian didistribusikan melalui broker di tempat-tempat yang menjadi target. Setelah itu, broker memiliki hak penuh dalam membagikan uang, dan di sinilah kecurangan dimulai. Beberapa broker yang ingin mengambil keuntungan dari pemilihan membuka amplop yang berisi uang, mengambil sebagian, dan menggantinya dengan amplop baru yang nominalnya

berbeda. Hal ini sebenarnya sudah diketahui oleh para tim sukses; broker mengurangi jumlah nominal uang untuk kepentingan pribadi. Untuk mengantisipasi hal ini, tim sukses membagi koordinator setiap RT hanya memegang 40 amplop untuk mengurangi kecurangan dan meningkatkan efisiensi waktu dalam proses penyebaran amplop (wawancara Zainuri 22 April 2024).

Dengan demikian, uang tetap menjadi faktor yang cukup berpengaruh di kalangan Masyarakat kelurahan karang mulya dalam menentukan pilihan saat pemilihan legislatif. Uang adalah salah satu sumber daya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi acuan dalam setiap transaksi atau manuver individual, serta sebagai alat tukar. Uang merupakan salah satu faktor penting yang berguna untuk mempengaruhi personal seseorang dan mengendalikan wacana strategis terkait kepentingan dalam politik dan kekuasaan. Pada dasarnya, politik adalah seni di mana seseorang bebas mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi atau kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai cara, termasuk uang. Keberhasilan vote buying sangat bergantung pada peran broker. Jika broker hanya mencari keuntungan pribadi, vote buying akan gagal karena uang tidak sampai ke

pemilih. Namun, jika broker adalah kader partai yang loyal dan berintegritas, praktik vote buying akan berhasil. Hal ini disebabkan oleh perbedaan strategi yang digunakan oleh masing-masing broker. Beberapa broker langsung mendatangi rumah warga, sementara yang lain menggunakan tokoh masyarakat untuk membagikan uang kepada warga.

Strategi pemenangan yang digunakan kandidat dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu strategi personalistik dan strategi materialistik. Pengelompokan ini didasarkan pada dua paradigma pemenangan pemilihan yang berkembang di kalangan calon kandidat. Pertama, paradigma personalistik yang berpendapat bahwa orang cenderung memilih calon kandidat yang mereka kenal, terutama jika ada hubungan personal. Semakin dekat hubungan antara calon kandidat dan pemilih, semakin besar kemungkinan calon tersebut terpilih. Kedua, paradigma materialistik yang berpendapat bahwa orang cenderung memilih kandidat yang paling menguntungkan bagi diri mereka. Keuntungan instan yang paling bisa dinikmati dalam konteks pilkada adalah keuntungan materiil, baik berupa uang, barang, atau jasa. Paradigma ini menekankan bahwa pilihan ekonomi seseorang sangat menentukan kehidupannya.

Kelurahan Karang Mulya yang merupakan wilayah di kawasan perkotaan ternyata masih menjadi target beberapa calon kandidat untuk membagikan uang pada masa pemilihan legislatif. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan politik uang merasa hal tersebut sudah tidak asing, karena setiap ada pemilu biasanya ada uang yang dibagikan juga. Beberapa orang bahkan merasa senang menjelang pemilu, melihatnya sebagai kesempatan untuk mendapatkan uang secara sukarela. Ada juga yang berpendapat bahwa uang yang mereka terima itu sebagai pengganti penghasilan, karena pada saat pemilu mereka libur kerja.

Berdasarkan Hasil wawancara- wawancara diatas, terlihat bahwa praktik politik uang tidak dilakukan sekaligus, melainkan melalui beberapa mekanisme untuk mencapai target yang diinginkan. Dari pengumpulan data hingga tahap akhir yaitu pemberian uang kepada warga, peran tim sukses dan broker sangat menentukan jumlah suara yang diperoleh saat pemilihan legislatif. Selama persiapan, tim sukses dan broker lebih memahami kondisi lapangan, sehingga mereka mengetahui strategi efektif untuk pembagian uang agar sesuai dengan target. Hal ini juga diawasi oleh tim sukses wilayah. Mereka tetap memantau dan memberikan pengarahan sebelum tim sukses di tingkat

kecamatan dan keluarahan terjun ke lapangan, sesuai dengan pedoman dari partai dan calon kandidat, untuk menghindari kecurangan tim sukses dalam menjalankan tugas di lapangan.

Politik uang biasanya dikaitkan dengan masalah suap-menyuap untuk memenangkan salah satu kandidat dalam pemilihan. Namun, jika dilihat lebih luas, politik uang juga mencakup berbagai pelanggaran yang berkaitan dengan dana dalam konteks politik (termasuk masalah kepartaian dan pemilu). Yang paling menonjol adalah kecurangan melalui penyuaipan.

Berdasarkan hasil wawancara, politik uang dapat terjadi karena kedua belah pihak (calon kandidat dan pemilih) sama-sama memungkinkan hal itu. Jika masyarakat tidak bersedia menerima politik uang, maka calon kandidat juga tidak akan menggunakannya sebagai strategi. Mengubah cara pandang masyarakat terkait pemilu dapat dilakukan secara perlahan. Masyarakat bisa memilih kandidat berdasarkan visi dan misi yang disampaikan, mengenali kandidat, dan mengakses informasi mengenai profil dan asal partai kandidat melalui baliho maupun internet. Hal ini dapat mengurangi indikasi politik uang, karena jika masyarakat menyadari pentingnya hal tersebut, kandidat akan berpikir ulang sebelum menggunakan politik uang.

Wawasan masyarakat yang luas dan tidak mudah terpengaruh oleh uang untuk lima tahun ke depan akan mendorong kandidat bersaing secara sehat dan kritis untuk memenangkan suara rakyat. Dengan demikian, dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin, mereka akan lebih bersungguh-sungguh sesuai visi dan misi yang disampaikan, karena mencapai posisi tersebut tidak hanya dengan uang, tetapi dengan tekad untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Strategi politik uang yang dilakukan dalam tiga tahap untuk memenangkan suara pemilih merupakan hal yang sudah biasa terjadi di Kelurahan Kasepuhan. Strategi politik sering digunakan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan, terutama saat pemilihan umum. Strategi ini berkaitan dengan strategi kampanye, yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara meraih suara maksimal saat pemilu, guna mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah pada perubahan masyarakat (Schroder, 2009:7).

## **B.2 *Individual Gift (Pemberian Pribadi)***

Pemberian pribadi atau individual gifts merujuk kepada praktik pribadi memberikan hadiah kepada pemilih untuk mendukung pembelian suara (*vote buying*) yang lebih terorganisir. Biasanya, praktik ini

dilakukan saat bertemu dengan pemilih, baik saat kunjungan ke rumah-rumah maupun selama kampanye. Kadang-kadang, pemberian ini diatur oleh tim kampanye. Hadiah-hadiah semacam ini sering kali berupa barang-barang kecil seperti kalender, gantungan kunci, payung, kaos, dan lain-lain yang memuat nama kandidat. Contoh lainnya termasuk bahan makanan atau sembako (Aspinall & Sukmajati, 2015, hal. 25). Berikut ini penulis melakukan wawancara menemui beberapa masyarakat. Pertama wawancara oleh ibu ida seorang ibu rumah tangga, ibu ida mengatakan :

“ Kalau masa pemilihan seperti ini pasti banyak neng yang memberikan sembako, kemarin saya mendapatkan sembako berupa beras dari bapak sarmilih caleg dari partai PPP mendapatkan beras yang didalam bingkisannya disertai dengan selebaran foto beliau dan no urut beliau. Dapatnya juga gacua sekali neng beberapa kali saya dapati setelah beras dua minggu setelahnya dapat minyak dan sabun cuci piring. Setelah itu terakhir menjelang pemilihan dapat uang sebesar 50.000”. (Wawancara Ida 25 April 2024 ).

Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa pemberian pribadi dalam bentuk barang dan uang tunai adalah bagian dari strategi politik uang yang digunakan oleh kandidat untuk menarik dukungan pemilih. Praktik ini

tidak hanya melibatkan pemberian satu kali, tetapi sering kali berulang, terutama menjelang hari pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik vote buying dalam bentuk barang dan uang tunai masih menjadi strategi umum yang digunakan oleh para calon kandidat untuk mengamankan suara pemilih. Selanjutnya wawancara oleh Bapak Alung, seorang pedagang sayur, mengatakan bahwa :

"Kemarin saya sempat dapat bantal dari Ibu Dessy, (caleg partai Golkar nomor urut 1). Tapi tidak hanya bantal, istri saya yang ikut pengajian bersama Ibu Dessy juga mendapat dompet kecil dan mukena, sedangkan anak-anak diberi bola mainan. Saya terima saja karena namanya dikasih, pasti terima saja." (Wawancara Alung 25 April 2024).

Dari wawancara ini, terlihat bahwa pemberian hadiah dalam bentuk barang seperti bantal, dompet kecil, mukena, dan bola mainan juga digunakan sebagai strategi untuk menarik dukungan pemilih. Pemberian hadiah semacam ini tidak hanya ditujukan kepada individu tetapi juga mencakup anggota keluarga lainnya, menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mempengaruhi pilihan pemilih melalui pemberian barang.

Pemberian pribadi dalam bentuk barang dan uang

tunai merupakan bagian dari strategi politik uang yang masih sering digunakan oleh para calon kandidat. Praktik ini dilakukan dengan cara yang terorganisir dan berulang, terutama menjelang hari pemilihan, dengan tujuan untuk mengamankan dukungan suara dari pemilih.

### **B.3 Club Good (Pemberian Kelompok)**

Setelah pemberian hadiah individu, bentuk lain dari politik uang berupa barang adalah barang kelompok (club goods). Barang-barang kelompok ini merupakan praktik patronase yang diberikan untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu daripada untuk keuntungan individu. Jenis barang yang dibagikan termasuk perlengkapan ibadah, peralatan olahraga, alat musik, sistem suara, tenda, peralatan pertanian, dan sejenisnya (Aspinall & Sukmajati, 2015, hal. 27). Berikut ini penulis melakukan wawancara menemui beberapa tokoh masyarakat. Pertama wawancara yang dilakukan yaitu oleh dengan Ibu Muhayah (Ustadzah dan Pengurus Majelis Taklim) :

“Dalam masa kampanye ini, kami menerima beberapa sumbangan dari calon kandidat. Untuk majelis taklim, kami mendapat perlengkapan ibadah seperti mukena dan sajadah dari calon nomor urut 1 partai golkar yaitu ibu dessy yusandi. Sumbangan ini sangat

bermanfaat bagi kegiatan kami sehari-hari di majelis. Kami juga mendapatkan sound system yang sering kami gunakan saat ada pengajian atau acara besar tetapi untuk sound system sendiri banyak dari ibu-ibu termasuk saya sendiri memang request untuk dibelikan sound system.

Saya pribadi sangat bersyukur dengan bantuan ini karena memudahkan kegiatan kami. Namun, saya juga paham bahwa pemberian ini adalah bagian dari upaya mereka untuk menarik dukungan dari kami.” (Wawancara Muhayah 28 April 2024).

Selanjutnya Wawancara dengan Pak RW 07 menambahkan:

”Bantuan dari calon kandidat biasanya berupa barang-barang yang dapat digunakan oleh banyak orang, seperti tenda besar untuk acara-acara warga dan peralatan musik untuk karang taruna. Barang-barang ini sangat berguna untuk mendukung berbagai kegiatan warga, mulai dari acara keagamaan hingga kegiatan sosial lainnya. Kami merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan ini, karena sering kali dana dari pemerintah.” (Wawancara Robi Asbi 27 April 2024).

Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa pemberian barang kelompok atau club goods merupakan bagian dari strategi politik uang yang digunakan oleh kandidat untuk menarik dukungan dari kelompok sosial

tertentu. Praktik ini tidak hanya melibatkan pemberian satu kali, tetapi sering kali berupa barang-barang yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa praktik vote buying dalam bentuk barang kelompok masih menjadi strategi yang umum digunakan oleh para calon kandidat untuk mengamankan suara pemilih. Dengan demikian, pemberian barang-barang kelompok dalam konteks politik uang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga menimbulkan kesadaran bahwa ada motif politik di balik pemberian tersebut. Masyarakat yang menerima bantuan diharapkan tetap kritis dan bijak dalam memilih kandidat, tidak hanya karena bantuan yang diberikan, tetapi juga berdasarkan visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan oleh calon kandidat.

#### **B.4 Services and Activities**

Pelayanan dan aktivitas (*services and activities*) adalah suatu penyediaan atau pembiayaan beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. Di forum ini, para kandidat biasanya mempromosikan dirinya. Tidak sedikit juga kandidat yang membiayai beragam pelayanan untuk masyarakat, contohnya pelayanan

kesehatan gratis (Aspinall & Sukmajati, 2015, hal. 26). Berikut ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat untuk mendapatkan perspektif lebih mendalam mengenai praktik politik uang dalam bentuk jasa atau fasilitas.

Wawancara pertama dilakukan dengan Pak H. Syafi'i (lurah karang mulya). Pak Lurah mengatakan:

“Selama masa kampanye, beberapa kandidat sering kali menawarkan bantuan untuk membiayai berbagai kegiatan masyarakat. Contohnya, ada kandidat yang menyediakan layanan kesehatan gratis untuk warga. Dan biasanya pengobatan gratis pun diadakan diposyandu terdekat yang ada dikelurahan tentunya. Ini sangat membantu, terutama bagi mereka yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. Selain itu, ada juga yang mendanai acara-acara perayaan dikelurahan, seperti peringatan hari kemerdekaan. Bantuan ini tentu sangat bermanfaat bagi warga, tetapi kita harus tetap waspada terhadap motif di baliknya.” (Wawancara Syafi'i 29 April 2024).

Dari wawancara dengan Pak Lurah Syafi'i, terlihat bahwa praktik politik uang dalam bentuk jasa atau fasilitas dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, namun tetap ada kekhawatiran terkait motif di balik pemberian bantuan tersebut.

Wawancara terakhir dilakukan dengan kak ibnu, ketua karang taruna setempat. Kak ibnu menjelaskan:

“Kemarin masa kampanye ada Beberapa kandidat tiba-tiba saja menawarkan bantuan untuk membiayai acara-acara karang taruna, meskipun hari kemerdekaan masih beberapa bulan tetapi dimasa kampanye kemarin sudah ada calon yang ingin membiayai dengan syarat saya sebagai ketua mengkoordinir anggota karang taruna saya memilih kandidat tersebut. Bantuan ini tentu sangat membantu, karena kita sering kesulitan mencari dana untuk mengadakan acara-acara tersebut. Namun, kita juga harus memastikan bahwa bantuan ini tidak mengikat kita untuk memberikan dukungan politik secara langsung kepada kandidat tersebut.”

Dari wawancara dengan kak ibnu, jelas bahwa bantuan dalam bentuk jasa atau fasilitas dapat membantu mengatasi keterbatasan dana untuk kegiatan komunitas, tetapi penting untuk menjaga independensi dalam memberikan dukungan politik.

Secara keseluruhan, dari wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, dapat dilihat bahwa praktik politik uang dalam bentuk jasa atau fasilitas masih umum terjadi dan memiliki dampak signifikan bagi komunitas. Praktik ini tidak hanya bertujuan

untuk memenangkan suara pemilih, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, penting untuk tetap waspada terhadap kemungkinan adanya agenda politis di balik pemberian bantuan tersebut.

### ***B.5 Pork Barrel***

Setelah *services and activities*, bentuk lain politik uang yang berupa jasa atau fasilitas adalah *pork barrel* yang berupa *projects*. *Pork barrel projects* adalah proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Karakter utama dari *pork barrel* adalah bahwa kegiatan ini ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu (Aspinall & Sukmajati, 2015, hal. 29).

Wawancara pertama dilakukan dengan Ibu Eva (Ibu Rumah Tangga). Ibu Eva mengatakan:

"Fasilitas yang paling terasa berasal dari Ibu Ella, yang telah menjabat selama dua periode. Lampu penerangan jalan di depan gang dipasang pada awal periode keduanya. Namun, baru-baru ini menjadi bahan pembicaraan masyarakat karena setelah sebulan pemilihan, lampu jalan itu mati. Kabarnya, hal ini terjadi karena Ibu Ella kalah dalam pemilihan,"

(Wawancara Eva 5 Juni 2024).

Penuturan Ibu Eva ini menggarisbawahi sifat sementara dari beberapa pork barrel projects yang sering kali muncul menjelang pemilihan dan kemudian menghilang setelah hasil pemilihan diketahui. Dalam kasus ini, lampu penerangan jalan yang sangat membantu warga pada awalnya, namun kemudian mati setelah sebulan karena kandidat yang menjanjikan fasilitas tersebut kalah dalam pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa sementara pork barrel projects dapat memberikan manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat, keberlanjutannya sering kali dipertaruhkan oleh dinamika politik. Janji-janji seperti ini, meski sangat menguntungkan dalam jangka pendek, bisa menjadi tidak berarti jika tidak ada komitmen jangka panjang dari para kandidat atau jika mereka gagal memenangkan pemilihan.

Wawancara kedua, dilakukan oleh Ibu Tika (Seorang Guru SDN 01 Karang Mulya) Ibu Tika Mengatakan :

" Untuk Calon Legislatif yang menawarkan fasilitas atau jasa- jasa semacam itu emang ada neng kemarin ituu jalanan dekat sekolah itukan memang sudah lama rusak. Lubang-lubangnya besar dan kalau hujan, jalanan jadi sangat becek dan berbahaya bagi anak-anak yang pergi ke sekolah. Beberapa bulan sebelum

pemilihan, calon anggota legislatif, Bapak Sarmilih, datang dan berjanji akan memperbaiki jalan tersebut. Tidak lama setelah itu, tim Bapak Sarmilih mulai bekerja memperbaiki jalan. Prosesnya cepat dan terorganisir dengan baik. Aspal jalan di dekat sekolah itu diperbaiki, dan sekarang jalannya mulus dan aman untuk dilewati. Perbaikan ini juga dilakukan atas izin RT dan RW setempat. Bahkan, Pak RW ikut memantau perbaikan jalan tersebut setiap hari. Beliau selalu hadir untuk memastikan pekerjaan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan rencana. Keberadaan Pak RW di lokasi perbaikan memberikan rasa percaya kepada masyarakat bahwa proyek ini bukan hanya janji kampanye semata. Kami sangat senang dan berterima kasih karena jalan yang dulu rusak sekarang sudah bagus. Anak-anak bisa pergi dan pulang sekolah dengan lebih aman. Tindakan nyata seperti ini membuat kami merasa bahwa Bapak Sarmilih benar-benar peduli dengan kesejahteraan kami. Perbaikan jalan ini sangat mempengaruhi pandangan kami terhadap Bapak Sarmilih dalam pemilihan. Banyak di antara kami yang merasa termotivasi untuk mendukungnya karena melihat hasil nyata dari perbuatannya. Kami berharap agar tindakan nyata seperti ini terus berlanjut, bukan hanya saat mendekati

pemilihan, tetapi juga setelahnya. Kami butuh pemimpin yang terus peduli dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat sepanjang waktu." (Wawancara Tika 2 Juni 2024)

Narasi dari Ibu Tika menambahkan perspektif lain tentang bagaimana *pork barrel projects* berfungsi dalam konteks politik lokal. Sementara beberapa proyek mungkin menunjukkan sifat sementara dan manipulatif dari politik uang, pengalaman Ibu Tika menunjukkan bahwa tindakan nyata yang dilakukan dengan komitmen dan pengawasan yang baik dapat menghasilkan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Keberhasilan proyek perbaikan jalan ini, yang didukung oleh izin dan pemantauan dari RT dan RW, menggarisbawahi pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam implementasi *pork barrel projects*, serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kandidat politik.

Secara keseluruhan, wawancara dengan Ibu Eva dan Ibu Tika memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika *pork barrel projects* dalam konteks politik lokal. Sementara proyek-proyek seperti lampu penerangan jalan yang dijanjikan oleh Ibu Ella menggarisbawahi kemungkinan sifat sementara dan

manipulatif dari politik uang, keberhasilan proyek perbaikan jalan yang dilakukan oleh Bapak Sarmilih menyoroti pentingnya komitmen, transparansi, dan pengawasan dalam pelaksanaan proyek-proyek semacam ini. Pengalaman ini menegaskan bahwa, meskipun pork barrel projects sering kali dikaitkan dengan upaya politik jangka pendek, tindakan nyata yang didukung oleh pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat membawa manfaat signifikan yang bertahan lama dan mempengaruhi pandangan publik terhadap kandidat politik. Keberhasilan proyek perbaikan jalan tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat tetapi juga memberikan contoh positif tentang bagaimana politik uang dapat diimplementasikan secara efektif dan bertanggung jawab.

### **C. Analisis Patronase Politik Dalam Pemilihan Legislatif 2024 Di Kelurahan Karang Mulya**

Pemilu yang dilakukan dengan sistem proporsional terbuka berdampak langsung pada meningkatnya perilaku caleg untuk memperoleh suara dari masyarakat melalui kampanye politik dengan menggunakan strategi politik uang. Meskipun tidak semua caleg mau mengakuinya secara terang-terangan namun, proses semacam ini memang benar terjadi dalam proses pemilu tidak terkecuali pemilihan legislatif.

Paragraf diatas secara langsung juga penulis temui ketika melakukan wawancara langsung dari Dessy Yusandi yang menyatakan bahwa dalam upaya memperoleh kemenangan untuk dirinya di pemilu legislatif 2024 ia berdalih tidak menggunakan politik uang. Namun, Dessy mengungkapkan bahwa apa yang diberinya hanyalah pemberian pribadi. Dessy mengatakan demikian dengan alasan bahwa dirinya sudah menang dua kali sebagai DPRD Provinsi Banten sehingga apa yang dilakukanya saat ini fokus pada penguatan emosional dengan masyarakat.

“Kalo untuk strategi pemenangan saya sebenarnya sudah dua periode menjadi anggota legislatif di Provinsi Banten. Jadi saat ini lebih kepada penguatan bonding emosional dengan masyarakat saja sih ya. Yang saya beripun hanya berupa pemberian pribadi seperti mukenah, sajadah, bantal maupun dompet kecil seperti itu saja” (Wawancara 12 Juni Dessy Yusandi 2024)

Serupa dengan Dessy, Ella Silvia juga melakukan hal yang sama. Hal ini diungkapkan oleh Sayuti yang merupakan salah satu timses Ella. Sayuti mengungkapkan bahwa Caleg dari PAN Tersebut juga menggunakan strategi memberikan barang kepada masyarakat berupa dompet kecil, baju, tempat minum dan sebagainya. Persis sama seperti apa yang diungkapkan Dessy, bahwa apa yang dilakukan Ella Silvia ini menurut Sayuti sebagai bentuk membangun ikatan dengan masyarakat. Bahkan sayuti menambahkan bahwa Ella Silvia sudah membentuk tim suksesnya sejak dua bulan sebelum pemilihan legislatif 2024

dimulai

Hasil temuan yang peneliti dapatkan bahwa para timses dari para caleg melakukan strategi dengan cara mengkoordinir para korlap di tingkat yang paling bawah yakni di tingkat RT. dari proses wawancara langsung kepada sumber primer baik Caleg, tim sukses, dan juga masyarakat menunjukkan bahwa dalam upaya memenangkan suara masyarakat di dalam kontestasi pemilihan legislatif 2024 terdapat indikasi adanya politik uang dan patron klien yang berperan dalam dinamika politik tersebut.

Dalam upaya memenangkan Desy Yusandi sebagai anggota dewan yang mana notabene yang bersangkutan juga merupakan mantan terpidana kasus korupsi, tim sukses sedikit memberikan penjelasan bahwa sang caleg memilih pendekatan kepada masyarakat dengan membagikan bantuan sembako seperti beras, minyak dan sabun cuci piring di wilayah kelurahan Karang Mulya Ini.

Apa yang sejatinya dilakukan ini merupakan salah satu bentuk Vote Buying yang dilakukan oleh caleg melalui tim suksesnya dalam upaya untuk meraup suara pemenang dalam pileg 2024. Dalam praktiknya transaksi yang dilakukan langsung maupun tidak langsung dengan memberikan barang-barang yang berasal dari caleg meskipun berdalih bahwa itu adalah pemberian pribadi, namun proses ini dilakukan tujuannya satu yakni meningkatkan interpersonal dari caleg itu sendiri

agar mendapatkan suara dari masyarakat. Vote Buying sendiri dapat dikategorikan kedepan dua bentuk yakni bentuk barang seperti apa yang telah disampaikan sendiri oleh caleg maupun bentuk uang (Alfaz & Suswanta, 2021)

“ Jadi gini saya dalam membantu Ibu Desy , pastilah tentunya ingin memenangkan suara masyarakat. Kami sih lebih memilih memberikan bantuan sembako ya seperti beras 2,5 kg, minyak dan sabun cuci piring per KK. Itu sebelumnya kita lakukan pendataan dulu ke masyarakat melalui ketua RT masing-masing karena kebetulan saya ketua RW jadi ya lebih mudah mengkoordinirnya” (Wawancara Tim Sukses 12 Juli 2024)

Data lanjutan diungkapkan bahwa dalam melaksanakan strategi tersebut, ia bersama dengan timses Sarmilih lainnya melakukan pembagian bantuan kampanye tersebut dalam 3 fase yakni pertama pembagian beras sebanyak 2,5 Kg tiap KK, kemudian dilanjutkan pembagian kedua yakni minyak dan sabun cuci piring yang dikemas berupa bingkisan yang didalamnya terdapat stiker foto caleg serta yang terakhir pemberian uang tunai sebesar Rp. 50. 000 - 250.000 untuk per kepala.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat indikasi bahwa dalam upaya meraih dukungan suara di Kelurahan Karang Mulya, Tim Sukses menerapkan strategi dengan memberikan sejumlah uang kepada konstituen dalam berbagai nominal mulai

dari Rp. 50.000 - Rp. 250.000 seperti yang tergambar dari informasi tim sukses Caleg dan juga Elli Silvia dari PAN. Caleg seperti Desy Yusandi pun selain memberikan memberikan barang seperti yang dilakukan Dessy dan juga Elli, ini semua pada dasarnya fenomena inisangat jelas masuk kategori Politik Uang (*Money Politic* ).

Seperti yang dikemukakan oleh Aspinall (dalam Huda,dkk 2022) bahwa seluruh praktik politik yang menggunakan uang ataupun barang dalam pelaksanaanya dengan tujuan untuk mengintervensi pengambilan keputusan , dikategorikan sebagai tindakan politik uang. Dalam konteks yang terjadi pada pemilihan legislatif 2024 di kelurahan Karang Mulya ini , para caleg melalui dan juga beserta tim suksesnya menysasar masyarakat akar rumput (*grass root* ) yang menurut analisa mereka masyarakat akar rumput inilah yang bisa mendulang suara mereka dalam pemilihan legislatif 2024. Hal ini ditunjukkan dengan adanya upaya dari para caleg untuk membentuk tim pemenangan dengan struktur yang lengkap mulai dari tingkat tertinggi , hingga ke tingkat sekelas RT. Hal ini dilakukan bukan untuk berkampanye dan juga dapat digunakan para caleg untuk *deliver goods* kepada masyarakat.

Awalnya para tim sukses ini tidak secara gamblang menyebutkan bahwa pihaknya memberikan uang tunai secara langsung kepada masyarakat sebagai cara untuk memobilisasi suara dan hanya menyampaikan bahwa pemberian yang

dilakukan Sarmilih sebagai caleg lebih terfokus pada barang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Akan tetapi temuan data selanjutnya memberikan informasi bahwa pemberian uang yang dilakukan timses dari caleg baik Desy Yusandi maupun Ella diberikan dengan nominal yang berbeda antara masyarakat biasa dengan masyarakat yang merupakan tokoh agama maupun tokoh masyarakat seperti RT. Para ketua RT yang mana struktur di bawahnya karena dia merupakan Ketua RW, untuk menata siapa saja warga dari masing-masing RT yang mau mencoblos Desy maupun Ella sebagai caleg.

“Cara paling mudah tentu ya kampanye dengan jaringan keluarga, karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Setelah penguatan keluarga selesai barulah kita keluar. Contohnya yang seperti saya lakukan, saya dan tim saya bisa mendatangi rumah warga satu-satu untuk melakukan pendataan siapa yang akan memilih Sarmilih, tentu mereka harus setor nama lengkap, tanda tangan dan foto copy KTP, namun ada cara yang lebih mudah saya gunakan, tinggal minta bantuan RT, karena saya kan ketua RW juga jadi dengan pak RT mengkoordinir warganya itu jadi lebih gampang untuk tau siapa aja yang akan memilih ini” (Wawancara Timses 12 Juli 2024)

Adanya tim sukses yang berasal dari kalangan keluarga ataupun pertemanan sendiri dan juga di isi oleh para tokoh masyarakat dapat dianalisa bahwa hal ini merupakan terciptanya suatu hubungan Patronase yang kompleks. Yang dimaksudkan disini adalah caleg membutuhkan tim sukses yang berpengaruh hingga ke masyarakat akar rumput untuk dapat memobilisasi

suara masyarakat, sebaliknya tim sukses juga membutuhkan caleg agar apabila caleg tersebut berhasil memenangkan kontestasi pemilu, maka kepentingan dari para timses.

Fenomena ini tentu dapat kita jadikan sebuah data analisa, bahwa nyatanya apa yang dilakukan oleh Robi Asbi ini sebagai salah satu timses caleg telah masuk dalam kategori Vote Buying. Fenomena Vote Buying (Aspinall,2015) ini sangat mudah diidentifikasi dari yang dilakukan oleh para caleg dan timsesnya dengan memberikan uang tunai dan barang-barang dalam masa kampanye calon anggota legislatif. Tujuannya tak lain dan tak bukan ini merupakan sebuah upaya agar proses mobilisasi suara masyarakat untuk dapat memberikan suaranya kepada Sarmilih sebagai kontestan tercapai.

Pelibatan tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh agama yang memiliki pengaruh di wilayah Kelurahan Karang Mulya inilah, para caleg akan mampu memobilisasi suara pemilih secara signifikan untuk memenangkan dirinya. Hal ini didasarkan dari beberapa hasil studi mengenai klientelisme keberadaan tim sukses di akar rumput notabene adalah tim yang berasal dari unsur masyarakat setempat secara otomatis sudah dikenal dan berpengaruh besar kepada meningkatnya dukungan dari para pemilih dan hal ini lebih efektif dilakukan daripada dilakukan oleh tim yang belum dikenal ( Aspinall & Berenschot, 2019 ).

Masyarakat Kelurahan Karang Mulya Kecamatan

Karang Tengah sebagai obyek merespon fenomena *Vote Buying* atau yang biasa mereka kenal dengan “Serangan Fajar” ini dengan tanggapan beragam. Terdapat sekelompok masyarakat yang merespon fenomena ini secara rasional, ada pula yang meresponnya secara pragmatis meskipun sebagian besar masyarakat menerima apa yang diberikan oleh tim sukses kepada mereka. Beberapa yang berhasil penulis mintai keterangannya seperti Usman, salah seorang warga kelurahan Karang Mulya mengiyakan bahwa dirinya mendapatkan “Serangan Fajar” dari Robi Asbi untuk memilih calon legislatif tertentu

“Betul, saya dapat seranganfajar sekali sebelum pemilihan dari bapak Robi Asbi. Diminta saya harus nyoblos Ibu Desy Yusandi jadi anggota dewan, terus diberi duit, namanya dikasi duit pasti saya ambil aja neng” (Wawancara Usman 12 Juni 2024)

Disinilah tim sukses bekerja di akar rumput bekerja secara langsung memasarkan kandidat caleg yang mereka dukung kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Karang Mulya. Mereka bertugas untuk membujuk para konstituen yang biasanya dimulai dengan mempengaruhi tetangga-tetangga mereka untuk memilih kandidat tertentu.

Seperti yang telah ditunjukkan dari hasil penelitian bahwa kegiatan yang mereka lakukan untuk mengkampanyekan calon legislatif yang mereka dukung ini juga dibarengi dengan adanya kegiatan-kegiatan patronase dengan memberikan sesuatu

kepada para pemilih seperti uang maupun barang sebagai sebuah *patronage goods*. Hal inilah yang pada umumnya dikenal dengan upaya *Vote Buying* dengan tujuan bahwa masyarakat akan terbeli suaranya demi kemenangan para caleg tersebut dalam kontestasi politik. ( Aspinall & Berenschot, 2019 ).

Munculnya Perubahan sistem pemilu yang terjadi di Indonesia pada akhirnya berdampak pula pada pergeseran dinamika politik terutama munculnya dinamika politik *patronase* dan *klientelisme* ini. Fenomena yang terjadi pada pemilihan legislatif 2024 di Kelurahan Karang Mulya Kota Tangerang dengan dapat dimaknasi sebagai sebuah politik *patronase*. Adanya sumber daya berupa uang maupun barang atau jasa yang berasal dari para caleg , seperti yang dirujuk dari Shefter (1995) dalam Aspinall & Sukmajati (2015), dimaknai sebagai sebuah pembagian keuntungan dari kalangan politisi guna memmberikan sesuatu kepada masyarakat pemilih, pekerja kamanye dengan tujuan guna mendapatkan dukungan politik.

Sedangkan Klientelisme yang terjadi jika merujuk pada Hutchcroft (2014) dalam Aspinall & Sukmajati, (2015) , merupakan suatu hubungan antara politisi dengan masyarakat yang berbentuk tukar jasa dimana para politisi memberikan keuntungan material kepada para masyarakat pemilih yang ditukar dengan suara pemilih khussunya masyarakat di kelurahan Karang Mulya dalam dukungan politik terhadap calon

legislatif yang dipilih karena telah memeberikan mereka patronage goods tadi. (Adliima, 2021)

**BAB V**  
**PENGARUH POLITIK PATRONASE TERHADAP**  
**PILIHAN MASYARAKAT PADA PEMILIHAN**  
**LEGISLATIF 2024 DI KELURAHAN KARANG MULYA**  
**KOTA TANGERANG**

**A. Pengaruh Politik Patronase Terhadap Masyarakat di  
Kelurahan Karang Mulya**

Munculnya fenomena patronase yang di implikasikan dalam praktik politik uang menjadi dalam konteks pemilu legislative sudah dianggap sebagai hal yang lumrah. Seperti yang diungkapkan oleh Muhtadi (2019) ini menjadi hal yang lumrah khususnya pasca bergulirnya reformasi. Adanya sistem proporsional terbuka yang memberikan kesempatan masyarakat sebagai pemilih untuk memilih langsung calon yang akan mewakili suara dan aspirasi mereka di parlemen. Namun disisi lain sistem ini digunakan oleh partai politik untuk melakukan komunikasi secara langsung agar menanamkan pengaruhnya kepada masyarakat agar masyarakat memilih partai mereka ataupun kandidat yang diusung oleh partai politik tersebut.

Apa yang terjadi di Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang seperti yang dijabarkan pada bab sebelumnya merupakan praktek yang sejatinya mencederai demokrasi itu sendiri. Praktik mengacu pada upaya kandidat atau partai politik untuk mempengaruhi keputusan pemilih melalui

pemberian uang atau barang. Praktik ini tidak hanya mencoreng integritas pemilihan, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik.

James S. Coleman mengatakan bahwa individu membuat keputusan berdasarkan perhitungan rasional atas keuntungan dan kerugian dari berbagai pilihan yang ada. Dalam konteks politik uang, hal ini mengidentifikasi bagaimana pemilih di Kelurahan Karang Mulya mempertimbangkan tawaran uang atau barang dalam proses pengambilan keputusan mereka. Dalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif, para calon yang bersaing berusaha dengan berbagai cara untuk mencapai kemenangan. Tanpa disadari, *money politic* muncul sebagai upaya untuk memengaruhi masyarakat agar memilih calon yang memberikan suap atau *money politic*. Seiring berjalannya waktu, *money politic* telah menjadi budaya dalam proses menjelang Pemilihan.

Para anggota legislatif ini seharusnya adalah mereka yang dipilih berdasarkan integritas dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Namun yang terjadi di lapangan proses pemilu legislatif ini banyak ditemukan pelanggaran khususnya yang berkaitan dengan proses kampanye calon anggota legislative (Caleg) yakni dengan melakukan praktik politik uang (*Money Politics*). Istilah politik uang bukan hanya berkaitan dengan praktik distribusi uang saja, namun mencakup hal-hal lain yang diberikan kandidat caleg kepada pemilih guna tujuan memobilisasi suara mereka (Aspinall & Sukmajati, 2015)

Pada kontestasi pemilu legislatif 2024 yang terjadi di Kelurahan Karang Mulya Kota Tangerang terdapat fenomena-fenomena yang menjadi indikasi adanya strategi caleg untuk memobilisasi suara masyarakat guna memenangkan mereka melalui politik uang. Meskipun tidak secara gamblang para caleg cara mereka memperoleh suara adalah dengan menggunakan politik uang, namun dalam penelitian ini penulis menemukan banyak strategi-strategi kampanye para caleg yang dapat di indikasikan sebagai praktik dari politik uang tersebut.

Fenomena politik uang sudah umum terjadi dan digunakan khususnya dalam pemilihan umum. Berdasarkan hasil observasi di Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang praktik politik uang banyak dijumpai dalam bentuk yang beragam khususnya pada pemilu legislatif 2024. Hal ini seperti yang ditunjukkan pada data lapangan berikut

**Tabel 5.1 analisa masyarakat penerima politik uang dengan tingkat rasionalitas mereka memilih caleg yang memberi politik uang tersebut**

| CAKUPAN | JUMLAH PENERIMA GOODS (KK) | MEMILIH BERDASARKAN PEMBERIAN | CAPAIAN (%) |
|---------|----------------------------|-------------------------------|-------------|
| RW 01   | 170                        | 120                           | 71%         |
| RW 02   | 200                        | 165                           | 83%         |
| RW 03   | 135                        | 100                           | 74%         |
| RW 04   | 245                        | 105                           | 43%         |
| RW 05   | 112                        | 99                            | 88%         |
| RW 06   | 156                        | 100                           | 64%         |
| RW 07   | 211                        | 143                           | 68%         |
| RW 08   | 113                        | 40                            | 35%         |
| RW 09   | 110                        | 101                           | 92%         |
| RW 10   | 200                        | 120                           | 60%         |
| RW 11   | 154                        | 74                            | 48%         |
| RW 12   | 137                        | 121                           | 88%         |
| RW 13   | 186                        | 150                           | 81%         |
| RW 14   | 112                        | 78                            | 70%         |
| RW 15   | 200                        | 124                           | 62%         |
| RW 16   | 145                        | 54                            | 37%         |

Dilihat pada data diatas menunjukkan bahwa dari total 16 RW yang berada di wilayah kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang semuanya mendapatkan praktik politik uang yang dilakukan oleh masing-masing caleg. Dari data yang ada ditunjukkan bahwa hampir seluruhnya menunjukkan cakupan data lebih dari 50%. Hal ini menandakan bahwa praktik ini berdampak pada mobilisasi suara masyarakat yang akan diberikan kepada caleg yang memberinya *political goods*.

Dari data tersebut , penelitian ini akan mengulas lebih detail mengenai *political goods* apakah yang paling mempengaruhi penggiringan suara masyarakat dalam konteks pemilu legislatif di Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang ini yang ijelaskan dalam penjabaran berikut :

### **1. Politik Gentong Babi (*Pork Barrel*)**

Politik gentong babi (*pork barrel politics*) adalah salah satu contoh kegiatan politik uang yang dicirikan dengan adanya pendistribusian sumberdaya dari para politisi ke wilayah yang berkaitan dengan mereka seperti daerah pemilihan amupun dalam cakupan geografis tertentu.

Saragintan (2011) mengemukakan bahwa kegiatan ini dilakukan tak lain dan tidak bukan adalah un tuk tujuan memobilisasi suara masyarakat dalam kontestasi pemilihan umum.

Pada kontestasi pileg 2024, praktik politik getong babi ini penulis temukan penulis temukan dilakukan oleh

salah caleg yang berkontestasi di daerah pemilihan Kelurahan Karang Mulya. Praktik ini berupa pemasangan lampu penerangan jalan sebagai bentuk pemenuhan fasilitas umum dan pembagian sembako oleh para caleg dan timmesnya Ketika sedang berkampanye.

Ella Silvia, yang merupakan caleg dari PAN , dan merupakan anggota legislatif DPRD Provinsi Banten pada periode sebelumnya , menggunakan strategi untuk memasang lampu penerangan jalan , khususnya di wilayah kelurahan karang Mulya. Hal ini dilakukanya dengan dalih hanya merupakan bagian dari pemenuhan aspirasi masyarakat kelurahan Karang Mulya. Penggunaan dana aspirasi partai oleh Ella Silvia, untuk memberikan fasilitas lampu penerangan jalan , merupakan indikasi adanya distribusi sumber daya yang dilakukan oleh caleg di wilayah kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah yang merupakan wilayah yang masuk dapil Ella dalam pemilihan legislatif.

Hasil temuan tersebut secara jelas menggambarkan bahwa pemberi fasilitas lampu penerangan jalanyang dilakukan oleh Ella Silvia sebagai caleg merupakan sebuah perilaku dari caleg tersebut sebagai bentuk upaya untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat agar memilih dirinya dalam pemilihan umum legislatif. Ella silvia yang notabene merupakan anggota DPRD Provinsi Banten

Periode 2019-2024 memiliki misi agar dirinya terpilih kembali pada pileg tahun 2024 ini. Dana aspirasi partai yang digunakan Ella Silvia untuk membangun lampu penerangan jalan notabene merupakan dana yang bersumber dari anggaran daerah yang memang dikhususkan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, termasuk juga pemenuhan fasilitas umum. Ella Silvia melakukan hal ini di wilayah kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah, yang masuk wilayah dapilnya, dan di targetkan akan menjadi basis suara untuk memobilisasi dukungan suara dari masyarakat Karang Mulya.

Apa yang dilakukan oleh Ella Silvia untuk menunjukkan rekam jejak nya sebagai caleg pada periode sebelumnya tidak lantas menjadikan dirinya memperoleh dukungan dan suara masyarakat Karang Mulya secara signifikan serta gagal mendapatkan kursi dalam pemilihan umum legislatif tahun 2024. praktik patronase yang dilakukan oleh Ella Silvia melalui pemasangan lampu penerangan jalan di Kelurahan Karang Mulya dari dana aspirasi partai tidak berdampak signifikan bagi Tingkat elektabilitas nya sebagai caleg.

Penelitian ini juga mengungkapkan fenomena bahwa ,gagalnya upaya Ella Silvia untuk terpilih Kembali menjadi anggota DPRD Provinsi Banten pada pileg 2024, juga

berdampak pada program pemasangan lampu penerangan jalan yang sebelumnya ia jalankan. Berdasarkan data dari observasi lapangan, ditemukan fakta bahwa, semenjak Ella Silvia Gagal terpilih Kembali, program pemasangan lampu jalan tersebut dihentikan dan bahkan lampu penerangan jalan yang telah terpasang pun tidak menyala seperti sebelumnya.

Ada indikasi bahwa, fenomena ini merupakan suatu bentuk kekecewaan dari Ella Silvia sebagai calon anggota legislatif yang gagal memaksimalkan cita dirinya sebagai anggota DPRD Provinsi Banten 2019-2024 sebagai modal rekam jejaknya untuk terpilih Kembali pada pileg 2024 ini.

## **2. *Club Goods dan Individual Gift***

Dinamika pileg 2024 di Kelurahan Karang Mulya, juga diwarnai dengan adanya pemberian barang-barang dari para caleg kepada masyarakat. Data observasi menunjukkan bahwa caleg yang penulis angkat pada penelitian ini yakni Desy Yusandi dari Partai Golkar dan Ella Silvia dari PAN, sama-sama memberikan barang-barang, seperti sembaki sebagai langkah untuk dapat memperoleh dukungan suara masyarakat Karang Mulya pada pileg 2024.

Seperti yang diungkapkan pada bab sebelumnya, dinamika yang terjadi dilapangan adalah, para caleg beserta dengan tim suksesnya memberikan bantuan kepada masyarakat seperti pemberian beras, sembako, minyak bahkan hingga produk-produk lain seperti jilbab, dompet

kecil, dan lain sebagainya.

Para narasumber caleg seperti Desy Yusandi dan Ella Silvia, sama-sama mengatakan bahwa pemberian yang mereka lakukan adalah pemberian secara pribadi dan tidak melanggar peraturan pemilihan umum yang berlaku. Berangkat dari alasan inilah para caleg tersebut mengerahkan jaringan tim suksesnya dan juga broker-broker politik yang seperti telah dibahas pada bab sebelumnya yang notabene terdiri dari jaringan yang terorganisir secara teritorial dan Sebagian berisi tokoh-tokoh masyarakat untuk mendistribusikan *political goods* tersebut kepada masyarakat khususnya di wilayah Kelurahan Karang Mulya Kota Tangerang.

Pendistribusian *political goods* yang dilakukan oleh caleg kepada masyarakat berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Desy Yusandi dan timsesnya bahwa hal tersebut dilakukan untuk membentuk bonding antara caleg dengan konstituennya. Serupa dengan Desy Yusandi, Ella Silvia pun mengatakan hal yang serupa, namun keduanya memiliki hasil yang berbeda.

Meskipun keduanya sama-sama caleg yang sebelumnya sudah pernah menjadi anggota DPRD, namun pada pileg 2024, keduanya mendapatkan hasil yang berbeda. Desy Yusandi berhasil menerapkan strategi ini melalui pemberian barang yang *continue* dan bervariasi kepada masyarakat di

Kelurahan Karang Mulya. Apa yang dilakukan oleh Desy Yusandi ini berhasil menciptakan bonding kepada masyarakat dan hal tersebut mengakibatkan suara masyarakat termobilisasi dengan baik sehingga Desy Yusandi berhasil memperoleh suara signifikan pada pileg 2024.

Berbeda dengan Desy Yusandi, Ella Silvia, lebih berfokus bukan pada barang yang diberikan, namun jaringan timses yang terdiri dari tokoh-tokoh penting masyarakat untuk mendeliver *political goods* tersebut kepada masyarakat kelurahan Karang Mulya. Tokoh-tokoh masyarakat ini menjadi penting menurut Ella Silvia sebab, pendistribusian *club goods* dari dirinya apabila melalui tokoh masyarakat ini akan dapat memobilisasi suara masyarakat untuk memilih dirinya.

Namun, nyatanya temuan data observasi menunjukkan bahwa, pelibatan tokoh masyarakat sebagai timses, berkaitan dengan hubungan timbal balik, yang akan diberikan oleh Ella Silvia sebagai caleg kepada para tokoh masyarakat ini apabila ia terpilih menjadi anggota legislative Kembali.

Selain itu dalam temuan lain, tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai timses bisa mendeliver *political goods* tersebut kepada masyarakat Karang Mulya, dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Ella Silvia. Namun

disisi yang lain , tokoh masyarakat ini tidak mampu memberi kepastian apakah ajakanya kepada masyarakat tersebut dapat dikonversi menjadi jumlah dukungan suara yang meningkat atau tidak.

Hal ini didasarkan pada analisa bahwa bisa jadi para tokoh masyarakat yang menjadi broker caleg ini meminta masyarakat untuk mendukung ella silvia dan mendistribusikan *political goods* kepada masyarakat, namun apabila masyarakat menganggap bahwa barang pemberian tersebut tidak membawa keuntungan dan manfaat secara pribadi kepada masyarakat, maka masyarakat tidak akan memilih Ella .

Analisa ini dapat dijadikan dasar argumen tadi dan terbukti dengan adanya komparasi *political goods* yang diberikan oleh Desy Yusandi bersifat kontinyu dan bervariasi mulai dari jenis dan ukuranya. Sementara Ella Silvia lebih focus pada tokoh yang mendistribusikan *political goods* tersebut dan tidak bisa memetakan apakah dukungan suara akan diperolehnya sebagai timbal balik. Sehingga hipotesa yang dapat diambil adalah , adanya variasi *political goods* dari kualitas dan kuantitas menjadi salah satu factor mengapa Desy Yusandi lebih beruntung karena dipilih masyarakat.

### **3. *Vote Buying***

Kelurahan Karang Mulya , Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang , seperti yang disebutkan pada pembahasan

sebelumnya merupakan salah satu wilayah daerah pemilihan dengan basis suara masyarakat yang cukup besar. Sehingga caleg yang berkontestasi seperti Desy Yusandi maupun Elli Silvia berupaya untuk dapat mendulang perolehan suara signifikan di wilayah ini. Seperti dua jenis politik uang yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat satu jenis lagi yang menjadi kunci dari keberhasilan strategi sebelumnya yakni pembelian suara masyarakat dengan melakukan pendistribusian uang secara langsung. Hal inilah yang lantas dikenal dengan istilah pembelian suara masyarakat untuk mendapatkan kemenangan dalam kontestasi pemilu (*Vote Buying*).

Desy Yusandi dan Juga Ella Silvia dalam penelitian ini terungkap bahwa keduanya sama-sama menjalankan praktik memberikan sejumlah uang yang bervariasi kepada masyarakat mulai dari pecahan Rp.50.000-Rp 250.000 kepada masyarakat melalui jaringan timses dan jaringan broker-borker politik seperti pelibatan jaringan keluarga maupun tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan dalam secara bertahap, mulai dari setiap kunjungan hingga dilakukan juga melalui door to door kepada masyarakat hingga H-1 dan Hari H pencoblosan melalui skema serangan fajar seperti yang pada umumnya terjadi.

Masyarakat Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah secara umum menyadari bahwa praktik

pemberian yang dilakukan oleh caleg seperti misalnya pemberian sembako proyek pengadaan sarana prasarana hingga pemberian uang secara tunai yang dilakukan oleh caleg seperti Desy Yusandi Maupun Ella Silvia merupakan bentuk nyata dari praktik politik uang. Berdasarkan dari tiga contoh praktik politik uang yang dijabarkan diatas , tanggapan masyarakat juga beragam dalam memaknai kontes pemberian para caleg tersebut.

Data menunjukkan bahwa dari praktik *pork barrel* seperti yang dilakukan oleh Ella Silvia melalui dana aspirasi partai untuk program pemasangan lampu penerangan jalan nyatanya bukan menjadi sebuah alasan utama bagi masyarakat untuk memberikan suaranya kepada ella pada pileg 2024. Upaya Pembangunan rekam jejak yang dilakukan ella melalui program dana aspirasi pemasangan lampu penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan dalam upaya memobilisasi suara masyarakat.

Analisa yang dapat dilakukan dari penjabaran poin sebelumnya adalah bahwa masyarakat kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang, lebih tertarik dengan barang fisik yang diberikan kepada mereka. Hal ini dibuktikan dengan temuan bahwa pemberian dari para caleg seperti sembako, barang, bahkan uang lebih mempengaruhi perolehan suara yang akan diperoleh oleh caleg tersebut.

Tidak hanya berhenti pada *delivering goods* saja , dari uraian sebelumnya ditemukan indikator-indikator penting yang berkaitan dengan potensi masyarakat untuk memberikan suaranya kepada caleg yang mereka anggap lebih membawa dampak manfaat personal bagi diri masyarakat. Meskipun kelurahan Karang Mulya ini merupakan wilayah dengan masyarakat yang memiliki rata-rata Pendidikan yang cukup baik , namun faktanya praktik politik uang semacam ini khususnya dalam pemilihan legislatif tetap tidak dapat dihindari dan terus menerus berlangsung.

Hal ini semakin memperkuat argument yang dikemukakan oleh Aspinall dan Sukmajati (2015) bahwa masyarakat tidak terlalu penting memperdulikan visi dan misi yang diusung oleh caleg. Begitupula para caleg yang gagal secara utuh untuk menangkap persoalan yang sesungguhnya terjadi di masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat menjadi apatis terhadap siapa calon yang maju. Tidak hanya berhenti disitu , masyarakat juga pada akhirnya berpikiran pragmatis seperti fakta yang terungkap bahwa masyarakat Karang Mulya, lebih mempertimbangkan caleg yang dapat memberikan manfaat secara personal kepada mereka melalui *political goods* yang para caleg distribusikan hingga pendistribusian uang secara terang-terangan kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan kutipan wawancara

dengan masyarakat desa Karang Mulya sebagai berikut :

“Kalo saya memilih mah , orang nya siapapun silahkan yang penting bisa membawa manfaat bagi saya maupun masyarakat Karang Mulya yang lain , missal kasih sembako atau kasih bantuan apa gitu , itu lebih dari itu missal kasih uang , nah itu kan lebih bisa saya manfaatkan entah untuk kebutuhan sehari-hari ataupun yang lainnya. Jadi dampaknya langsung ngena ke masyarakat. Terkait itu diperbolehkan atau tidak dalam aturan , saya kurang paham, yang terpenting masyarakat bisa dibantu udah seneng.dan ya pasti karena sudah dihafal , apalagi kalo calegnya itu rutin kasih pasti ya saya pilih” (Wawancara Ibu Munah masyarakat Karang Mulya, Agustus 2024)

Apa yang dikatakan oleh ibu munah tersebut juga diungkapkan oleh masyarakat Karang Mulya yang lain yakni bapak sugeng. Beliau mengungkapkan bahwa pemberian uang yang dilakukan oleh caleg melalui timsesnya langsung diterima tanpa piker Panjang. Bahkan Ketika timses dari caleg menyampaikan bahwa bapak sugeng haru memilih caleg yang dimaksud maka masyarakat tidak akan menolak. Sugeng berdalih , bahwa pemberian uang dari caleg ini lebih bermanfaat apalagi disaat kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil.

“Waktu itu Pak RT datang ke rumah memberikan uang

sejumlah Rp.50.000, dan memberitahukan bahwa harus memilih calon tersebut. Dalam keadaan ekonomi yang sedang menurun, saya pikir tidak ada salahnya menerima barang atau uang tersebut secara cuma-cuma. Saya juga tidak terlalu mementingkan visi misi dari beberapa calon, toh pada akhirnya yang menjalani hidup ya kita sendiri, mereka tidak akan membantu kita secara terus-menerus.” (Wawancara Sugeng 27 Juli 2024)

Temuan ini semakin memperkuat argument penelitian bahwa, sebagian masyarakat Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang, menganggap visi dan misi caleg tidak terlalu penting. Bagi masyarakat seperti sugeng ini yang notabene merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil, bantuan daricaleg yang berupa barang maupun uang bagi mereka tidak salah dan mereka anggap hal tersebut merupakan bantuan untuk masyarakat seperti dirinya.

Praktik politik patronase caleg dengan memberikan uang maupun political goods, merupakan bentuk politik uang yang banyak dilakukan dalam pemilu di Indonesia (Aspinall dan Sukmajati, 2015). Terlebih lagi hal ini akan berdampak signifikan bagi suara caleg apabila caleg tersebut dalam berbagai variasi mulai dari kualitas pemberian yang ditingkatkan hingga kuantitasnya.

Temuan penelitian mengungkap bahwa caleg seperti

Desy Yusandi maupun Ella Silvia keduanya ama-sama melakukan praktik politik patronase dengan mendistribusikan barang dan uang kepada masyarakat Karang Mulya dengan maksud memperoleh dukungan suara dalam pileg 2024. Namun demikian , keduanya memiliki strategi yang berbeda Dimana Desy Yusandi mendistribusikan political goodsnya secara bertahap dan bervariasi. Sebagai contoh pemberian beras yang dilakukan oleh Desy meningkat mulai dari 2,5Kg hingga 5 Kg. sementara itu Ella Silvia , meskipun tidak secara gamblang menyebutkan berapa berat beras yang dirinya bagi kepada masyarakat secara eksplisit ia menyebutkan bahwa pemberian beras maupun sembako tersebut disama ratakan.

Apa yang terjadi disini dapat menjadi sebuah argument bahwa, distribusi political goods dari para caleg sangat dipengaruhi keberhasilannya dari kualitas pemberian dan variasi pemberiannya. Temuan lain juga penulis dapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa , Desy Yusandi melakukannya secara rutin dan kontinyu serta berulang. Hal ini dikondisikan oleh Desy Yusandi berdasarkan tim sukses yang ia sebar hingga ke lapisan masyarakat. Para tim sukses inilah yang mengenal personal serta karakter istik masyarakat yang ada di akar rumput , sehingga memudahkan caleg seperti Desy Yusandi untuk memetakan mana basis wilayah yang berpotensi dapat dilakukan pendistribusian

political goods.

“Saya benar-benar menempatkan timses yang benar-benar mengenal masyarakat secara pribadi maupun karakteristiknya. Setelah itu timses akan mengkondisikan penyaluran program bantuan dari kami kepada masyarakat. Apabila sudah kenal dengan timsesnya kan masyarakat lebih mudah dikondisikan , tinggal kita atur dan sesuaikan pendistribusian bantuan ya secara bertahap dan berulang , karena mungkin wilayah tersebut jadi potensi basis suara yang besar” (Wawancara Dessy Yusandi 5 Mei 2024)

Berdasarkan hasil analisa diatas, sebagian masyarakat karang mulya yang menjadi narasumber dalam penelitian ini sejatinya menyikapi fenomena politik uang menjadi hal yang lumrah dan bukan menjadi masalah. Hal ini dikarenakan adanya masyarakat yang menganggap bahwa mereka akan memilih caleg bukan melihat visi dan misinya , namun lebih kepada siapa yang bisa memberikan manfaat personal kepada mereka.

Seperti yang diungkapkan oleh sugeng , maupun Munah bahwa , pemberian political goods yang dilakukan oleh caleg seperti Desy maupun Ella dalam rasional pemikiran mereka hal tersebut yang paling masuk akal membantu masyarakat. Karena ketika masyarakat menerima barang ataupun uang yang notabene itu merupakan praktik patronase dari para caleg, apa yang diberikan tersebut secara akal dan logika

masing-masing masyarakat, dapat dimanfaatkan oleh mereka dan membantu hidup mereka terutama bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi kurang stabil seperti sugeng.

Apa yang dilakukan masyarakat Karang Mulya seperti sugeng dan Munah ini menggambarkan bahwa tindakan individu didasarkan pada pertimbangan rasional yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipilih. Bagi mereka, mereka memilih bantuan dari para caleg tersebut dan menurut rasio mereka hal tersebut dapat membantu mereka sehingga masyarakat akan memberikan suara kepada caleg yang membantunya tersebut.

Namun dalam penelitian ini tidak hanya berhenti disitu saja. Kemenangan Desy Yusandi dibandingkan dengan Ella Silvia meskipun keduanya menggunakan strategi politik uang yang hampir sama, namun peningkatan kualitas produk dan kuantitas seperti yang desy lakukan , menjadi faktor lebih yang mendorong masyarakat Karang Mulya memberikan suaranya untuk Desy. Hal ini diartikan bahwa , siapa caleg yang bisa memberi lebih banyak dan lebih sering maka dia yang akan masyarakat pilih. Dan ini seperti teori rasional choice yang disebutkan oleh Coleman dalam Sastrawati , (2019) bahwa masyarakat akan memilih tindakan berdasarkan pertimbangan nilai dan analisa rasional mana yang lebih menguntungkan mereka secara rasional maka akan mempengaruhi keputusan masyarakat.

Analisis terhadap pengaruh politik patronase terhadap perolehan suara di Kelurahan Karang Mulya pada Pemilu Legislatif 2024 menunjukkan adanya praktik-praktik seperti politik gentong babi, distribusi barang berupa club goods dan individual gift, serta pembelian suara (vote buying). Praktik politik gentong babi ditandai dengan pendistribusian sumber daya publik, seperti pemasangan fasilitas umum, oleh calon legislatif (caleg) di daerah pemilihan. Misalnya, Ella Silvia menggunakan dana aspirasi partai untuk memasang lampu penerangan jalan. Namun, meskipun bertujuan membangun citra positif, strategi ini terbukti kurang efektif dalam meningkatkan elektabilitas, karena manfaatnya dinilai tidak langsung dan bersifat kurang berkelanjutan. Distribusi barang dalam bentuk sembako, minyak, dan barang rumah tangga, baik secara langsung maupun melalui tokoh masyarakat, menjadi praktik patronase yang lebih terstruktur.

Desy Yusandi menerapkan strategi pemberian barang secara Konsisten dan bervariasi, yang berhasil menciptakan ikatan emosional dengan masyarakat dan mendulang suara signifikan. Sebaliknya, Ella Silvia lebih fokus pada pelibatan tokoh masyarakat untuk mendistribusikan barang, tetapi pendekatan ini kurang berhasil karena masyarakat lebih menghargai manfaat langsung daripada proses distribusinya. Praktik pembelian suara (vote buying) melalui pemberian uang tunai menjadi bentuk patronase paling efektif. Caleg

seperti Desy Yusandi dan Ella Silvia memberikan uang dalam nominal Rp50.000 - Rp250.000, terutama menjelang hari pemilihan. Strategi ini dianggap sebagai bantuan langsung yang sangat dihargai masyarakat, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit. Dampaknya terlihat lebih signifikan dibandingkan visi dan misi caleg, karena manfaatnya terasa langsung oleh masyarakat.

Dari analisis keseluruhan, vote buying terbukti menjadi strategi paling efektif dalam mobilisasi suara, diikuti oleh distribusi barang yang dilakukan secara konsisten dan bervariasi, sementara politik gentong babi menunjukkan efektivitas paling rendah. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa masyarakat Kelurahan Karang Mulya lebih merespons pemberian yang bersifat personal dan langsung, ketimbang program pembangunan fasilitas umum. Temuan ini mendukung teori pilihan rasional, di mana masyarakat lebih cenderung memilih caleg berdasarkan manfaat konkret yang dirasakan. Namun demikian, temuan ini juga mengungkap tantangan besar dalam membangun kesadaran politik berbasis visi dan misi yang lebih idealis, sehingga mengurangi ketergantungan pada praktik politik uang.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari data yang telah dijabarkan diatas , penelitian mengenai praktik politik patronase dan pengaruhnya terhadap masyarakat di Kelurahan Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang didapatkan Kesimpulan sebagai berikut :

- a. Politik uang di Kelurahan Karang Mulya dilakukan secara beragam yakni dengan pemberian uang secara langsung melalui nominal yang berbeda, pemberian paket bantuan berupa sembako kepada masyarakat , serta pemberian layanan perbaikan fasilitas umum untuk menunjang sarana dan prasarana masyarakat.
- b. Dari semua jenis praktik politik uang yang dilakukan oleh caleg untuk mendulang suara masyarakat di wilayah kelurahan Karang Mulya ini , Pork Barrel dan Vote buying yakni dengan pemberian bantuan paket sembako dan alokasi anggaran untuk proyek lokal ditunjang dengan pemberian uang tunai sebagai bentuk hubungan patronase yang terjalin antara parpol dan caleg dengan pemilih menjadi yang paling signifikan pengaruhnya terhadap penggiringan suara masyarakat untuk memilih caleg ataupun partai politik yang memberikan sesuatu kepada mereka.
- c. Adanya praktik politik gentong babi melalui alokasi anggaran untuk proyek-proyek lokal dan praktik pembelian suara secara langsung dengan memberikan uang (Vote Buying ). Pada akhirnya menjadikan

timbulnya hubungan patronase ketergantungan masyarakat pada caleg tertentu.

- d. Aksi pendistribusian bantuan dari caleg yang dilakukan oleh jaringan broker politik yang berasal dari kalangan masyarakat sendiri dan serta jaringan tokoh lokal maupun keluarga juga menjadikan praktik politik uang ini semakin berpengaruh kuat di masyarakat. Hubungan patron-klien yang terbentuk dari praktik-praktik ini memperlihatkan bahwa politik patronase menjadi elemen sentral dalam struktur demokrasi di tingkat lokal. Tim sukses, yang sering melibatkan tokoh masyarakat seperti ketua RT/RW, memainkan peran penting dalam menyukseskan mobilisasi suara bagi caleg.
- e. Sebagian besar masyarakat cenderung menerima pemberian dari caleg, meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya menyetujui metode tersebut. Fenomena ini mencerminkan bahwa meskipun politik uang tidak sepenuhnya disukai, praktik ini masih diterima karena kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang rentan. Politik uang yang terjadi di Kelurahan Karang Mulya menunjukkan adanya kerusakan terhadap proses demokrasi yang seharusnya adil dan bersih.
- f. Praktik patronase dan memperkuat ketergantungan antara pemilih dan caleg yang menawarkan pemberian material atau manfaat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya langkah-langkah yang lebih tegas untuk memerangi politik uang dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan

kapabilitas dan visi-misi caleg, bukan sekadar atas dasar pemberian materi. Langkah-langkah ini diperlukan untuk mewujudkan demokrasi yang lebih sehat dan adil.

Dalam teori Rational Choice, individu dianggap membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional untuk memaksimalkan kepentingan dan keuntungan pribadi. Seharusnya, pilihan yang rasional dalam konteks pemilihan didasarkan pada evaluasi kapabilitas kandidat, rekam jejak kerja, serta visi dan misi yang ditawarkan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa praktik politik uang yang diterapkan oleh beberapa kandidat secara signifikan mempengaruhi pilihan masyarakat, terutama di kalangan pemilih yang rentan secara ekonomi. Dalam konteks ini, penerimaan uang atau barang dari kandidat seringkali menjadi faktor penentu utama dalam keputusan memilih, meskipun pemilih menyadari bahwa pertimbangan tersebut bukan didasarkan pada evaluasi rasional terhadap rekam jejak atau kemampuan kandidat.

Temuan utama menunjukkan bahwa ketika masyarakat memilih karena pemberian uang dari kandidat, keputusan tersebut tidak lagi berdasarkan pertimbangan rasional seperti yang diuraikan dalam teori Rational Choice, tetapi lebih pada pragmatisme. Pemilih pragmatis cenderung mempertimbangkan manfaat jangka pendek yang bisa diperoleh segera, seperti uang atau barang, daripada mempertimbangkan kualitas jangka panjang dari calon legislatif, seperti kemampuan memimpin, rekam jejak kerja, atau visi ke depan. Mereka tidak sepenuhnya mempertimbangkan track record kandidat,

sehingga pilihan mereka lebih didorong oleh keuntungan materi yang ditawarkan. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun dalam konteks Rational Choice pemilih seharusnya membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa banyak pemilih yang termotivasi oleh insentif jangka pendek, terutama uang. Dengan demikian, pengaruh uang dalam pemilihan menjadi faktor yang memperlemah penerapan pemilihan yang rasional dan cerdas.

## **B. Saran**

1. Diperlukan edukasi politik atau sosialisasi mengenai politik uang bagi masyarakat. Studi menunjukkan bahwa masih ada sebagian kecil masyarakat yang kurang memahami praktik politik uang.
2. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan pemilihan legislatif harus meningkatkan kewaspadaan agar praktik seperti itu tidak terulang di masa depan atau setidaknya berkurang.
3. Diperlukan langkah hukum yang tegas terhadap politisi, calon kandidat, atau masyarakat yang terlibat dalam praktik politik uang.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Argawati, U. (2022). *Penetapan Dapil Anggota Legislatif Sesuai Prinsip Dalam UU Pemilu*.
- arief. (2023). Dokumentasi Dalam Teknik Pengumpulan Data. *Pendidika Blog Nasional*.
- Aspinall, E., & Berenshot, W. (2020). *Democracy For Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aspinall, E., & Sukjamati, M. (2015). *POLITIK UANG DI INDONESIA*. RESEACRH CENTRE FOR POLITICS AND GOVERNMENT.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia Patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Badoh, I. Z., & Dahlan, A. (2010). *Korupsi Pemilu Di Indonesia*. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cecep Nana Nasuha, C. A. (2019). Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada (Studi Pada Pilkada Bupati di Kabupaten Kuningan). *Syntax*

*Idea.*

- Coudhury, A. (2019). Participant Observation and Non-Participant Observation. *Yout Article Library The Next Generation Library*.
- Creswell, J. W. (2008). *RESEARCH DESIGN Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (3rd ed.). belbuk.com.
- Djuyandi, Y. (2023). *Pengantar Ilmu Politik*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- dkk, L. U. (2019, Juni). Fenomena Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL*.
- Edward Aspinall, M. S. (2015). *POLITIK UANG DI INDONESIA Patronase dan Klientelisme di Pemilu Legislatif 2014*.
- Edward Aspinall, & Berenschot, W. (2019). *Democracy For Sale Elections, Clientelism, and The State in Indonesia*. Cornell University press.
- Fitriyah. (2013). FENOMENA POLITIK UANG DALAM PILKADA. *Jurnal Ilmu Politik*.
- Fitriyah, & d. (2021). Partisipasi Politik dan Pemilih Muda: Konteks Pilgub Jateng 2018 dan Pilkada 2019 di Kabupaten Temanggung. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*.
- Hikmah, A. (2020). *Partisipasi Pemuda dalam Kontestasi Politik di Kabupaten Maros (Studi Kasus;Pemilihan Calon Anggota Legislatif Tahun 2019)*. Maros: Universitas Hasanuddin.

- Huda, M. S., Raharjanti, P., Pramesti, A. P., Dewi, T. L., & Sharon, S. (2022). The Role of The Millennial Generation in the Creativity of the Anti-Money Politics Movement. *Journal of Creativity Student*.
- I wayan Febrianto, D. (2020). ANALISIS PENANGANAN POLITIK UANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PILKADA. *JURNAL INTERPRETASI HUKUM*.
- Irawatiningrum, S., & Rohid, N. (2019). Politik Uang dan Pemilu Serentak 2019 di Tuban. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*.
- Irianto, & Dkk. (2022). *Politik Perpajakan Kontemporer: Pertautan Ekonomi, Politik, Dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. (2019). Pengaruh Money Politic Terhadap Daya Pilih Masyarakat di Kabupaten Tabalong. *KPU.go.id*.
- Mahsun, M. (2020). Demokrasi Patronase dan Praktik Politik Uang: Pengalaman Pemilu Legislatif 2014 di Kota Palembang, Sumatera Selatan. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*.
- Muhtadi, B. (2019). *Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska- Orde Baru*. Jurnal Anti Korupsi INTEGRITAS.
- Nabila, N., & Azhar, M. (2020). Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia. *NOTARIUS*.
- Nail, M. H. (2018). Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Yuridis*.
- Philipus, & Aini, N. (2016). *Sosiologi dan Politik*. Raja Grafindo

Persada.

Pratiwi, A. D. (2018). Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia Melahirkan Korupsi Politik. *Trias Politika*.

Rahayu, M. P., Tyesty, L., & Herawati, R. (2017). Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia. *Law Journal Diponegoro*.

Rizki, J. M. (2023). Hindari politik uang dalam pemilu, begini aturan dan ancaman hukumannya. *hukum online.com*.

Sastrawati, N. (2019). PARTISIPASI POLITIK DALAM KONSEPSI TEORI PILIHAN RASIONAL JAMES S COLEMAN. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*.

Sastrawati, N. (2019). PARTISIPASI POLITIK DALAM KONSEPSI TEORI PILIHAN RASIONAL JAMES S COLEMAN. *Al-Risalah*.

Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supriyanto, D., & Wulandari, L. (2013). *BASA-BASI DANA KAMPANYE*. Yayasan Perludem.

Aspinal, E., & Berenshot, W. (2020). *Democracy For Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, Dan Negara Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang Di Indonesia: Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit Polgov.

Mahsun, M. (2020). *Demokrasi Patronase Dan Praktik Politik Uang*:

- Pengalaman Pemilu Legislatif 2014 Di Kota Palembang, Sumatera Selatan. *Jpw (Jurnal Politik Walisongo)* .
- Sastrawati, N. (2019). Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman. *Al-Risalah* .
- Firmanzah. 2008 “*Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas.*” Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 2008 “*Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Schroder, Peter. 2013 “*Strategi Politik*” Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung Fur die Freiheit, Indonesia..
- Stokes, Susan C. 2000 “*Perverse Accountability :A Formal Model Of Machine Politics With Evidence From Argentina*” American Political Science Review
- Aspinall, Edward & Ward Berenschot. 2019 “*Democracy For Sale: Pemilihan Umum, Klientelism, dan Negara di Indonesia*” Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Firmanzah. 2008 “*Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas.*” Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 2008 “*Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Schroder, Peter. 2013 “*Strategi Politik*” Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung Fur die Freiheit, Indonesia..
- Stokes, Susan C. 2000 “*Perverse Accountability :A Formal Model Of Machine Politics With Evidence From Argentina*” American Political Science Review

## LAMPIRAN

### 1. Calon Anggota Legislatif Kota Tangerang DPRD Provinsi

Yth. Bapak Aden Mubarok



### 2. Calon Anggota Legislatif Kota Tangerang DPRD Provinsi

Yth. Ibu Dessy Yusandi



### 3. Bapak Lurah dan Para Staff Kelurahan Karang Mulya



### 4. Dokumentasi Lain







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Yunita Amelia  
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang 5 Mei 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jln Abdullah 1, RT/RW 003/007,  
Kelurahan Karang Mulya,  
Kecamatan Karang Tengah, Kota  
Tangerang  
No. Whatsapp : 087880613960  
Email : [yunitaamelia30@gmail.com](mailto:yunitaamelia30@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. TPQ : 2007-2008
2. MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 19 JAKARTA:  
2008-2014
3. MADRASAH TSANAWIYAH DAARUL  
FAALAH : 2014-2017
4. SMAN 12 TANGERANG: 2017-2020

### C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Media Fisip Sport Club Tahun 2023

Demikian daftar Riwayat hidup ini di buat dengan sebenarnya dan dapat di gunakan semestinya